



UNIVERSITAS INDONESIA

**STRATEGI PENANGKALAN NUKLIR KOREA UTARA
PERIODE 2003-2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Sains (M.Si)
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia**

WINDHY DEWITASARI

0806438761

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI PASCASARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
JUNI 2011**

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Windhy Dewitasari

NPM : 0806438761

Tanda Tangan :

Tanggal : 22 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Windhy Dewitasari
NPM : 0806438761
Program Studi : PascaSarjana Hubungan Internasional
Judul Tesis : Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara Periode 2003-2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi PascaSarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Andi Widjajanto, M.S, M.Sc ()
Sekretaris Sidang : Asra Virgianita, M.A ()
Pembimbing : Broto Wardoyo, M.A ()
Penguji Ahli : Dr. Kusananto Anggoro ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Saya sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sejak masa perkuliahan sampai dengan penyusunan tesis ini, akan sangat sulit. Oleh karena itu, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Broto Wardoyo, selaku dosen pembimbing yang telah sangat baik berusaha dan bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Dr. Kusnanto Anggoro, selaku penguji ahli yang telah banyak memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru ke dalam tesis ini sehingga dapat menjadi lebih baik lagi.
3. Andi Widjajanto, MA, M.Si, selaku ketua sidang yang juga tidak kalah banyak dalam memberikan masukan terhadap penyusunan tesis ini.
4. Asra Virgianita M.A, selaku sekretaris sidang yang juga memberikan masukan terhadap tesis ini.

Ungkapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya juga ingin saya sampaikan kepada kedua Orang Tua saya serta keluarga yang telah memberikan bantuan baik itu dukungan moral serta finansial. Terima kasih untuk Papa dan Mama atas doa-nya yang tiada henti menyertai setiap langkahku. Adik-adikku Nonik Ayu Wulandari dan Fanny Ariandini yang selalu menjadi motivator terbesarku untuk selalu menjadi contoh yang baik bagi kalian.

Rasa terima kasih juga tidak lupa saya tujukan kepada teman-teman S2 angkatan 16 dan 17 yang telah lulus mendahului, terima kasih karena sudah menjadi cambuk sehingga saya sangat termotivasi untuk menyelesaikan pe-er ini. Untuk Yoan, Adit, dan Helmi, teman seangkatan 16,

senasib dan sepejuangan, akhirnya kita lulus juga. Untuk angkatan 17 yang sudah sangat *welcome* atas kehadiran saya, terima kasih atas hari-hari perkuliahan yang sangat menakjubkan dan meriah. Rangga, si ketua kelas teladan yang selalu dapat diandalkan. Yuli yang selalu *no prolemo, you go girl!* Devi yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Rika yang diam-diam menghanyutkan. Ipin yang seru dan Jesse yang selalu mencerahkan pemikiran kita semua.

Kepada Kapusdiklat dan Kabidren selaku atasan saya, serta rekan kerja di unit Pusdiklat yang telah banyak membantu saya. Terima kasih banyak atas segala waktu, kesempatan dan pengertian yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah. Terima kasih untuk Kiki, yang selalu bersedia diajak “escape” ketika suntuk melanda. Kepada rekan-rekan kerja angkatan XXIII, Anung yang tiada henti memberi perhatian dan pertolongan di saat-saat genting, Yudhis si Mas Negro, Mas Teddy, Mommy dr. Rika Permata Anwar, Mba Fitri, mba Kun, mba Dini, Leni, Ayu, Rama, Yani, Anita, Mutia, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan “udah sampai mana tesis-nya?” atau “kapan sidangnya?” juga “kapan wisudanya?” yang kadang membuat risih dan susah tidur, tapi sekaligus motivasi bagi saya untuk segera menyelesaikan tesis ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa dan kebersamaan yang telah diberikan selama ini. Akhir kata saya berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 22 Juni 2011

Penulis

Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windhy Dewitasari
NPM : 0806438761
Program Studi : PascaSarjana
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : FISIP
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Strategi Penangkalan Nuklir Nuklir Korea Utara Periode 2003-2010.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta

22 Juni 2011

Windhy Dewitasari

ABSTRAK

Nama : Windhy Dewitasari
Program Studi : PascaSarjana Hubungan Internasional
Judul : Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara periode 2003-2010

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori *nuclear deterrence strategy* untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variabel ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasikan bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

Kata kunci: pengembangan nuklir, senjata nuklir, strategi penangkalan nuklir, kemampuan defensif, dan kemampuan ofensif.

ABSTRACT

Name : Windhy Dewitasari
Department of Study : International Relations
Title : Nuclear Deterrence Strategy of North Korea 2003-2010 period

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or reciprocal interaction between variables.

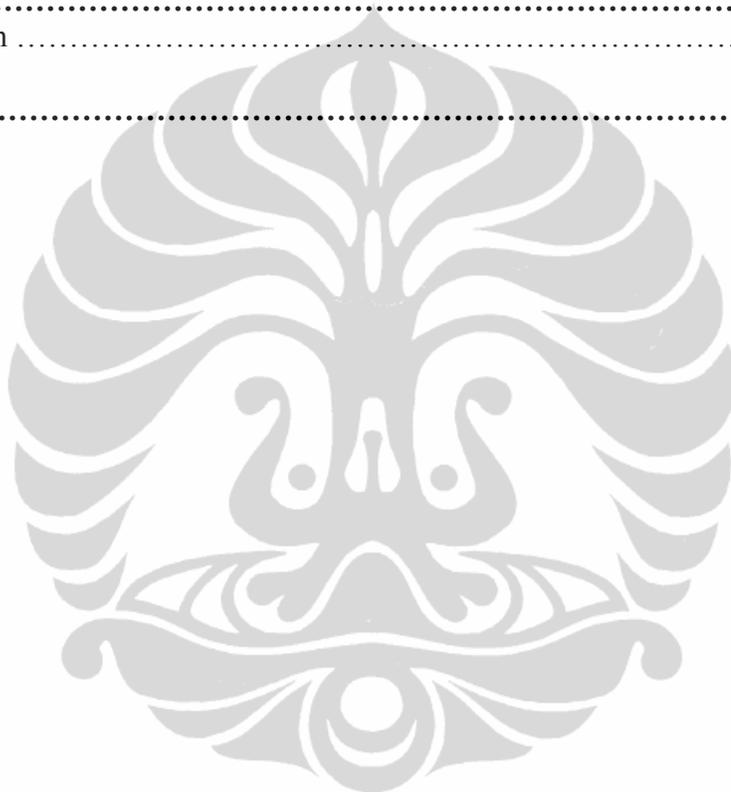
Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and offensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, offensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its offensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America's domination to intimidate and influence North Korea.

Key words: nuclear development, nuclear weapons, nuclear deterrence strategy, offensive and defensive capability

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PUBLIKASI PERNYATAAN ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Signifikansi Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Kerangka Pemikiran	19
1.7 Hipotesa	24
1.8 Model Analisis	24
1.9 Operasionalisasi Konsep	24
1.10 Prosedur dan Metode Penelitian	25
1.11 Sistematika Penulisan	26
2. PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA PERIODE 2003-2010	27
2.1 Adopsi <i>Doctrine of Massive Retaliation</i> Korea Utara	27
2.2 Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara	30
2.2.1 Krisis Politik di Semenanjung Korea	44
2.2.2 Kebijakan Keamanan Korea Utara	50
2.3 Kesimpulan	52
3. STRATEGI PENANGKALAN MILITER KOREA UTARA	54
3.1 Strategi <i>Deterrence</i> Korea Utara	54
3.1.1 Ancaman Pihak Lawan terhadap Keamanan Nasional Korea Utara	57
3.1.2 Jaminan Keamanan Korea Utara	61
3.2 Kredibilitas Militer Korea Utara melalui Senjata Nuklir	65
3.2.1 Kemampuan Defensif atau Serangan Balasan (Second Strike) Korea Utara	68
3.2.2 Kemampuan Koersif atau Penyerangan (Future Attack) Korea Utara	71

3.3	Kapabilitas Kekuatan Udara dan Senjata Nuklir Korea Utara sebagai Sebuah Bentuk Perimbangan	74
4.	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SENJATA NUKLIR DAN STRATEGI PENANGKALAN NUKLIR KOREA UTARA	84
4.1	Kredibilitas Senjata Nuklir sebagai Strategi Penangkalan Defensif	85
4.2	Kredibilitas Senjata Nuklir sebagai Strategi Penangkalan Ofensif	88
4.3	Kesimpulan	92
5.	PENUTUP	94
5.1	Kesimpulan	94
	DAFTAR PUSTAKA	104



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jangkauan Nuklir Korea Utara	65
Gambar 2. Kapabilitas Serangan Nuklir Korea Utara	66
Gambar 3. Lokasi Uji Coba Nuklir Korea Utara	90
Gambar 4. Lokasi Uji Nuklir Korea Utara	92



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Konteks perang dalam interaksi antar negara di dalam konflik kepentingan antar negara di dalam sistem internasional menjelaskan bahwa manuver militer sebagai pilihan utama menjadi permasalahan yang signifikan jika dikaitkan dengan kekuatan nuklir sebagai senjata. Signifikansi interaksi perang terletak pada perubahan esensi perang itu sendiri. Dalam pemikiran Clausewitz, perang terjadi akibat friksi yang berkembang antar pihak bertikai. Kondisi ini menggambarkan bentuk friksi antar negara dapat mempengaruhi jumlah persenjataan yang digunakan, namun dalam perang nuklir, jumlah jenis persenjataan konvensional tidak menjadi indikator utama. Hal ini disebabkan oleh esensi kekuatan nuklir yang lebih menghasilkan rasa takut jika perang nuklir benar-benar terjadi. Bentuk rasa takut atau ketakutan yang menjadi esensi kekuatan nuklir ini menjadi faktor yang sangat dominan dalam melihat peranan senjata nuklir dalam merubah konstelasi kekuatan negara yang kini tidak lagi bertumpu pada jumlah atau besaran kekuatan militer konvensional.¹

Sejak awal tahun 70an, doktrin mengenai perang nuklir dan akuisisi sistem persenjataan telah menjadi alternatif pilihan strategi dalam keamanan negara.² Konteks ini sejalan dengan kemampuan destruktif senjata nuklir yang sangat besar sehingga memiliki efektifitas terhadap implementasi strategi dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Di sisi lain, dengan berkembangnya pemahaman negara untuk mengadaptasi nuklir sebagai strategi militer, penggunaan senjata nuklir dianggap sebagai tindakan yang menghilangkan esensi moral dan sangat membahayakan keamanan dunia, namun memberikan dan meningkatkan kemampuan signifikan di dalam bidang militer, terutama keamanan negara.

¹ Ian Clark, *Nuclear Past, Nuclear Present: Hiroshima, Nagasaki, and Contemporary Strategy*, USA: Westview Press Inc, 1993, hal. 49

² *Ibid*, hal. 11

Permasalahan nuklir merupakan persoalan yang telah lama membayangi hubungan antar negara, terutama permasalahan keamanan. Senjata-senjata perusak massal yang memiliki kekuatan destruktif seperti ini tidak hanya secara radikal mengacaukan status quo, juga memutus pemahaman mengenai logika perang yang selama ini menjelaskan sistematika posisi negara *periphery and great power*. Perubahan sistematika antara negara besar dengan negara yang lebih kecil terlihat pada pola interaksi yang selama ini bersifat stagnan. Konteks hubungan antara negara kecil yang cenderung berlindung dibalik kekuatan negara *superpower*, mulai melihat senjata nuklir sebagai alternatif untuk mencapai keamanan. Kekuatan senjata nuklir yang ditujukan sebagai alternatif keamanan lambat laun akan terus meningkat dan berpotensi untuk menjadi rival negara-negara besar dalam konteks militer.³ Kondisi ini menjelaskan adanya tekanan yang sangat besar pada negara-negara yang juga melengkapi diri mereka sendiri untuk meningkatkan posisi tawar di dalam friksi politik dan keamanan, sehingga memicu suatu ‘aliran’ proliferasi dan perlombaan senjata, bersamaan dengan bahayanya. Konsekuensi logis dari pemikiran dan kebijakan tersebut membuat negara-negara yang selama ini sangat mengandalkan jaminan keamanan dari negara besar, seperti Korea Utara, Korea Selatan dan India, mulai memandang senjata nuklir sebagai sebuah jalan alternatif untuk melepaskan diri dari ikatan dengan Moskow atau Washington.⁴

Senjata nuklir mendapatkan perhatian bagi masyarakat dunia dalam suatu hubungan internasional antar negara. Senjata nuklir digunakan sebagai simbol kekuatan suatu negara dalam perang antar negara. Kepemilikan senjata nuklir, dapat meningkatkan kekuatan politik suatu negara, dalam artian “offensive” dan “defensive”. Dalam artian “offensive”, negara pemilik senjata nuklir dapat meningkatkan kemampuannya untuk mempengaruhi, mengintimidasi dan mendominasi negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer, untuk membuat mereka melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Walaupun negara lain tidak

³ Leonard S. Spector and Jacqueline R. Smith, *Nuclear Ambitions : The Spread of Nuclear Weapons 1989-1990*, Oxford: Westview Press, Inc., 1990, hal. 17

⁴ *Ibid.*

yakin bahwa negara pemilik nuklir tersebut akan menggunakan kekuatan militernya melawan negaranya dan siapapun tahu bahwa terdapat resiko yang mungkin tidak sebanding jika hal itu dilakukan.

Dalam artian “defensive”, peran dari senjata nuklir sangat menjanjikan dalam meningkatkan kekuatan politik suatu negara, bahkan di dunia dimana terdapat negara-negara pemilik senjata nuklir. Sebuah negara nuklir mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, mengintimidasi atau mendominasi negara lainnya. Namun setidaknya ia mampu untuk menghadapi dan melawan negara lain dalam upaya mempengaruhi, mengintimidasi atau mendominasi negaranya. Sejak senjata nuklir ditemukan, lebih jauh lagi, tidak ada jaminan yang pasti terhadap kemerdekaan suatu negara.⁵ Ketika Amerika Serikat menunjukkan kepemilikan kekuatan senjata nuklirnya kepada dunia, beberapa negara lain juga ingin melakukan hal serupa, memiliki senjata nuklir tersebut, apalagi jika mereka melihat akan adanya konflik kepentingan dengan AS atau dengan negara berkekuatan nuklir lainnya. Tidak ada satupun negara yang merasa nyaman dengan membiarkan negara musuh melakukan monopoli, secara terang-terangan atau rahasia, terhadap senjata nuklir.⁶ Kondisi ini telah merubah tatanan keamanan dunia yang mempengaruhi kebijakan negara.

Kehadiran perkembangan senjata nuklir yang telah mengubah tatanan dunia ini, telah menjadi sebuah ketakutan masyarakat internasional dikarenakan senjata nuklir merupakan senjata warisan Perang Dingin yang sangat mematikan. Sebagai buktinya, implikasi senjata nuklir dapat dilihat pada tahun 1945 yang oleh Sekutu digunakan untuk menundukkan Jepang di Hiroshima dan Nagasaki. Implikasi nuklir ini di dalam perkembangannya, di dalam dinamika politik internasional, telah berkembang dengan sedemikian pesatnya. Bersamaan dengan harapan besar dunia terhadap energi nuklir, meski dunia juga dihadapkan pada kenyataan pengembangan persenjataan nuklir.

⁵ A.J.C. Edwards, *Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace*, London: The Macmillan Press Ltd, 1986, hal. 39

⁶ *Ibid*, hal. 17

Terdapat beberapa alasan mengapa sebuah negara mengembangkan senjata nuklir. Beberapa negara mengembangkan senjata nuklir demi memenuhi kebutuhan akan keamanan (*security needs*) negaranya, sebagai sebuah bentuk *deterrence* atau sebagai senjata pamungkas untuk melindungi negara mereka dari invasi negara lain.⁷ Bentuk *deterrence* atau penangkalan yang dicapai melalui pengembangan senjata nuklir yang kemudian diimplementasikan melalui strategi nuklir memberikan sebuah bentuk penangkalan yang jauh berbeda dengan strategi penangkalan yang hanya bersandar pada kemampuan militer lainnya. Strategi penangkalan nuklir memiliki efektifitas dalam memberikan sebuah bentuk kehancuran yang jauh lebih kredibel. Kredibilitas strategi penangkalan ini menjadikan senjata nuklir sebagai sebagai strategi penangkalan yang mampu menciptakan bentuk kehancuran yang tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai namun memiliki dampak kehancuran yang sangat luas jika terdapat peluncuran senjata nuklir, maka bentuk pertahanan seperti apapun akan menjadi sangat sia-sia. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi logis dari kemampuan destruktif nuklir sehingga senjata nuklir ini mampu memberikan negara yang memiliki senjata nuklir untuk memberikan ancaman yang jauh lebih diperhitungkan dibandingkan ancaman untuk melancarkan serangan militer masif lainnya.⁸

Alasan lainnya adalah sebagai sebuah *prestige*. Senjata nuklir dapat memberikan kekuatan, baik itu ekonomi maupun politik, yang lebih unggul kepada negara pemilikinya, sehingga dapat memberikan sebuah dominasi diantara negara sekitarnya di kawasan. Para pemimpin negara menginginkan senjata nuklir demi tujuan politis, untuk meningkatkan popularitas mereka di dalam negeri demi meraih atau mempertahankan kekuasaan atau sebagai pengalihan kepada masyarakat terhadap masalah sosial ekonomi yang sedang melanda.

⁷ Frank Barnaby, *How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapon of Mass Destruction*, London: Granta Books, 2003, hal. 4-5

⁸ Robert Powell, *Nuclear Deterrence Theory: the Search for Credibility*, New York: Cambridge University Press, 1990, hal. 20

Ada juga yang disebut sebagai “domino effect” yang terdapat di wilayah tertentu. Jika ada satu negara yang mengembangkan senjata nuklir, negara tetangganya juga merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal serupa. Sebagai contoh Pakistan yang merasa berada di bawah tekanan yang teramat sangat untuk juga mengembangkan senjata nuklir ketika India melakukan pengembangan senjata nuklirnya lebih dahulu.⁹ Jika sebuah negara memiliki senjata nuklir, maka negara lainnya juga menginginkan hal serupa. Selama mereka memiliki senjata, terdapat kemungkinan suatu hari akan mereka gunakan senjata tersebut, secara terencana atau tidak. Dan dengan cara apapun, hal tersebut tentunya akan membawa sebuah bencana.

Ancaman arsenal nuklir terasa kian meningkat dengan perkiraan lebih dari 27.000 senjata nuklir di seluruh dunia dan bertambahnya negara yang diketahui memiliki senjata nuklir dari aslinya berjumlah 5 negara pada tahun 1968 (Proliferasi Gelombang Pertama) meningkat dengan memunculkan India, Pakistan dan Israel sebagai pengikutnya (Proliferasi Gelombang Kedua) dimana Pakistan mendapat tentangan atas langkahnya tersebut karena situasi politik dalam negerinya yang tidak stabil. Dan proliferasi gelombang ketiga meliputi Irak, Libya, Korea Utara dan kemungkinan Iran, yang dianggap sebagai sebuah bahaya mematikan dan mendapat reaksi keras dari berbagai pihak.¹⁰

Kepemilikan nuklir sebagai senjata oleh negara-negara tersebut menjadi permasalahan sendiri bagi keamanan dunia ketika senjata nuklir yang dimiliki memang ditujukan sebagai strategi untuk mengimbangi lawan-lawan yang dinilai memiliki kemampuan militer yang lebih baik. Strategi nuklir tidak hanya berimbang pada perimbangan kekuatan, juga dapat diimplementasikan sebagai kemampuan penangkalan yang memutus logika klasik mengenai perang. Jika di dalam logika klasik mengenai perang, konteks penangkalan hanya ditujukan sebagai strategi untuk

⁹ Frank Barnaby, *Op. Cit.*, hal. 5

¹⁰ The Weapons of Mass Destruction Commission, *Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms*, Stockholm: EO Grafiska, 2006, hal. 60

meyakinkan pihak lawan bahwa bentuk invasi militer hanya akan menghabiskan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang didapat dan ditujukan untuk keamanan nasional saja, maka senjata nuklir, yang menjelaskan pola revolusi nuklir, telah menjadi strategi penangkalan yang tidak hanya memberikan bentuk ketakutan terhadap pihak lawan untuk melakukan *first strike* atau serangan pertama, juga revolusi ini telah memberikan atmosfer berbeda di dalam penggunaan kekuatan militer. Secara komprehensif, revolusi nuklir ini memutus pemahaman bahwa usaha untuk mencapai kepentingan tidaklah harus dengan penggunaan atau ancaman militer sebagai sebuah usaha, namun dapat di titik beratkan pada bentuk *defense* (nuklir) dibandingkan melakukan penyerangan terlebih dahulu.¹¹

Kemampuan *defense* (nuklir) ini memberikan perubahan atmosfer yang kini diadaptasi oleh beberapa negara sebagai bagian strategi keamanan. Salah satunya adalah pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sejak tahun 2003 yaitu ketika ia memutuskan untuk keluar dari NPT sampai dengan tahun 2010. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Timur telah serta merta memberikan sanksi dalam waktu yang cukup lama yang akibatnya telah menimbulkan permasalahan utama di bidang ekonomi yang cukup serius yang hingga saat ini masih diderita oleh Korea Utara. Tentu saja, bentuk kemarahan Pyongyang terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya adalah satu dari sekian alasan utama yang melatarbelakangi uji coba nuklir yang terkesan memberikan satu bentuk perlawanan baru. Pada umumnya, Korea Utara menganggap AS sebagai ancaman utama. AS juga mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris. Dengan alasan itu, Washington memberikan sanksi ekonomi kepada Pyongyang. Dalam keadaan seperti itu, melihat hasil perang di Afghanistan dan Irak, Korea Utara mengkhawatirkan bahwa pihaknya akan bisa juga menjadi sasaran berikut dalam daftar gempuran AS. Oleh karena itu, Korea Utara menaruh perhatian pada pengembangan senjata nuklir dengan harapan bahwa nuklir

¹¹ *Op. Cit.*, Robert Powell, hal. 2-3

itu akan mencegah AS tidak melakukan aksi provokasi militer terhadap Korea Utara.¹²

Korea Utara melakukan penandatanganan perjanjian *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada Desember 1985, dimana salah satu kewajiban menjadi anggota tersebut adalah dengan menandatangani mekanisme pengamanan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Namun baru pada Februari 1992 Korea Utara baru menandatangani. Setahun setelah penandatanganan pengamanan tersebut, Korea Utara kemudian mengumumkan pencabutan pada tahun 1993 dalam protes inspeksi nuklir khusus oleh IAEA dan pemerintah Korea Utara merasa terancam oleh pasokan nuklir AS yang terus dikirim dari pangkalan militer AS di Jepang ke Korea Selatan dan pagelaran militer di perairan Korea.¹³

Krisis dimulai dengan adanya kecurigaan Amerika Serikat saat Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada Oktober 2002. Padahal, berdasarkan perjanjian 1994 Korea Utara seharusnya membekukan program itu. Kompensasinya, Amerika Serikat mengirim 500.000 ton BBM pengganti energi nuklir ke Korea Utara. Perjanjian mengalami pasang surut. Perseteruan pun tak terhindarkan setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program senjata nuklir rahasia yang kaya uranium, Amerika Serikat membalas dengan menghentikan pengiriman BBM ke Korea Utara dan berlaku sejak 15 Desember 2002. Korea Utara kemudian menanggapi dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korea Utara, dan diikuti dengan perginya semua personil inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara. Masih pada bulan yang sama, terjadi insiden pengecatan kapal Sosan milik Korea Utara oleh Angkatan Laut Spanyol yang mengangkut paket rudal Scud ke

¹² Korea Utara A-Z, "Isu nuklir Korea Utara", diunduh pada 10 Agustus 2010 melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm

¹³ IAEA and DPRK, "Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards", diunduh pada 9 Agustus 2010 melalui http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeadprk/fact_sheet_may2003.shtml

Yaman. Peristiwa ini semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dengan negara-negara Barat dan tetangganya di Asia Timur.

Selain itu, Korea Utara terbukti tidak ragu-ragu menjual teknologi mereka untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Keluarnya Korea Utara dari rezim non-proliferasi mendapat kecaman dari dunia internasional, tidak terkecuali Korea Selatan, yang menilai bahwa tindakan Korea Utara telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara yang sempat mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun 2000 lalu. Namun Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi nuklir Korea Utara. Pada pertemuan dengan Asisten Menteri Sekretaris Negara AS, James Kelly di Pyongyang pada bulan Oktober 2002, Korea Utara mengakui bahwa mereka secara aktif, melakukan program pengembangan senjata nuklir. Korea Utara mengatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk memiliki senjata nuklir.¹⁴

Korea Utara sendiri mengklaim bahwa reaktor nuklir di Yongbyon hanya untuk tenaga listrik. Namun beberapa ahli menilai reaktor itu bisa untuk memproduksi senjata plutonium. Uji coba rudal antikapal yang kemudian dilakukan oleh Korea Utara dan jatuh di Laut Jepang dan Pantai Timur pada bulan Februari dan Maret 2003 menjadi bukti keseriusan pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara.¹⁵

Masyarakat dunia kemudian kembali dikejutkan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006. Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung

¹⁴ Frank Barnaby, *Op.Cit.*, hal. 93

¹⁵ Rebecca K.C. Hersman, “*Eliminating Adversary Weapons of Mass Destruction: What’s at Stake?*”, *Center for The Study of Weapons of Mass Destruction*, (National Defense University Press, Washington D.C, December 2004), hal. x

Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu. Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB. Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (*Six Party Talks*), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti *Six Party Talks* bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil.¹⁶

Kemudian pada 09 Oktober 2006, Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Aksi yang dilakukan oleh Korea Utara ini telah menghantarkan negara ini menjadi negara ke delapan yang telah melakukan uji coba nuklirnya secara terbuka. Uji coba ini dipandang mengancam stabilitas regional, melanggar kehendak DK-PBB dan memukul usaha-usaha non-proliferasi. Pada saat itu, Korea Utara telah mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional dan PBB, untuk segera menghentikan program nuklirnya dan secara damai kembali dalam NPT. Jika tidak, maka akan diadakan pada DK-PBB untuk ditindaklanjuti.¹⁷

Pada tahun 2008, Korea Utara akhirnya mau menuruti apa yang diharapkan masyarakat internasional, tapi dengan syarat-syarat tertentu terkait dengan latar belakang mengapa Korea Utara melakukan pengembangan nuklir. Belum berjalan satu tahun, pada Mei 2009, Korea Utara meluncurkan rudal di atas Jepang yang diklaim sebagai rudal pengecek cuaca. Hal ini menjadi api kemarahan dunia internasional terhadap Korea Utara, karena dengan nyata telah menunjukkan adanya

¹⁶ National Defense University, “*Combating WMD: Challenges for The Next 10 Years*”, February 2005, hal. 28

¹⁷ Failure of Antimissile Talks Would Spark, “Arms Race, Medvedev Warns”, *Global Security Newswire*, November 2010, diunduh pada tanggal 23 Maret 2011 melalui http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20101130_9145.php

ancaman yang keras terhadap perdamaian dan ketentraman negara lain. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Dewan Keamanan PBB agar Korea Utara dijatuhkan sanksi berdasarkan Bab Tujuh dari Piagam PBB yang mengatur mengenai “ancaman terhadap ketentraman” dan “tindakan untuk melakukan agresi”.

Berdasarkan desakan internasional dan Piagam PBB tersebut maka makin gencarlah embargo yang terjadi pada Korea Utara dan negara tersebut semakin diisolasikan negara-negara lain. Perwakilan Energi Atom Internasional melaporkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah mengancam rezim anti pengembangbiakan bahan nuklir dan juga telah menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya pada kawasan Asia Timur tetapi juga untuk seluruh masyarakat internasional.¹⁸

I.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, yang menjadi menarik untuk diteliti adalah **mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010?**

I.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Menjelaskan bentuk perubahan strategi Korea Utara yang mengadopsi strategi penangkalan nuklir dengan melakukan pengembangan nuklir melalui pengayaan material nuklir.

1.3.2. Menjelaskan bentuk strategi penangkalan nuklir Korea Utara yang bersifat ofensif dan defensif sebagai upaya perimbangan kekuatan militer terhadap lawan-lawan negara tersebut, yaitu Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

¹⁸ A.R Sutopo, “Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat”, dalam Analisa CSIS, No. 2, 1986, hal. 73

I.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami dan menganalisa serta menjawab pertanyaan penelitian mengenai pertimbangan alasan dari Korea Utara mengembangkan program senjata nuklirnya. Dan diharapkan juga melalui penelitian ini akan dapat ditemukan pemahaman komprehensif mengenai konteks isu dan senjata nuklir serta penggambaran interaksi antar negara, terutama di Semenanjung Korea, terkait dengan krisis nuklir.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini, pertama, akan menekankan pada pemikiran Stephen J Rosow.¹⁹ Pemikiran ini menekankan pada bentuk kerangka pemikiran mengenai *nuclear deterrence* atau penangkalan nuklir yang tidak hanya semata-mata ditujukan sebagai doktrin strategi atau hanya bermain pada ranah militer saja.²⁰ Sebaliknya, konteks militer menjadi penopang bagi negara yang mengaplikasikan strategi nuklir sebagai bentuk hubungan sosial yang sistemik atau *system of social relations*. Pemikiran ini menjelaskan bahwa produksi nuklir yang dilakukan negara merupakan bentuk legitimasi atas strategi nuklir yang berangkat dari negara sebagai otoritas tertinggi dengan mendapatkan legitimasi masyarakat atau konsensus untuk kepemilikan dan produksi nuklir yang berimplikasi pada tiga bidang, yaitu ekonomi, budaya, dan politik.²¹

Tiga bidang tersebut menjadi jembatan bagi negara untuk mengkreasikan industri dalam negerinya untuk kebutuhan ekonomi dan sistem persenjataan. Kreasi industri dalam negeri merupakan hasil dari budaya yang dianut masyarakat atau budaya yang bersifat modern dengan tidak hanya melihat nuklir sebagai senjata namun lebih kepada bentuk pengembangan industri yang disepakati masyarakat

¹⁹ Stephen J. Rosow, *Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy*, Polity, Vol. 21, No. 3, (Spring, 1989)

²⁰ *Ibid*, hal. 563

²¹ *Ibid*, hal. 567-572

sehingga tercipta sebuah masyarakat yang berorientasi pada pengembangan industri. Peranan masyarakat berimplikasi pada berjalan atau tidaknya industri yang ada di sebuah negara. Selain itu, dampak dari masyarakat sebagai penopang dalam berjalannya industri juga didukung oleh ilmu pengetahuan yang berkembang. Sumber daya masyarakat di dalam negara yang mengembangkan industri nuklir terletak pada kesiapan sumber daya manusianya sehingga konteks strategi nuklir sebelum menjadi kekuatan militer merupakan hasil dari hubungan sosial yang sistemik yang bersifat domestik. Senjata nuklir sebagai hasil dari industri nuklir yang didukung oleh budaya masyarakat yang siap dalam pengembangan senjata nuklir dan sumber daya manusianya melahirkan teknologi nuklir yang ditujukan sebagai komoditas politik sebuah negara.

Nuklir sebagai komoditas politik diawali dari struktur ekonomi sebuah negara yang menjelaskan antara kekuatan ekonomi dan tujuan politik sebuah negara. Kekuatan ekonomi sebuah negara terletak pada komitmen ekonomi dalam mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam masyarakat atau pemahaman masyarakat mengenai teknologi nuklir. Pemahaman masyarakat tersebut mendukung berjalannya industri yang digunakan untuk menghasilkan berbagai persenjataan nuklir. Produksi senjata nuklir yang dikembangkan melalui industri dalam negeri tersebut kemudian menjadi legitimasi bagi negara untuk menjadikan senjata nuklir tersebut sebagai komoditas politik. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan, industri domestik, dan komitmen ekonomi dalam negeri menjadikan lahirnya sebuah produksi senjata nuklir yang menjadi legitimasi negara untuk tidak melakukan komersialisasi produk tersebut namun hanya diproduksi untuk satu konsumen saja, yaitu negara. Pemikiran ini digunakan pada analisa kekuatan Amerika Serikat dalam menghasilkan berbagai senjata nuklir dengan menyoroiti sistematika hubungan sosial dalam negeri dan keterkaitan Amerika dalam memenangkan perang dingin sekaligus memantapkan peranan hegemoni Amerika pada bidang ekonomi dan militer.²²

²² *Ibid*, hal. 572-581

Proses hegemoni Amerika Serikat dimulai pada budaya modern masyarakat Amerika dan didukung oleh komitmen ekonomi untuk menciptakan industri dalam negeri untuk menghasilkan senjata nuklir. Langkah tersebut dilakukan Amerika Serikat untuk mengimbangi kekuatan Uni Soviet. Perbedaannya terletak pada kemampuan militer Amerika Serikat yang menyertakan kemampuan militernya untuk menciptakan aliansi dan ekspansi ekonomi ke berbagai belahan dunia dalam kerangka kapitalisme. Melalui internasionalisasi kapitalisme, Amerika berhasil menciptakan industri kapitalisnya dan menghasilkan berbagai keuntungan ekonomi. Kondisi ini memperkuat posisi Amerika dalam bidang ekonomi dan militer, sedangkan Uni Soviet hanya bersandar pada pembangunan kekuatan militer dengan tidak didukung kekuatan ekonomi sehingga konteks perang dingin yang menggambarkan perlombaan senjata berakhir pada runtuhnya Uni Soviet akibat permasalahan ekonominya.²³

Pemikiran mengenai tulisan tersebut menjelaskan peran serta masyarakat dalam menciptakan sebuah kekuatan militer nuklir sebuah negara yang cenderung pasif dalam melihat sistem internasional. Hal ini terlihat pada fokus analisa yang lebih menekankan pada konteks domestik. Pemikiran ini menjelaskan bahwa kondisi domestik, yaitu masyarakat dan interaksinya di dalam pemerintahan yang terkait dalam tiga bidang, sangat berpengaruh kepada otoritas negara untuk menghasilkan berbagai persenjataan nuklir. Bentuk pemikiran seperti ini menjelaskan kelemahan pemikiran tersebut dapat menjembatani peran negara dalam konteks sistem internasional. Terlebih lagi konteks negara sebagai penggambaran strategi nuklir tidak terimplementasi secara umum pada setiap kondisi negara.

Di sisi lain, pemisahan definisi mengenai negara berkembang dengan negara maju yang dipengaruhi oleh sumber daya alam dan manusianya akan sangat menentukan kesiapan sebuah negara dalam menciptakan kekuatan penangkal nuklir yang berimbang pada konteks sosial di dalam sebuah negara. Namun, perbedaan kapabilitas setiap negara, baik negara berkembang maupun negara besar justru tidak

²³ *Ibid*, hal. 584

dibedakan secara baik sehingga pola pemikiran yang ada lebih bersifat umum tanpa melihat konteks kesiapan negara. Karena itu, pemikiran yang menekankan pada sistematika hubungan sosial dalam sebuah negara tidak menjelaskan secara spesifik konteks masyarakat seperti apa yang mampu menjadikan strategi penangkalan nuklir sebagai sebuah budaya yang dapat berkembang di masyarakat.

Sumber tinjauan pustaka kedua menggunakan pemikiran tulisan Horst Afheldt dan Philipp Sonntag.²⁴ Pemikiran ini bersifat kuantifikasi pada jenis persenjataan nuklir yang menggambarkan kondisi negara-negara bertikai dengan melihat pola *equilibrium* atau keseimbangan kekuatan antar pihak sebagai bentuk penangkalan.²⁵

Proses kuantifikasi terletak pada model matematika untuk mendapatkan kuantitas persenjataan yang dijelaskan pada dua indikator, yaitu jumlah senjata nuklir dan jangkauan senjata nuklir.²⁶ Dua indikator ini menjelaskan kemampuan *assured destruction* atau penghancuran sebuah negara dalam kepemilikan senjata nuklirnya. Jika hal ini tercapai maka akan ada bentuk superioritas negara tersebut di dalam interaksi antar negara. Namun kondisi tersebut akan mengalami perubahan jika terdapat bentuk perimbangan yang nantinya akan menghasilkan konteks hubungan *assured destruction VS assured destruction*. Jika kondisi ini terjadi maka konteks konfliktual yang ada akan mengarah pada bentuk *peace* atau perdamaian mengingat terdapat pola *equilibrium* antar pihak bertikai. Pemikiran ini menggambarkan kondisi Amerika Serikat paska kepemilikan senjata nuklirnya serta superioritasnya di dalam interaksi antar negara sebelum adanya proses perimbangan yang dilakukan Uni Soviet. Paska proses perimbangan tersebut, kondisi antar Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai titik perdamaian dimana tidak ada lagi ketimpangan kekuatan dan mulai menurunnya superioritas Amerika Serikat di era perang dingin.²⁷

²⁴ Horst Afheldt dan Philipp Sonntag, *Stability and Deterrence through Strategic Nuclear Arms*, Journal of Peace Research, Vol. 10, No. 3, Special Issue: Peace Research in the Federal Republic of Germany, 1973

²⁵ *Ibid*, hal. 245

²⁶ *Ibid*.

²⁷ *Ibid*, hal. 246

Konteks kuantifikasi terkesan kaku dalam melihat perbedaan kualitas strategi militer. Bentuk perimbangan yang dicapai di antara dua pihak bertikai tidak semata-mata hanya ditentukan dua indikator yang menjadi nyawa kuantifikasi senjata nuklir dan kemampuan jangkauan yang ada. Unsur strategis seperti interaksi, yang menjelaskan pola aliansi dan kerjasama, serta pola permusuhan dan pertemanan menjelaskan bahwa konteks kuantifikasi tidak hanya bersifat konkrit saja. Karena itu, dua indikator utama proses kuantifikasi perimbangan tersebut hanya akan menjadi kuat jika bentuk perimbangan lebih ditekankan pada hasil produksi senjata setiap negara saja.

Sumber tinjauan pustaka ketiga menganalisa pemikiran C. Raja Mohan.²⁸ Pemikiran ini menjelaskan pola *nuclear deterrence* atau penangkalan nuklir yang diawali melalui proses perlombaan senjata atau *arms race* untuk mencapai pola penangkalan. Bentuk penangkalan terletak pada tiga indikator, yaitu kapabilitas, kredibilitas, dan komunikasi. Tiga indikator ini menjelaskan bahwa bentuk penangkalan yang dilakukan negara merupakan langkah untuk mencapai titik superioritas untuk melakukan serangan yang bersifat masif atau *massive retaliation*. Bentuk kapabilitas seperti ini diimplementasikan ke dalam strategi bom atau *bombing strategic*. Strategi ini yang digunakan oleh Amerika untuk memenangkan perang dunia ke II. Paska bom yang dijatuhkan ke Horishima dan Nagasaki tersebut memberikan bentuk kredibilitas persenjataan nuklir yang membuat Amerika menjadi kekuatan yang ditakuti. Kondisi ini kemudian menjadi berubah ketika terdapat pihak lain yang juga menggunakan penangkalan nuklir untuk menangkal ancaman yang ada. Konteks penangkalan yang membentuk proses perimbangan kekuatan tersebut menciptakan atmosfer penangkalan yang mengarah pada stabilisasi konflik melalui atau kontrol persenjataan. Dengan kata lain, konteks penangkalan dengan menggunakan strategi nuklir berimplikasi pada bentuk komunikasi antar pihak yang bertikai melalui penciptaan stabilitas melalui kerjasama melalui perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan kondisi yang lebih damai.

²⁸ C. Raja Mohan, *The Tragedy of Nuclear Deterrence*, Social Scientist, Vol. 14, No. 4 (Apr., 1986)

Konteks persaingan senjata yang menjadi kata kunci dalam menjelaskan proses perimbangan kekuatan nuklir antar dua pihak bertikai. Kondisi ini sebetulnya tidak menjelaskan esensi kekuatan nuklir yang justru bersifat penangkalan. Bentuk penangkalan yang ditujukan untuk mencapai keamanan nasional justru tidak menjadi fokus analisa, namun lebih kepada kebijakan keamanan yang cenderung melihat konteks persaingan sebagai indikator utama. Konteks persaingan senjata yang menjadi titik poin dalam pembahasan justru tidak menjelaskan pada bagaimana proses perimbangan yang ada tidak terfokus pada bentuk penangkalan senjata nuklir sebagai strategi militer yang bertujuan untuk menangkal kekuatan dari luar batas teritorial.

Tinjauan pustaka keempat berbicara mengenai peranan senjata nuklir Korea Utara yang berimplikasi pada kondisi domestik dan internasional. Tulisan ini mengacu pada tulisannya Samuel S. Kim.²⁹ Dalam tulisannya, ia menjelaskan pola keamanan senjata nuklir yang menjelaskan konteks politik pada dua level yang berbeda, yaitu level dalam negeri dan level internasional. Ide utama yang dijelaskan dalam tulisan ini menekankan pada kondisi konflik antar negara yang berada pada level krisis, tidak terlepas dari kondisi domestik dari masing-masing negara. Dengan mengambil contoh konflik antar Korea Utara dan Amerika Serikat. Samuel menjelaskan bahwa konflik keduanya tidak terlepas dari perencanaan berbagai kebijakan domestik yang berujung pada kesepakatan untuk mengantisipasi setiap pergerakan lawan.

Tulisan ini menjelaskan peranan domestik yang berpengaruh pada kebijakan keamanan negara dalam level internasional, namun kurang menyentuh sistem pemerintahan dengan tidak memberikan gambaran spesifik pada bagaimana sebuah sistem pemerintahan berperan dalam memformulasikan kebijakan. Terlebih lagi kasus yang diangkat melibatkan konflik dua negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda.

²⁹ Samuel S. Kim, *North Korea's Nuclear Strategy and Interface between International and Domestic Politics*, Asian Perspective, Vol. 34, No. 1, 2010

Tinjauan pustaka yang kelima mengacu pada tulisannya James M. Minnich.³⁰ Di dalam tulisannya, James menjelaskan peranan taktik Korea Utara yang berdasarkan pada ideologi militer. Nilai yang terkandung di dalam ideologi militer sebuah negara menjelaskan peranan doktrin militer yang berimbang pada doktrin taktis di medan perang yang membedakan antara taktik ofensif dan taktik defensif. Indikasi kedua taktik dengan karakter yang berbeda ini menekankan pada bentuk operasi militer yang dibedakan atas zona tempur di dalam melakukan berbagai manuver militer, baik sebagai bagian dari taktik ofensif maupun defensif.

Konteks penekanan doktrin militer yang taktis tersebut digunakan untuk menganalisa taktik Korea Utara tidak sama sekali menyentuh peranan kekuatan militer negara tersebut yang mengindikasikan adanya perubahan strategi keamanan yang bersandar pada kekuatan nuklir. Pemisahan taktik ofensif dan defensif cenderung menggambarkan strategi perang klasik yang tidak menggambarkan esensi senjata nuklir sebagai strategi keamanan Korea Utara.

Berikut tabel yang menjelaskan poin utama sumber tinjauan pustaka:

Tabel 1: Review Tinjauan Pustaka

No	Sumber Tinjauan Pustaka	Pokok Pembahasan
1.	Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi penangkalan nuklir sebagai hubungan sosial yang sistemik • Hubungan sosial terletak pada 3 bidang, yaitu ekonomi, budaya, dan politik • Nuklir sebagai komoditas politik diawali dari struktur ekonomi sebuah negara yang menjelaskan antara kekuatan ekonomi dan tujuan politik sebuah

³⁰ James M. Minnich, *North Korean Tactics*, Major, U.S. Army, Northeast Asia Foreign Area Officer, CGSC 2001-2002, Section 12C, The Republic of Korea Army College, Seoul, Republic of Korea

		negara.
2.	Stability and Deterrence through Strategic Nuclear Arms	<ul style="list-style-type: none"> • Kuantifikasi strategi nuklir melalui model matematika • Model matematika terletak pada penghitungan dua indikator, yaitu jumlah senjata nuklir dan jangkauan senjata nuklir • Proses kuantifikasi menentukan pola <i>equilibrium</i>
3.	the Tragedy of Nuclear Deterrence	<ul style="list-style-type: none"> • Esensi strategi penangkalan nuklir memicu <i>arms race</i> • Pola <i>arms race</i> ditujukan untuk menentukan pola perimbangan • Pola perimbangan akan mencapai titik <i>peace</i> ketika dilanjutkan pada konteks <i>arms control</i>
4.	North Korea's Nuclear Strategy and Interface between International and Domestic Politics	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pemerintahan sebuah negara yang mempengaruhi kebijakan keamanan negara pada level internasional
5.	North Korean Tactics	<ul style="list-style-type: none"> • Pemisahan karakteristik kemampuan ofensif dan defensif yang diarahkan doktrin taktis militer

I.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori penangkalan nuklir atau *nuclear deterrence theory*³¹ yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori ini menjelaskan bahwa adanya perbedaan logika mendasar mengenai implementasi strategi penangkalan dengan *nuclear deterrence theory*. Dalam konteks logika perang klasik, kekuatan penangkalan mengindikasikan bahwa penggunaan kekuatan militer yang dijadikan sebagai strategi penangkalan hanya fokus pada penggunaan kekuatan militer yang ditujukan sebagai usaha untuk menjaga keamanan nasional.³² Langkah strategi yang diadaptasi menekankan pada bentuk kredibilitas yang ditekankan melalui unjuk kekuatan untuk meyakinkan pihak lawan bahwa biaya perang atau invasi yang dilakukan pihak lawan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat. Kondisi ini menyebabkan lawan untuk mengurungkan niatnya sehingga terdapat bentuk penangkalan yang bersifat sangat defensif.³³ Di sisi lain, kekuatan militer sebuah negara yang mengimplementasikan strategi penangkalan terkadang bertumpu pada kemampuan *punitive* (penyerangan) dan *defensive* (bertahan) yang sering tercampur aduk. Selain itu, strategi penangkalan pada umumnya bertitik tolak pada kemampuan untuk mencegah adanya invasi kekuatan militer negara lain sehingga tujuan utama penangkalan hanya ditujukan untuk kemenangan militer saja, yang dicapai melalui *contest of relative military strength* atau unjuk kekuatan militer.³⁴

Konteks berbeda yang menjadi tujuan utama sekaligus perbedaan nyata antara strategi penangkalan dengan strategi penangkalan nuklir terletak pada karakter kekuatan nuklir yang menjelaskan bentuk kredibilitas strategi penangkalan nuklir yang terletak pada kemampuan penangkalan strategi nuklir yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman pihak lain yang berusaha

³¹ Robert Powell, *Nuclear Deterrence Theory: the Search for Credibility*, New York: Cambridge University Press, 1990

³² *Ibid*, hal. 6-12

³³ *Ibid*, hal. 20

³⁴ *Ibid*, hal. 174

melakukan penekanan maupun invasi militer sampai pada bentuk strategi penangkalan memberikan tekanan pada pihak lawan. Bentuk tekanan terhadap pihak lawan ini akan membuat lawan akan berada pada kondisi *fear and suffering* mengingat dampak destruktif yang diakibatkan senjata nuklir. Konteks ini menjelaskan bahwa langkah negara lawan untuk melakukan *first strike* bukanlah pilihan bijak mengingat efek serangan balasan yang bertumpu pada kemampuan nuklir akan berakibat fatal (*massive retaliation*),³⁵ mengingat kekuatan senjata nuklir akan sulit untuk dibendung sehingga kemampuan bertahan seperti apapun akan menjadi sangat mustahil untuk dilakukan.³⁶ Kondisi ini pada akhirnya menentukan pada bagaimana strategi penangkalan nuklir ini juga ditujukan sebagai bentuk jaminan keamanan nasional dari berbagai bentuk tekanan dan gangguan politik dan militer pihak lawan.

Jaminan keamanan nasional yang bersandar pada kemampuan serangan nuklir yang berimbas pada bentuk serangan balasan yang dapat menyebabkan kerusakan massal atau *massive retaliation* ini dapat dicapai melalui pengembangan senjata nuklir untuk kepentingan militer. Kepentingan militer ini dibangun sebagai strategi yang diarahkan oleh pengadopsian doktrin militer yang memiliki kredibilitas penangkalan atau doktrin militer yang mengarahkan kekuatan militer untuk mampu melakukan serangan balasan yang bersifat destruktif atau *doctrin of massive retaliation*.³⁷ Doktrin ini menjelaskan bahwa implementasi strategi penangkalan nuklir bertujuan untuk memberikan bentuk penangkalan yang efektif dalam memberikan dampak kredibilitas ancaman terhadap pihak lawan. Karakter utama strategi penangkalan nuklir menjelaskan adanya kredibilitas ancaman nuklir yang tetap memberikan ruang bagi negara tersebut untuk memberikan pilihan-pilihan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan bagi negara-negara yang bertikai (*threats*

³⁵ *Ibid*, hal. 12-20

³⁶ *Ibid*, hal. 2-3

³⁷ *Ibid*.

that leave something to chance).³⁸ Negara yang mengadopsi strategi ini memiliki dua pilihan di dalam mencapai kepentingannya:

Pertama, bentuk pertahanan defensif militer yang bertujuan untuk menangkal agar pihak lawan tidak lagi berniat untuk melakukan invasi. Bentuk penangkalan ini dapat memicu ketakutan dan kerugian besar sebagai konsekuensi karakter serangan senjata nuklir yang dapat diimplementasikan ke dalam kapabilitas serangan balasan yang menjadi sifat dari sanksi tidak terbatas atas serangan nuklir.

Kedua, bentuk penangkalan yang menitikberatkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan koersif (*coercive pressure*) untuk memberikan serangan balasan yang terbatas (*limited retaliation*), sekaligus menjelaskan bentuk kredibilitas atas kemampuan negara tersebut untuk menciptakan tindakan-tindakan ancaman di masa mendatang yang jauh lebih meyakinkan.³⁹

Bentuk pertahanan defensif dalam strategi penangkalan nuklir ini merupakan pilihan pertama yang dapat dipahami sebagai strategi penangkalan militer untuk melakukan serangan balasan atas tindakan militer negara lain atau invasi negara lawan sehingga pihak lawan akan mempertimbangkan adanya serangan *second strike* yang berakibat pada perang nuklir atau *general nuclear attack*,⁴⁰ sedangkan pilihan kedua merupakan pilihan strategi yang bertujuan untuk mempertebal kredibilitas strategi penangkalan melalui implementasi *limited retaliation* atau serangan balasan terbatas untuk menunjukkan bahwa serangan berikutnya atau serangan yang akan dilakukan di masa mendatang akan jauh lebih berbahaya (*more credible future attack*).⁴¹

Dua pilihan tersebut menjelaskan bahwa adanya bentuk kelonggaran dan kerenggangan antara kebijakan pertahanan dan keamanan dengan strategi nuklir di

³⁸ *Ibid*, hal. 16-18

³⁹ *Ibid*, hal. 3-25

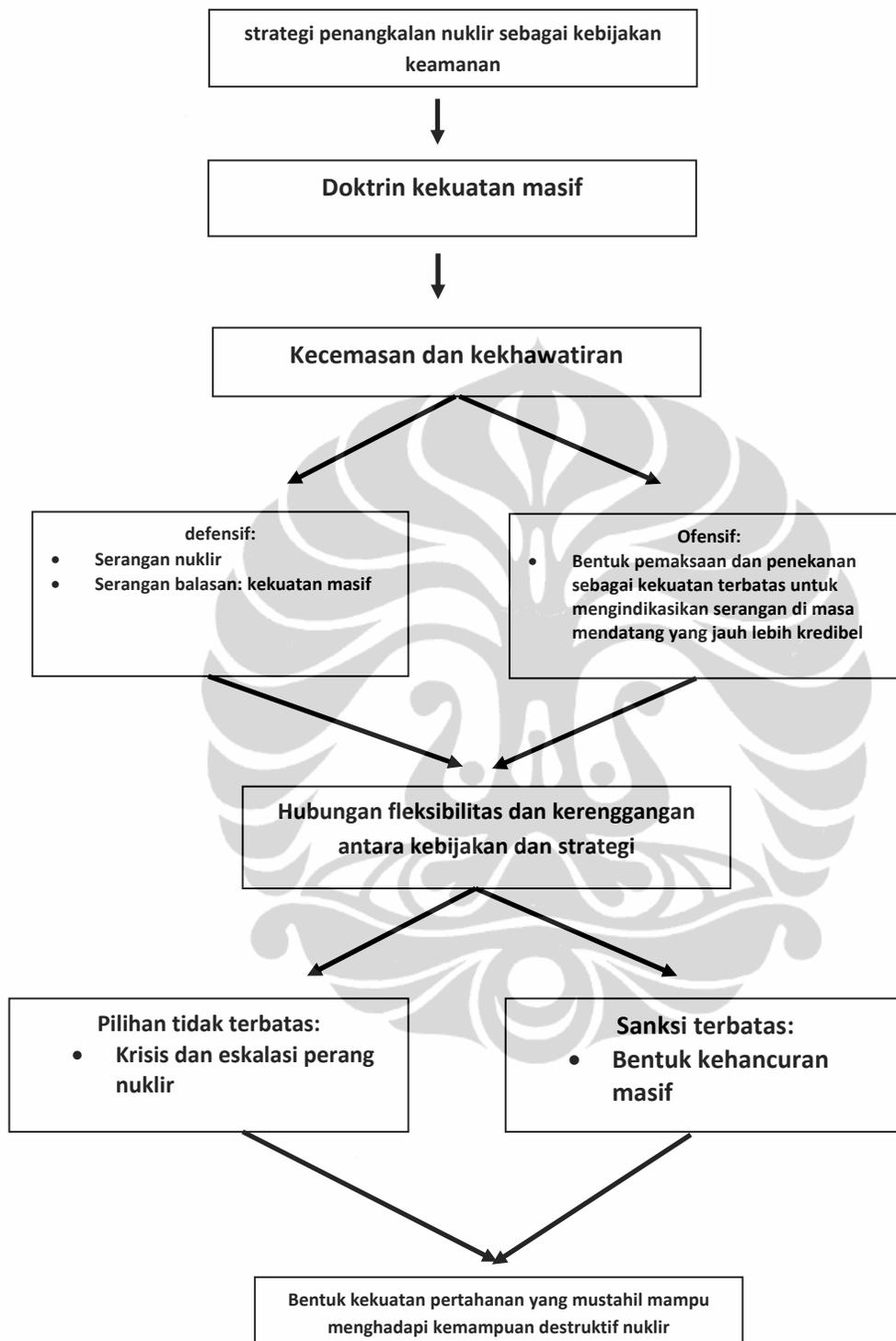
⁴⁰ *Ibid*, hal. 3-22

⁴¹ *Ibid*, hal. 3

dalam menghadapi potensi konflik atau bahkan konflik yang ada. Kelonggaran dan kerenggan antara kebijakan dan strategi keamanan tersebut tidak hanya mengacu pada pengamanan keamanan nasional saja, juga menjelaskan dampak kekuatan senjata nuklir yang memberikan keleluasaan variasi kebijakan dan strategi militer.

Variasi kebijakan dan strategi militer tidak hanya memosisikan negara yang menganut doktrin penangkalan nuklir untuk, **Pertama**, memberikan pilihan kebijakan kepada pihak lawan atau *unlimited option* melalui langkah penangkalan dan memberikan keleluasaan bagi negara tersebut untuk memiliki posisi tawar, dan bahkan menciptakan peluang untuk berperan menciptakan “aturan” di dalam interaksi friksi antar negara. Bentuk keterlibatan negara yang menganut doktrin penangkalan nuklir terletak pada adanya kemampuan untuk menciptakan krisis di dalam interaksi dan mengindikasikan implementasi perang nuklir sebagai bentuk ancaman. Hal tersebut dapat memberikan peluang tawar ketika terjadi krisis yang mengindikasikan adanya potensi eskalasi dan resiko perang nuklir. **Kedua**, pilihan kebijakan yang bersifat *limited option*, yaitu bentuk strategi dan kebijakan yang memaksakan keadaan untuk mengarah pada terjadinya kehancuran. Dua kondisi di atas tidak hanya menjelaskan efektifitas strategi penangkalan nuklir yang diadopsi melalui doktrin penangkalan kebijakan, juga memberikan kredibilitas untuk mengimbangi kekuatan militer lawan yang relatif lebih unggul, sehingga negara pihak lawan akan tetap menyadari resiko yang akan dihadapi bersama.⁴² Dengan kata lain, bentuk strategi penangkalan nuklir ini tetap bertumpu pada kemampuan destruktif kekuatan senjata nuklir yang menjelaskan bahwa ancaman senjata nuklir tidak dapat dihadapi dengan kekuatan bertahan seperti apapun (*defense is impossible*). Berikut alur logika strategi penangkalan nuklir yang menjelaskan kredibilitas *doctrin of massive retaliation*:

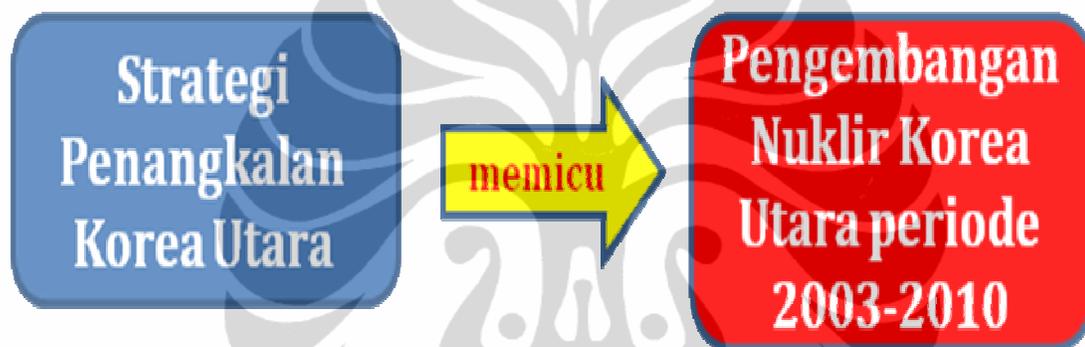
⁴² *Ibid*, hal. 14-19



1.7. Hipotesa

Hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini adalah pengembangan program senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara merupakan langkah keamanan melalui strategi *nuclear deterrence* guna menangkal dan mengimbangi keunggulan militer negara-negara yang dianggap sebagai musuh, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

1.8. Model Analisis



1.9. Operasionalisasi Konsep

Konsep	Strategi Penangkalan Nuklir			
Variabel	Strategi Nuklir Korea Utara		Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara 2003-2010	
Indikator	Menghadapi ancaman Amerika dan Aliansinya	Jaminan Keamanan Nasional	Pengadopsian Doktrin Nuklir Korea Utara	
Sub Indikator	Kemampuan Defensif	Kemampuan Koersif	Pengembangan senjata nuklir	
Kategori	Kapabilitas serangan balasan (<i>second strike capability</i>)	Kapabilitas serangan masa mendatang (<i>future attack capability</i>)	Kebijakan keamanan Korea Utara	Krisis politik Semenanjung Korea

1.10. Prosedur dan Metode Penelitian

Penelitian ini hendak melihat pola hubungan antar variabel, yaitu dependen dan independen yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian analisa yang bersifat eksplanatif sebagai bentuk refleksi terhadap kenyataan realitas sosial.⁴³ Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menganalisa, mengidentifikasi, dan menjelaskan faktor dan indikator yang terkait dengan pertanyaan penelitian, untuk menjelaskan logika empiris yang diuraikan secara deduktif-induktif.⁴⁴

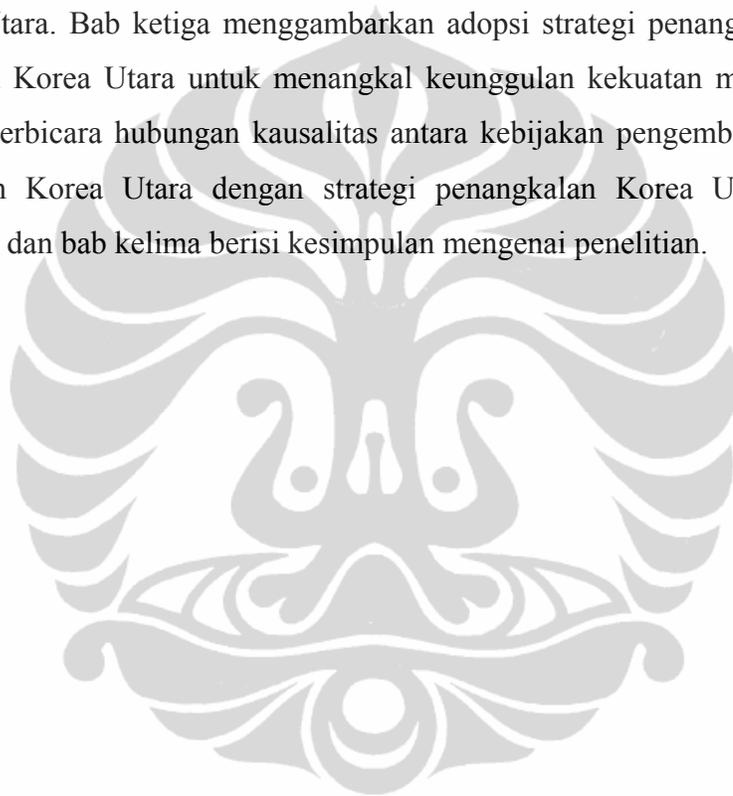
Penelitian yang berangkat pada pengembangan senjata nuklir Korea Utara ini sebagai bentuk perimbangan ditekankan pada periode waktu 2003 sampai 2010. Periode waktu 2003 merupakan periode dimana keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT yang menekankan pada pelarangan produksi senjata nuklir bagi negara-negara non-nuklir atau periode yang menjelaskan *starting point* bagi Korea Utara sebagai ancaman nyata bagi Amerika dan sekutunya. Sedangkan penelitian yang berakhir pada periode 2010 menjelaskan pada dampak dari pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara sebagai titik poin dalam menggambarkan perimbangan militer atau hasil yang dicapai Korea Utara dalam memproduksi senjata nuklirnya. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, media massa yaitu mengakses situs-situs internet. Dengan demikian, data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder.

⁴³W. Lawrence Newman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc., 5th edition, 2003, hal. 67

⁴⁴ *Ibid*, hal. 72

I.11. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan dibahas melalui sistematika penulisan antar bab dengan pembagian sebanyak lima bab. Bab pertama membahas mengenai latar belakang permasalahan yang diformulasikan ke dalam pertanyaan penelitian serta pengajuan hipotesa yang akan dibuktikan, dengan disertai kerangka pemikiran, model analisis dan operasionalisasi konsep. Bab kedua berbicara kebijakan pengembangan nuklir Korea Utara. Bab ketiga menggambarkan adopsi strategi penangkalan nuklir yang dilakukan Korea Utara untuk menangkal keunggulan kekuatan militer lawan. Bab keempat berbicara hubungan kausalitas antara kebijakan pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara dengan strategi penangkalan Korea Utara melalui kekuatan nuklir dan bab kelima berisi kesimpulan mengenai penelitian.



Bab II

Pengembangan Nuklir Korea Utara periode 2003-2010

Bab ini akan membahas mengenai program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara periode 2003-2010. Periode ini menjelaskan keputusan sepihak Korea Utara untuk keluar dari perjanjian larangan penyebaran nuklir dan pengembangan senjata nuklir pada tahun 2003 dan proses pengembangan senjata nuklir yang dilakukan negara tersebut untuk kebutuhan militer sampai dengan periode 2010. Pengembangan senjata nuklir tersebut dilakukan melalui pengadopsian kebijakan keamanan dengan mengadopsi doktrin nuklir yang kemudian diimplementasikan ke dalam proses pengembangan senjata nuklir sehingga menyebabkan bentuk krisis politik di Semenanjung Korea dan berimplikasi terhadap bentuk kredibilitas kekuatan militer Korea Utara sebagai titik poin yang menjelaskan bentuk perimbangan kekuatan militer. Studi kasus Korea Utara ini akan dianalisa dengan menggunakan pemikiran *Nuclear Deterrence Theory* Robert Powell yang akan menuntun dalam menganalisa program pengembangan senjata nuklir Korea Utara sebagai variabel terikat di dalam tesis ini.

2.1. Adopsi *Doctrine of Massive Retaliation* Korea Utara

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara bukanlah hal yang baru. Dalam periode tahun 90-an di bawah kepemimpinan Kim Jong Il, pembangunan kekuatan militer sudah ditujukan untuk meningkatkan kekuatan militer dengan melakukan pengembangan senjata pemusnah massal atau WMD (*weapons of mass destruction*), seperti senjata nuklir dan senjata biologi, yang berada di bawah pengawasan *Nuclear-Chemical Defence Bureau*.⁴⁵ Meski begitu, pengembangan senjata nuklir tidak lagi diteruskan oleh Korea Utara semenjak Korea Utara ikut serta di dalam perjanjian NPT (*Non-Proliferation Treaty*) yang diusung oleh Amerika. NPT ditujukan untuk mengurangi resiko penyebaran senjata nuklir yang dapat membahayakan kestabilan

⁴⁵ Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*, April 2007, hal. 16 diunduh pada tanggal 8 Maret 2011 melalui <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub771.pdf>

dunia. Keikutsertaan Korea Utara dalam perjanjian NPT ditandai dengan penandatanganan perjanjian *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada Desember 1985, dimana salah satu kewajiban menjadi anggota tersebut adalah dengan menandatangani mekanisme pengamanan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Namun baru pada Februari 1992 Korea Utara baru menandatangani.

Setahun setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Korea Utara kemudian mengumumkan pencabutan pada tahun 1993 dalam protes inspeksi nuklir khusus oleh IAEA dan pemerintah Korea Utara merasa terancam oleh pasokan nuklir AS yang terus dikirim dari pangkalan militer AS di Jepang ke Korea Selatan dan pagelaran militer di perairan Korea.⁴⁶ Krisis dimulai dengan adanya kecurigaan Amerika Serikat saat Korea Utara kembali mengembangkan program nuklirnya pada Oktober 2002. Padahal, berdasarkan perjanjian 1994, Korea Utara seharusnya membekukan program itu. Kompensasinya, Amerika Serikat mengirim 500.000 ton BBM pengganti energi nuklir ke Korea Utara. Perjanjian mengalami pasang surut. Perseteruan pun tak terhindarkan setelah Korea Utara mengaktifkan kembali program senjata nuklir rahasia yang kaya uranium, Amerika Serikat membalas dengan menghentikan pengiriman BBM ke Korea Utara dan berlaku sejak 15 Desember 2002.

Menghadapi situasi tersebut, Korea Utara kemudian menanggapi dengan memindahkan semua peralatan pemantauan fasilitas nuklir PBB di Yongbyon, pusat pengembangan nuklir di Korea Utara, dan diikuti dengan perginya semua personil inspeksi nuklir PBB meninggalkan Korea Utara. Masih pada bulan yang sama, terjadi insiden pencegatan kapal Sosan milik Korea Utara oleh Angkatan Laut Spanyol yang mengangkut paket rudal Scud ke Yaman. Peristiwa ini semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan meningkatkan ketegangan antara Korea Utara dengan negara-negara Barat dan tetangganya di Asia Timur. Selain itu, Korea

⁴⁶ IAEA and DPRK, "Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards", diunduh pada 9 Agustus 2010 melalui http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeadprk/fact_sheet_may2003.shtml

Utara dinilai terbukti melakukan berbagai tindakan ilegal, seperti pemalsuan merek rokok dan obat-obatan dan tindakan penyelundupan narkotika.⁴⁷

Pada periode 2003 Korea Utara memutuskan untuk keluar dari NPT. Keluarnya Korea Utara dari rezim non-proliferasi mendapat kecaman dari dunia internasional, tidak terkecuali Korea Selatan, yang menilai bahwa tindakan Korea Utara telah merusak upaya normalisasi hubungan kedua negara yang sempat mengalami kemajuan pesat dengan disepakatinya perjanjian kerjasama bilateral di berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan pertahanan, pada tahun 2000 lalu. Namun Korea Selatan tetap mempertahankan sikap dengan tidak mengeluarkan opsi militer terhadap ambisi senjata nuklir Korea Utara. Pada pertemuan dengan Asisten Menteri Sekretaris Negara AS, James Kelly di Pyongyang pada bulan Oktober 2002, Korea Utara mengakui bahwa mereka secara aktif, melakukan program pengembangan senjata nuklir. Korea Utara mengatakan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan negara lain untuk memiliki senjata nuklir.⁴⁸ Pengakuan Korea Utara tersebut memperjelas motivasi negara tersebut untuk menganut doktrin nuklir sebagai strategi militernya. Doktrin nuklir tersebut menjadi pilihan Korea Utara di dalam menghadapi kekuatan aliansi Amerika, Korea Selatan, dan Jepang yang memiliki pola permusuhan terhadap Korea Utara di wilayah Semenanjung Korea.

Pyongyang's Nuclear Doctrine menjadi poin penting bagi Korea Utara untuk terus mengembangkan senjata nuklirnya. Arah kebijakan doktrin nuklir ini terdiri dari kumpulan asumsi mengenai esensi persenjataan nuklir yang akan dikembangkan.⁴⁹ Meski tidak secara eksplisit tertulis di dalam berbagai dokumen, namun usaha Korea Utara untuk terus mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dalam peningkatan kekuatan militernya, tentu saja telah tertulis dengan baik di dalam pikiran Kim Jong Il.⁵⁰

⁴⁷ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*

⁴⁸ *Ibid*, hal. 101

⁴⁹ *Ibid*, hal. 102

⁵⁰ *Ibid*.

2.2. Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Sebelum dinilai oleh dunia internasional mengenai pengembangan senjata nuklir, Korea Utara berulang kali berusaha menyembunyikan kondisi sebenarnya. Kondisi dimana negara tersebut secara diam-diam telah melakukan pengembangan nuklir untuk kebutuhan militer. Kecurigaan dunia internasional diawali dengan berbagai usaha inspeksi yang dilakukan oleh IAEA (*International Atomic Energy Agency*) atau Badan Atom Internasional. Sebagai sebuah badan internasional yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap program nuklir yang dilakukan negara-negara untuk tujuan damai atau penggunaan nuklir untuk kebutuhan energi, Badan Atom Internasional bertugas secara rutin untuk melakukan inspeksi, salah satunya inspeksi terhadap Korea Utara yang juga melakukan program nuklir untuk kebutuhan energi domestik.

Program energi yang dilakukan oleh Korea Utara untuk kebutuhan energi mulai terlihat mencurigakan ketika pada tahun 2002 Badan Atom Internasional berusaha untuk melakukan inspeksi namun pihak Korea Utara berusaha untuk membatalkan tindakan inspeksi Badan Atom Internasional dan tidak merespon langkah diskusi seperti yang ingin dilakukan badan pengawas nuklir tersebut. Di tahun yang sama, Badan Atom Internasional juga pada akhirnya meminta pihak Korea Utara untuk melakukan klarifikasi atas tindakan negara tersebut dalam melakukan pengayaan uranium melalui resolusi GOV/2002/60. Isi resolusi tersebut meminta kepada Korea Utara untuk segera melakukan klarifikasi dan memberikan informasi atas tindakan pengayaan uranium yang tidak dilaporkan kepada pengawas Badan Atom Internasional. Menyikapi resolusi tersebut, pihak Korea Utara hanya memberikan respon atas resolusi tersebut yang tertuang di dalam resolusi GOV/INF/2002/16. Meskipun begitu, respon pihak Korea Utara sama sekali tidak menyentuh substansi kecurigaan badan pengawas atom mengenai pengayaan uranium tersebut. Bahkan, pihak Korea Utara meminta Badan Atom Internasional untuk

segera memindahkan semua peralatan pengawasan terhadap Korea Utara, seperti segel penutup dan kamera pengawas.⁵¹

Tindakan sepihak Korea Utara dengan melakukan pelarangan terhadap pengawasan yang dilakukan badan atom internasional tersebut mendapatkan protes keras dari berbagai negara. Meski begitu, pihak Korea Utara tetap bersikukuh untuk melarang adanya pengawasan atas program pengayaan uranium yang dilakukan negara tersebut. Berikut uraian tindakan sepihak Korea Utara pada periode 2002:⁵²

1. Tidak merespon ajakan IAEA atau Badan Atom Internasional untuk melakukan diskusi atas tindakan pengayaan uranium Korea Utara.
2. Meminta pihak Badan Atom Internasional untuk melepas segel pada reaktor nuklir dan melepas semua peralatan pengawas Badan Atom Internasional, seperti kamera.
3. Menolak inspeksi pengawasan Badan Atom Internasional dengan tidak memenuhi kesepakatan NPT untuk dilakukannya inspeksi badan pengawas atom internasional.

Di tahun berikutnya, pihak Korea Utara tetap tidak memberikan respon positif atas usulan Badan Atom Internasional yang ingin melakukan inspeksi atas program pengayaan uranium. Pada tahun 2003, kebijakan Korea Utara masih mempertahankan sikap pasifnya atas transparansi pengayaan uraniumnya. Berikut berbagai kebijakan Korea Utara dalam merespon permintaan inspeksi Badan Atom Internasional:

1. Tidak ada upaya inisiatif diplomasi mengenai laporan program pengayaan uranium Korea Utara.
2. Korea Utara kembali memulai membuka kembali aktifitas reaktor nuklir berkekuatan 5 megawat.

⁵¹ IAEA General Conference, *Implementation of Safeguard Agreement Between the Agency and the Democratic People's Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, GC(47)/19, 13 August 2003, hal. 2

⁵² *Ibid*, hal. 3

Paska keluarnya dari NPT tahun 2003 dan mengumumkan bahwa negara tersebut memang melakukan program pengembangan senjata nuklir, negara tersebut terus melakukan pengembangan senjata nuklir untuk kepentingan militer.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa Korea Utara menganut doktrin militer dan berusaha untuk mengembangkan senjata nuklirnya, diantaranya adalah karena Korea Utara ingin merasa aman, dan untuk itu, negara tersebut perlu memastikan bahwa tidak ada satupun negara yang berani untuk melakukan serangan militer. Hal ini disebabkan oleh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang begitu tinggi.⁵³

Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah semenanjung Korea merupakan medan pertemuan dan bahkan pertikaian kepentingan antara negara-negara yang memiliki tujuan-tujuan politik di wilayah tersebut. Keberadaan pasukan Amerika Serikat di wilayah Korea Selatan merupakan bentuk aliansi yang dibangun oleh Amerika untuk menghadapi Korea Utara. Dukungan militer Amerika Serikat dengan menempatkan berbagai pasukannya di wilayah Korea Utara telah ada sejak lama. Keberadaannya bertujuan untuk mencegah upaya militer Korea Utara untuk tidak menyerang Korea Selatan. Kondisi itu dipandang Korea Utara sebagai bentuk intervensi Amerika Serikat dan upaya negara adidaya tersebut untuk mengancam keamanan nasional Korea Utara.⁵⁴

Ancaman keamanan yang dirasakan Korea Utara tidak terlepas dari konflik dua Korea sejak tahun 1950-an. Upaya Korea Utara untuk kembali mempersatukan dua Korea merupakan tujuan politik yang diinginkan Korea Utara. Kondisi ini berimbas pada berbagai manuver politik negara tersebut untuk mendapatkan tujuan-tujuan politiknya. Adanya kepentingan politik Korea Utara dan upaya pencegahan yang dilakukan Amerika Serikat, serta kecurigaan dari masing-masing pihak

⁵³ *Op.Cit.*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 100

⁵⁴ Daniel A. Pinkston, *North Korea Motivations for Developing Nuclear Weapons*, Hal. 1, di unduh melalui http://cns.miis.edu/north_korea/dprkmtv.pdf, pada tanggal 15 Mei 2011

menjadikan wilayah Semenanjung Korea sebagai wilayah pertikaian kepentingan antar dua pihak yang secara asimetris sangat memiliki kemampuan yang berbeda.

Meski menyadari adanya perbedaan kekuatan, Korea Utara melalui pemimpinnya terus berusaha untuk melakukan perlawanan, baik secara politik maupun militer. Secara politik, Korea Utara tetap menyadari perlunya mempersatukan dua Korea. Tujuan utama dari reunifikasi atau penyatuan kembali merupakan upaya politik untuk mensejahterakan Korea Utara. Hal ini disebabkan Korea Selatan memiliki kemampuan ekonomi yang jauh lebih baik. Secara militer, Korea Utara terus berusaha untuk melakukan langkah perimbangan kekuatan. Langkah perimbangan ditujukan untuk menangkal keberadaan Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea. Pada level minimum, para pemimpin Korea Utara berupaya untuk memperkuat kemampuan konvensionalnya, namun pilihan untuk menggunakan kekuatan nuklir dan kemampuan misil balistik tampaknya menjadi pilihan utama.⁵⁵

Pilihan untuk menggunakan kekuatan nuklir sebagai strategi keamanan nasional merupakan alasan yang mendasari Korea Utara mengingat terdapat bentuk perjalanan sejarah yang menggambarkan adanya bentuk ancaman dan dominasi dari Amerika Serikat. Selama perang Korea berlangsung, Korea Utara merupakan pihak yang selalu mengalami tekanan politik dan militer dari Amerika Serikat. Kondisi itu disebabkan oleh kemampuan asimetris antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Pengalaman perang di masa lalu itu kemudian menjadi alasan kuat bagi negara tersebut untuk tetap mewaspadaai Amerika Serikat sebagai pihak yang memiliki potensi untuk mengancam keamanan nasional Korea Utara, terlebih lagi pola aliansi yang dibangun Amerika Serikat dengan Korea Selatan.

Rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan yang begitu tinggi tersebut kemudian mendorong Korea Utara untuk menganut doktrin nuklir yang mendeskripsikan

⁵⁵ *Ibid.*

berbagai bentuk kebijakan negara tersebut untuk dapat mengimplementasikan strategi pertahanan yang bersandar pada pola sistem pertahanan yang berkiblat pada doktrin yang dianut dengan segera melakukan pengembangan senjata nuklir. Doktrin nuklir yang bertujuan untuk mengadopsi berbagai kebijakan pertahanan yang menjelaskan pada bagaimana pembangunan kekuatan pertahanan Korea Utara mulai diimplementasikan negara tersebut. Dengan kata lain, implikasi kebijakan pertahanan Korea Utara yang menganut doktrin nuklir berdampak pada pembangunan kekuatan militer yang menjelaskan esensi proses pengembangan senjata nuklir negara tersebut.

Program pengembangan senjata nuklir yang dimulai dari pengayaan uranium melalui mulai beroperasinya kembali reaktor nuklir Korea Utara mulai memancing reaksi dari beberapa pihak. Badan Atom Internasional sendiri masih terus berupaya untuk meminta Korea Utara untuk mau membuka jalur dialog. Meski begitu, pihak Korea Utara tetap bersikeras untuk tidak memberikan ruang bagi pengawasan dan permintaan berbagai pihak untuk segera menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya. Di tahun 2004, Badan Atom Internasional melaporkan bahwa:⁵⁶

- Aktifitas nuklir yang dilakukan Korea Utara dan penarikan diri dari perjanjian NPT merupakan preseden buruk sekaligus menandakan adanya sinyal bahaya dengan adanya ancaman kredibilitas nuklir terhadap rezim non-penyebaran nuklir di dunia.
- Upaya pengembangan senjata nuklir Korea Utara merupakan bentuk perhatian sepenuhnya atas implikasi ancaman keamanan.
- Direktur Umum IAEA atau Badan Atom Internasional membuka ruang bagi kelompok *Six-Party Talks*, yang terdiri dari China, Korea Utara, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika, untuk membuka diskusi.

⁵⁶ IAEA General Conference, *Implementation of Safeguard Agreement Between the Agency and the Democratic People's Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, GC(47)/13, 4 August 2005, hal. 2-3

Di tahun 2006, Badan Atom Internasional kembali melaporkan dan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meredam motivasi Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir. Berikut upaya yang dilakukan Badan Atom Internasional dalam menghadapi keputusan Korea Utara yang dinilai menyimpang dari rezim non-penyebaran nuklir dan berbagai manuver politik yang dilakukan Korea Utara terkait dengan pengembangan senjata nuklirnya.⁵⁷

- Meminta Korea Utara untuk kembali melakukan diskusi dengan *Six-Party Talks* dan meminta negara tersebut untuk meninggalkan upayanya dalam melakukan pengembangan senjata nuklir.
- Terdapat bentuk pengumuman yang dilakukan oleh Korea Utara kepada dunia internasional mengenai keberhasilan negara tersebut di dalam melakukan uji coba senjata nuklir, yang kemudian isu uji coba tersebut menjadi tema diskusi utama di kalangan para petinggi Badan Atom Internasional pada Bulan November 2006.
- Terdapat titik terang antara Korea Utara dan pihak Badan Atom Internasional mengenai kesepakatan untuk mengakhiri pengembangan senjata nuklir dengan kesepakatan penutupan beberapa instalasi reaktor nuklir yang dimiliki Korea Utara melalui kesepakatan *surveillance measure and photographic record*, diantaranya:
 - .1. Nuclear Fuel Fabrication Plant.
 - .2. Radiochemical Laboratory.
 - .3. 5 MW(e) Experimental Nuclear Power Plant.
 - .4. 50 MW(e) Nuclear Power Plant.
 - .5. 200 MW(e) Nuclear Power Plant.

Adanya kesepakatan antara kedua pihak untuk memulai proses kerjasama dengan bentuk pengawasan atas pelaksanaan program nuklir dan penutupan berbagai

⁵⁷ IAEA General Conference, *Implementation of Safeguard Agreement Between the Agency and the Democratic People's Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, GOV/200745-GC(51)/19, 17 August 2007, hal. 1-3

instalasi nuklir tampaknya menjadi titik terang di mana Korea Utara, seperti, mau mengikuti berbagai aturan yang tertuang di dalam perjanjian NPT, yaitu mematuhi bentuk non-proleferasi dan produksi nuklir untuk penggunaan tujuan damai atau hanya untuk memproduksi nuklir sebagai kebutuhan energi. Namun, kondisi kembali berubah ketika di tahun 2009, Korea Utara kembali menutup akses dan melakukan penghentian kerjasama dengan Badan Atom Internasional.

Penghentian kerjasama dan penutupan akses bagi pengawasan Badan Atom Internasional tersebut tidak hanya sampai di situ. Korea Utara pun juga telah kembali melepas semua segel yang dipasang oleh badan atom internasional dan melepas semua kamera pengawas serta meminta agen inspeksi Badan Atom Internasional untuk segera meninggalkan Korea Utara. Penghentian kerjasama antara Korea Utara dan Inspeksi Badan Atom Internasional tersebut berujung pada pengumuman yang ditujukan pada dunia internasional bahwa Korea Utara telah berhasil melakukan uji coba nuklir di bawah tanah.⁵⁸

Sikap Korea Utara yang tetap berusaha melakukan pengembangan senjata nuklir ini sebetulnya bukanlah hal baru. Proses pengembangan senjata nuklir ini sebetulnya telah beberapa mengalami perubahan. Kebijakan Korea Utara yang berubah-ubah menjelaskan bahwa Korea Utara tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya untuk kebutuhan militer. Dalam perjalanan sejarahnya, pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara bermula dari seorang ilmuwan Korea bernama Dr. Lee Sung Ki. Ilmuwan inilah yang menginisiasi pengembangan program nuklir dan kimia.⁵⁹

Inisiasi pengembangan program nuklir yang dilakukan pada tahun 1960-an tersebut sebenarnya telah dihentikan pada tahun 1970-an, namun paska keluarnya Korea Utara dari NPT tersebut kembali mempertegas keyakinan masyarakat internasional bahwa Korea Utara telah kembali memulai pengembangan program

⁵⁸ IAEA General Conference, *Application of Safeguard in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*, GOV/2009/45-GC(53)/13, 30 July 2009, hal. 2-3

⁵⁹ *Ibid*, hal. 102

senjata nuklirnya. Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara pada Oktober 2006 yang menyatakan bahwa “will in the future conduct a nuclear test”.⁶⁰

Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara tidak hanya diklaim oleh pemerintah setempat, tetapi juga sengaja diumumkan kepada dunia internasional. Korea Utara secara terang-terangan telah mengakui kepada dunia internasional bahwa negara tersebut memang telah melakukan pengembangan senjata nuklir dan bahkan telah memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut diumumkan secara khusus pada April 2003 di *Beijing Talks* dan Agustus 2003 pada *Beijing Meeting*.⁶¹

Pernyataan yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Korea Utara bukan sekadar ancaman atau ucapan belaka. Pernyataan yang menguatkan bahwa terdapat pengembangan senjata nuklir Korea Utara dibuktikan dengan adanya uji coba senjata nuklir yang dilakukan negara tersebut dengan melakukan peledakan nuklir bawah tanah pada Oktober 2009.⁶² Sebelumnya, Korea Utara juga telah melakukan uji coba nuklir kedua pada Mei 2009 dengan estimasi kekuatan nuklir yang diperkirakan sebesar 4-5 kiloton.⁶³

Pembuktian melalui uji coba tersebut merupakan rangkaian proses pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang dilakukan melalui pengembangan fasilitas Yongbyon program nuklir untuk melakukan pembuatan senjata nuklir negara tersebut. Fasilitas Yongbyon yang menjadi pusat pengembangan senjata nuklir tersebut beroperasi secara rahasia tersebut, disingkap telah melakukan pengayaan uranium yang dilakukan oleh KEDO (Korean Peninsula Energy Development Organization). Korea Utara mengklaim bahwa mereka telah berhasil memiliki senjata

⁶⁰ CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, Congressional Research Service: the Library of Congress, 2006. hal. 1

⁶¹ *Ibid*, hal. 8

⁶² *Op.Cit.*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 95

⁶³ Larry A. Niksch, *North Korea's Nuclear Weapons Development and Diplomacy*, Congressional Research Service: the Library of Congress, 2010, hal. 29

nuklir dan telah menyelesaikan aktifitas proses ulang lebih dari 8000 bahan bakar nuklir yang mampu menghasilkan plutonium yang cukup untuk membuat 6-10 bom atom.⁶⁴

Keberhasilan Korea Utara dalam melakukan pengembangan senjata nuklir tersebut diperkuat dengan adanya laporan dari *International Institute of Strategic Studies* pada tahun 2003, yang melaporkan bahwa terdapat pengalokasian dana Korea Utara sebesar 25% dari keuangan negara untuk kebutuhan militer.⁶⁵ Aktifitas pengembangan senjata nuklir dengan memproduksi pengayaan uranium dilaporkan telah membuat negara tersebut menghasilkan persediaan bahan perang kimia dalam jumlah besar.⁶⁶

Pengembangan senjata nuklir Korea Utara, menurut laporan *CRS Report for Congress*, terletak pada *Plutonium-Based Nuclear Installation* yang berlokasi di Yongbyon. Sebuah wilayah yang terletak 60 mil dari pusat pemerintahan Korea Utara, Pyongyang. Di era terdahulu, fasilitas yang dimiliki negara ini tidak lepas dari peran serta Amerika ketika hubungan antar kedua negara tersebut masih baik. Program bantuan yang diberikan Amerika Serikat untuk pembangunan pengembangan plutonium untuk kebutuhan domestik ini kemudian berubah menjadi instalasi plutonium yang ditujukan sebagai reaktor untuk memproduksi plutonium untuk mengembangkan senjata nuklir.⁶⁷

Terdapat beberapa instalasi kunci yang memiliki peranan penting di dalam mengembangkan senjata nuklir Korea Utara,⁶⁸ diantaranya adalah:

- Satu reaktor atom dengan kapasitas 5 megawatt (5 electrical megawatt) beroperasi sejak 1987.

⁶⁴ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 95

⁶⁵ *Op.Cit*, CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, hal. 9

⁶⁶ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 103

⁶⁷ *Op.Cit*, CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, hal. 10

⁶⁸ *Ibid.*

- .1.1. Reaktor atom ini dipercaya memiliki kemampuan di dalam memproduksi 6 kilogram plutonium per tahunnya. Jumlah plutonium sebesar 6 kilogram tersebut cukup untuk menghasilkan satu bom atom setiap tahunnya. Pada tahun 1998, pemerintah Korea Utara telah menghentikan produksi reaktor ini selama 70 hari dan pada tahun 1994, Korea Utara menghentikan dan membuang lebih dari 8000 bahan bakarnya. Namun kondisi mulai berubah ketika Februari 2003, Korea Utara mulai membuka kembali program reaktor nuklir tersebut untuk pengembangan senjata nuklir.
- Dua reaktor besar yang memiliki kisaran 50 megawatt dan 200 megawatt listrik (electrical megawatt).
 - .1.1. Berdasarkan Duta Besar Amerika Robert Gallucci, pengembangan reaktor nuklir ini telah memiliki kemampuan untuk memproduksi plutonium sebanyak 200 kilogram per tahunnya. Jumlah tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan 30 bom atom per tahunnya. Laporan ini mengindikasikan bahwa konstruksi pengembangan nuklir ini di prediksi akan selesai Juni 2005.
- Institusi Penanaman Kembali Plutonium.
 - .1.1. Institusi ini ditujukan untuk melakukan penanaman plutonium untuk digabungkan atau ditanamkan ke dalam bom atom yang menjadi bagian dari hulu ledak atau kepala nuklir (warheads). Agen intelijen Amerika menyatakan bahwa program penanaman *warheads* ini sudah dipersiapkan untuk dilaksanakan pada akhir 2003.

Pelaksanaan pengembangan nuklir yang dilakukan di berbagai instalasi Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir melalui pengayaan uranium sampai pada penanaman bahan utama nuklir, plutonium, yang kemudian dikembangkan menjadi senjata nuklir tersebut dilakukan negara tersebut juga dengan mempersiapkan sumber daya manusianya. Terdapat sekitar 3000 ilmuwan yang dilibatkan dan dibantu dengan

personil peneliti, yang semuanya telah mempelajari program teknologi nuklir untuk melaksanakan program senjata nuklir Korea Utara.⁶⁹

Dampak dari pelaksanaan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, menurut laporan CIA Amerika, Korea Utara dipercaya akan sudah memiliki 2 bom atom yang dicapai melalui pengayaan HEU Program atau *Highly Enriched Uranium Program*. Program ini dipercaya merupakan program yang dilakukan secara besar-besaran sehingga negara tersebut dianggap memiliki banyak deposito uranium yang menjadi alat utama di dalam mengembangkan senjata nuklir. Kepala Departemen Biro Perencanaan Kebijakan Amerika menyatakan bahwa melalui pengayaan uranium tersebut maka dapat diprediksi bahwa Korea Utara akan mampu menghasilkan atau menciptakan dua atau lebih senjata nuklir dalam setahun. Informasi lainnya menjelaskan bahwa dengan memiliki program pengayaan uranium tersebut, maka Korea Utara dapat menghasilkan 6 bom atom per tahunnya.⁷⁰

Melalui proses pengayaan uranium dan penanaman plutonium yang dilakukan di berbagai instalasi program pengembangan senjata nuklir, banyak yang berpendapat bahwa, terdapat setidaknya delapan fasilitas yang digunakan Korea Utara untuk memproduksi senjata kimia. Jumlah senjata kimianya berjumlah 12 buah atau lebih dan ditempatkan di enam tempat berbeda, dan diprediksi jumlah senjata berbahaya tersebut masih akan terus bertambah jumlahnya jika dilihat dari kemampuan produksi negara tersebut.⁷¹

Kemampuan produksi negara tersebut di dalam mengimplementasikan pengembangan program nuklirnya ditujukan antara lain untuk mewujudkan dan mengembangkan persenjataan yang memiliki kemampuan ofensif, seperti misil balistik, senjata nuklir, dan kapal selam bertenaga nuklir.⁷² Pengembangan berbagai jenis kebutuhan militer ini menggambarkan bentuk kesiapan negara ini untuk terus

⁶⁹ *Ibid*, hal. 11

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 104

⁷² *Ibid*, hal. 26

meningkatkan kemampuan ofensifnya. Implikasi dari pengembangan persenjataan yang berbasis nuklir ini dipercaya, pada awal tahun 2007, telah berhasil melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Pengembangan jenis persenjataan yang ada seperti 600 Misil Scud jenis SRBM dan sekitar 100-200 Misil No-Dong jenis MRBM. Selain jenis misil tersebut,⁷³ Korea Utara juga sedang mempersiapkan jenis misil yang memiliki jangkauan target yang lebih jauh atau jenis misil yang dapat melintasi benua, seperti Misil Seri Taepodong jenis ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), yang kini sedang dalam proses pengembangan dan pengujian.⁷⁴

Secara keseluruhan, Korea Utara kini telah memiliki lebih dari 600 sampai 800 misil ukuran sedang. Jumlah misil dengan kemampuan ofensif tersebut menjelaskan bahwa program pengembangan senjata nuklir Korea Utara bukanlah kebijakan yang mengada-ada. Keseriusan Pemerintah Pyongyang dalam meningkatkan kemampuan ofensifnya telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan program nuklir kini telah memberikan perubahan kondisi kekuatan militer negara tersebut.

Berikut tabel yang menjelaskan jenis persenjataan yang dimiliki Korea Utara berdasarkan jangkauan klasifikasi persenjataan:

Tabel 2: Misil Korea Utara Jangkauan Jarak Dekat⁷⁵

Short- Range Type	Range (km)	Payload (kg)	Warhead	CEP (meters)	Launc her/F uels	Target	Status
Hwasong-6	500	770	Conventiona l possible nuclear, biological, or chemical	2000	Mobil e, liquid fuel	South Korea	Deploy ed Export ed

⁷³ *Ibid*, hal. 114

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 115

Hwasong-5	300	987-989	Conventional possible nuclear, biological, or chemical	800-1000	Mobile, liquid exported	South Korea	Deployed
-----------	-----	---------	--	----------	-------------------------	-------------	----------

Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*

Tabel di atas menjelaskan pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah berhasil menciptakan berbagai senjata yang memiliki jangkauan dekat. Tabel tersebut tidak hanya menjelaskan bentuk persenjataan, juga memberikan data mengenai jangkauan target. Senjata dengan jangkauan jarak dekat tersebut sebagai hasil dari pengembangan senjata nuklir ditujukan untuk target yang juga berada di kawasan yang sama.

Tabel 3: Misil Korea Utara Jangkauan Jarak Menengah⁷⁶

Medium-Range Type	Range (km)	Payload (kg)	Warhead	CEP (meters)	Launcher/Fuels	Target	Status
Nodong	1000	700	Conventional possible nuclear, biological, or chemical	2000-4000	Mobile, liquid fuel	Japan	Deployed Exported
Scud-D	700	500	Conventional no information on other types	unknown	Mobile, liquid	South Korea	Deployed Exported

⁷⁶ *Ibid*, hal. 115

Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*

Dalam pengembangan persenjataan nuklirnya, Korea Utara juga telah berhasil menciptakan berbagai bentuk senjata nuklir yang juga memiliki kemampuan jelajah atau pencapaian target dalam jangkauan jarak yang lebih jauh atau menengah. Setidaknya pengembangan senjata nuklir telah berhasil memperkuat daya serang Korea Utara dengan memproduksi senjata nuklir seperti yang telah tertuang di tabel di atas.

Tabel 4: Misil Korea Utara Jangkauan Jarak Jauh⁷⁷

Long- Range Type	Range (km)	Payload (kg)	Warhead	CEP (meters)	Laun cher/ Fuel s	Target	Status
Taepodong 2	5000-6000?	Unknown	Convention al possible nuclear, biological, or chemical	Unknown	Fixe d liqui d fuel	United States	R&D Prototy pe Testin g
Taepodong 1	2200	Unknown	Convention al possible nuclear, biological, or chemical	unknown	Fixe d liqui d fuel	Japan Okinawa Guam	Testin g Deploy ed? Export ed?
Taepodong X	2500-4000	Unknown	Convention al possible nuclear, biological, or chemical	1000-2000	Mob ile, Liqui d Fuel		Deploy ed? Export ed?

⁷⁷ *Ibid.*

Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*

Dalam kapasitasnya untuk mengancam pihak-pihak yang berada jauh secara geografis, Korea Utara juga telah berhasil melakukan aktifitas reaktor nuklir untuk melakukan pengayaan uranium yang ditujukan untuk membangun senjata nuklir berupa misil balistik yang mampu menjangkau jarak yang cukup jauh. Jenis persenjataan ini merupakan bentuk kapabilitas penyerangan Korea Utara terhadap negara-negara yang berada di luar kawasan dan memiliki pola *enmity* atau permusuhan dengan negara tersebut.

2.2.1. Krisis Politik di Semenanjung Korea

Permasalahan nuklir yang banyak diadopsi untuk kepentingan militer telah lama membayangi perubahan dinamika politik dalam hubungan antar negara. Perubahan dinamika ini menjelaskan konteks kerjasama di dalam pembangunan reaktor nuklir yang ditujukan untuk kepentingan damai atau hanya untuk, sesuai dengan ketentuan perjanjian NPT, memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Konteks ini mengalami perubahan drastis ketika Korea Utara yang menjadi bagian dari negara-negara yang menyepakati NPT atau melakukan pengembangan nuklir untuk kebutuhan energi dalam negeri, kembali memulai program nuklirnya untuk pengembangan senjata nuklir dan keluar dari perjanjian dari NPT secara sepihak. Keluarnya Korea Utara dari NPT dan pengembangan senjata nuklir negara tersebut, secara otomatis, merubah konstelasi interaksi atau hubungan antar negara di dalam sistem internasional.

Keluarnya Korea Utara dari NPT dan memulai program pengembangan nuklir, serta ketidaksepakatan negara-negara pemegang veto terhadap negara-negara non nuklir dalam mengembangkan nuklir untuk kebutuhan militer menjelaskan bahwa konteks hubungan antara Korea Utara dengan Amerika merupakan pola permusuhan yang mengindikasikan adanya perbedaan kepentingan. Di sisi lain, perbedaan cara pandang dalam menyikapi berbagai kebijakan keamanan dari masing-masing pihak mengisyaratkan bahwa terdapat potensi konflik yang dapat mengarah

pada terjadinya konflik militer. Potensi konflik yang disadari oleh Korea Utara menjadi alasan utama bagi negara tersebut untuk melakukan proses pertimbangan dalam menghadapi kekuatan dan kemampuan pihak lawan yang secara matematis memang berada di atas kemampuan Korea Utara. Perbedaan kekuatan yang bersifat asimetris ini menjelaskan pola permusuhan yang tidak seimbang. Kondisi inilah yang membuat proses pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara dapat menjadi kekuatan yang mampu mengimbangi sekaligus mengkhawatirkan Amerika Serikat dan aliansinya. Jika pengembangan senjata nuklir tersebut dapat berjalan baik, maka akan ada perubahan konstelasi kekuatan di Semenanjung Korea. Karena itu, negara-negara pemegang veto, terutama Amerika Serikat berusaha untuk terus memperkuat kerjasama internasional yang ditujukan untuk menghadapi bentuk penyebaran senjata nuklir yang dapat membahayakan, terutama kepentingan negara-negara pemegang veto, baik secara ekonomi maupun politik.

Pola interaksi atau hubungan antara negara-negara yang menyepakati nuklir sebagai bagian dari kebutuhan energi dengan negara-negara yang tidak menyepakati program nuklir untuk pengembangan senjata nuklir oleh negara-negara non-nuklir atau negara-negara yang tidak memegang hak veto, dinilai oleh para negara nuklir atau pemegang hak veto, merupakan pelanggaran atas kesepakatan NPT. Negara-negara nuklir menyatakan bahwa apa yang dilakukan Korea Utara sebagai negara non-nuklir atau negara yang hanya boleh menggunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri saja, adalah ancaman atas keamanan internasional. Negara-negara nuklir seperti Amerika Serikat menyatakan bahwa negara seperti Korea Utara yang mengembangkan senjata nuklir dinilai sebagai sikap dan perilaku teroris. Amerika Serikat beranggapan bahwa apa yang dilakukan Korea Utara merupakan bentuk perilaku yang dapat membahayakan keamanan dunia.

Sebagai negara *superpower*, Amerika Serikat perlu melakukan perbaharuan kebijakan strategi nasional dan bentuk kepemimpinan global. Bentuk kepemimpinan global negara besar tersebut merupakan strategi untuk membangun kembali pondasi kekuatan dan pengaruh Amerika Serikat terhadap dunia. Proses tersebut digunakan

untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman untuk mencegah adanya penyebaran senjata nuklir yang dapat membahayakan keamanan internasional melalui kerjasama kemitraan di setiap regional dan memperkuat institusi internasional.⁷⁸ Selain itu, kebijakan Amerika dalam menghadapi teror merupakan langkah menghadapi adanya ancaman melalui pembangunan *ballistic missile defense*, memperkuat *nonproliferation endeavors*, dan menggunakan diplomasi kolektif yang efektif.⁷⁹ Hal itu perlu dilakukan mengingat proses pencapaian keamanan dunia merupakan tanggung jawab negara tersebut, karena itu Amerika Serikat menilai bahwa apa yang dilakukan Korea Utara merupakan bagian dari tanggung jawab Amerika Serikat untuk berusaha menghentikan tindakan Korea Utara tersebut. Bagi Amerika, krisis yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan permasalahan keamanan yang paling mendesak yang kini dihadapi Amerika Serikat.⁸⁰

Krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea diawali pada tahun 2002 ketika Asisten Sekretaris Negara Amerika Serikat James Kelly menyatakan kecurigaannya atas bukti yang menjelaskan adanya usaha rahasia Korea Utara dalam mengembangkan kapabilitas pengayaan uranium.⁸¹ Di kesempatan lain, Kepala Agen Intelijen Pertahanan Amerika Serikat Laksmana Lowell Jacoby mengatakan bahwa usaha melakukan pengembangan senjata nuklir Pyongyang merupakan tantangan yang serius bagi kepentingan regional Amerika Serikat di masa mendatang. Dampak nyata krisis yang dikhawatirkan Amerika Serikat dan aliansinya, seperti Korea Selatan dan Jepang terletak pada resiko pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat berimplikasi pada.⁸²

- Jika Korea Utara mengembangkan jumlah substansi materi nuklir, maka Korea Utara kemungkinan akan menjual kepada kelompok teroris.

⁷⁸ The United States of America, *The National Security Strategy*, May 2010, hal. 4

⁷⁹ Robert G. Kaufman, *In Defense of the Bush Doctrine*, Kentucky: University Press of Kentucky, 2007, hal. 128

⁸⁰ Michael O'Hanlon, *Crisis on The Korean Peninsula*, United States of America: The Brooking Institution, 2003, hal. 1

⁸¹ *Ibid*, hal. 29-30

⁸² *Ibid*, hal. 40

- Jika pemerintahan Korea Utara suatu saat akan mengalami kegagalan atau keruntuhan pemerintahan, maka materi nuklir kemungkinan akan jatuh kepada pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan dengan menjualnya kepada pihak penawar yang lebih besar.
- Kekuatan penangkalan Korea Selatan dan Amerika Serikat akan melemah jika Korea Utara menggunakan nuklirnya sebagai senjata utama. Jika itu terjadi maka akan ada bentuk perang nuklir yang dapat membahayakan populasi.
- Senjata nuklir Korea Utara akan memulai efek domino senjata nuklir ke wilayah Timur Laut Asia dan akan memperlemah usaha global mengenai pelarangan penyebaran nuklir yang lebih luas.

Kondisi krisis yang terjadi dan berdampak pada bentuk perubahan konstelasi dalam interaksi antar negara dan kekhawatiran terhadap bentuk penyebaran senjata nuklir yang dapat membahayakan dunia ini yang kemudian menjadi alasan bagi Amerika Serikat melalui Presiden Bush, pada waktu itu, dengan memasukkan Korea Utara sebagai negara yang disebut *axis of evil* atau poros setan.

Sebagai salah satu negara poros setan, tindakan Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklirnya dianggap sebagai ancaman keamanan dunia. Ancaman terhadap keamanan dunia disebabkan oleh bentuk pengembangan senjata nuklir yang memiliki dampak destruktif terhadap keamanan militer dan politik dunia. Untuk menghadapi situasi tersebut, Amerika Serikat melalui buku putih pertahanan dan strategi nasionalnya menyatakan bahwa bentuk ancaman terhadap penyebaran senjata nuklir merupakan salah satu prioritas kebijakan pertahanan dan keamanan Amerika Serikat mengingat resiko dan bahaya jenis persenjataan tersebut.⁸³

Untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman senjata nuklir, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan pertahanannya untuk mencegah setiap musuh yang

⁸³ The United States of America, *The National Security Strategy*, March 2006, hal. 1

mengancam Amerika dan aliansinya dari serangan senjata pemusnah massal.⁸⁴ Implementasi kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas kebijakan negara *superpower* tersebut melalui sebuah pembangunan pondasi dan pembangunan institusi kerjasama untuk menghadapi tantangan yang ada.⁸⁵ Tantangan terhadap keamanan Amerika dan dunia terletak pada keberadaan negara-negara yang masih menganut pemerintahan tirani.

Negara-negara tirani tersebut merupakan kombinasi dari kebrutalan, kemiskinan, instabilitas, korupsi, dan menderita. Negara-negara tirani tersebut memiliki sistem pemerintahan yang dibentuk oleh penguasa-penguasa lalim dengan menerapkan sistem pemerintahan yang semena-mena, seperti Korea Utara, Iran, Syria, Kuba, Belarusia, Birma, dan Zimbabwe. Bentuk kesewenangan tirani tidak hanya diimplementasikan ke dalam kehidupan nasional saja, juga ke lingkup yang lebih luas, yaitu dunia internasional. Negara-negara tirani ini mengancam kepentingan dunia dengan melakukan tindakan-tindakan ekspansi dan mencapai kepentingan dengan menciptakan jenis senjata pemusnah massal atau mensponsori kelompok-kelompok terorisme dan mengancam keamanan bersama.⁸⁶

Eksistensi pihak-pihak yang dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan dunia, seperti Korea Utara, membuat negara *superpower* ini terus menggalang kekuatan untuk menghadapi krisis politik dan keamanan. Bentuk penggalangan kekuatan ini ditujukan untuk memperlemah posisi negara-negara yang dianggap berbahaya bagi keamanan dunia, seperti Korea Utara. Bentuk penggalangan kekuatan yang dilakukan Amerika Serikat terletak pada pengerahan seluruh perangkat kekuatan nasionalnya dalam menghadapi pihak-pihak yang dapat mengancam kestabilan dunia, seperti kekuatan politik, ekonomi, diplomasi, dan instrumen lainnya,⁸⁷ termasuk penggalangan kerjasama internasional melalui aliansi.⁸⁸

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*, hal. 3

⁸⁷ *Ibid*, hal. 6

Strategi aliansi Amerika Serikat dilakukan bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan secara bersama mendukung kebijakan internasional Amerika Serikat untuk menghadapi tindakan pengembangan nuklir Korea Utara. Jepang dan Korea Selatan, dalam dokumen resminya, menyatakan bahwa perlunya melakukan kerjasama, baik bilateral, maupun multilateral untuk menghadapi Korea Utara.⁸⁹ Bentuk kerjasama internasional yang dilakukan Amerika, Jepang, dan Korea Selatan ini ditujukan untuk memperlemah kekuatan Korea Utara yang mengganggu stabilitas internasional.

Penggalangan kerjasama internasional yang dilakukan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Utara diimplementasikan melalui kerjasama di dalam penegakan hukum internasional, intelijen, militer, dan aktifitas diplomasi. Penggalangan kerjasama internasional ini perlu dilakukan mengingat apa yang dilakukan Korea Utara merupakan ancaman terhadap stabilitas regional dan menentang aturan-aturan internasional dengan menunjukkan kepemilikan senjata nuklir dan melakukan pengembangan program nuklir yang melanggar kesepakatan internasional.

Kerjasama internasional dalam menghadapi Korea merupakan kebijakan internasional yang ditujukan untuk menghadapi Korea Utara yang dinilai membahayakan keamanan internasional. Kebijakan tersebut adalah dengan diplomasi penawaran restrukturisasi perekonomian Korea Utara dan pemberian sanksi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi yang ditawarkan oleh 4 negara, yaitu China, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan ini ditujukan sebagai bentuk diplomasi kepada Korea Utara agar negara tersebut bersedia menghentikan pengembangan program nuklir untuk menciptakan senjata nuklirnya.

Upaya yang ditawarkan oleh 4 negara tersebut nampaknya belum diindahkan oleh Korea Utara. Meski mendapatkan penawaran restrukturisasi perekonomian, Korea Utara tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pengembangan senjata

⁸⁸ *Ibid*, hal. 8

⁸⁹ Defense White Paper of the Republic of Korea 2003; Defense White Paper of the Republic of Korea 2006; Defense of Japan 2006

nuklirnya mengingat tujuan utama negara tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara nuklir dan keinginan untuk kembali bersatu dengan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Korea Utara. Kepentingan nasional Korea Utara yang tidak mungkin dipenuhi oleh Amerika dan sekutunya tersebut, membuat pihak sekutu akhirnya memberikan sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi yang digalang dalam kerjasama internasional dilaksanakan dengan tujuan memperlemah kemampuan Korea Utara. Sanksi ekonomi yang diterima Korea Utara membuat negara tersebut terisolasi dari kegiatan perekonomian, baik sanksi ekspor perdagangan maupun pembekuan aset kekayaan Korea Utara.⁹⁰

2.2.2. Kebijakan Keamanan Korea Utara

Potensi konflik yang tercipta antara Amerika Serikat dan aliansinya terhadap Korea Utara yang karena perbedaan kepentingan politik menciptakan kondisi pola permusuhan yang telah lama berlangsung. Keengganan Korea Selatan untuk mengikuti keinginan Korea Utara dalam proses reunifikasi dan bentuk aliansi Amerika Serikat yang membantu meningkatkan kemampuan dan kekuatan militer Korea Selatan dan Jepang merupakan bentuk ancaman terhadap Korea Utara. Aliansi tiga negara dalam bidang militer tersebut membuat berbagai bentuk interaksi mengarah pada eskalasi pola permusuhan di Semenanjung Korea.

Dalam menghadapi pola permusuhan di wilayah regionalnya, Korea Utara secara rahasia membangun sebuah kekuatan persenjataan nuklir yang ditujukan sebagai langkah kebijakan negara tersebut dalam mengamankan posisinya dari ancaman kredibilitas kekuatan militer pihak Amerika dan aliansinya. Pengembangan senjata nuklir yang telah lama dicurigai pihak Barat (baca: Amerika) dan Badan Atom Internasional (IAEA). Pengembangan senjata nuklir secara rahasia ini merupakan bentuk kebijakan keamanan negara tersebut untuk menghadapi rasa ketidakamanan dan ketakutan atas serangan Amerika dan sekutunya. Kebijakan

⁹⁰ Tim Beal, *North Korea: the Struggle Against American Power*, London: Pluto Press, 2005, hal. 44-57, 224

keamanan melalui pengembangan senjata nuklir secara rahasia ini merupakan “cry for help” Korea Utara untuk membujuk Amerika agar mau berdiskusi langsung.⁹¹

Langkah yang diambil Korea Utara ini merupakan bentuk kebijakan keamanan dengan melakukan pengembangan senjata nuklir dengan tujuan agar negara tersebut mampu mencapai kepentingan nasionalnya, diantaranya, untuk kembali menyatukan dua Korea atau reunifikasi dua Korea.⁹² Sebuah bentuk reunifikasi yang sama sekali ditentang Amerika Serikat mengingat bentuk reunifikasi tersebut sama sekali tidak mengakomodasi kepentingan negara *superpower* di wilayah regional tersebut.⁹³ Korea Utara memandang bahwa Amerika Serikat sama sekali tidak pernah berusaha bertujuan untuk menormalisasi hubungan keduanya atau mendukung terciptanya perjanjian keamanan. Hal tersebut membuat Korea Utara terus merasa curiga terhadap kebijakan Amerika Serikat di wilayah Semenanjung Korea.⁹⁴ Keinginan Korea Utara untuk mendapatkan bantuan ekonomi sepertinya tidak pernah dapat dicapai. Untuk itu Korea Utara berusaha untuk melakukan penangkalan sambil mencari cara untuk memperbaiki perekonomian negara tersebut.⁹⁵ Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan Korea Utara untuk menghindari tekanan Amerika dan aliansinya. Kondisi ini pada akhirnya menciptakan rasa takut terhadap keamanan negara atau *security fears*, sehingga memicu Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklirnya.⁹⁶

Tidak adanya kemajuan dalam implementasi kerjasama antara Amerika Serikat dengan Korea Utara membuat hubungan kedua negara sama sekali tidak berjalan dengan baik, bahkan Amerika tetap melakukan kebijakan keamanannya di Semenanjung Korea dengan menempatkan pasukan militernya sebagai opsi utama dan tetap menjadikan Korea Utara sebagai target persenjataan nuklirnya seperti yang

⁹¹ Cha & Kang, *Nuclear North Korea: a Debate on Engagement Strategies*, New York: Columbia University Press, 2003, hal. 2

⁹² *Ibid*, hal. 165-166

⁹³ *Ibid*, hal 169

⁹⁴ *Ibid*, hal. 134

⁹⁵ *Ibid*, hal. 135

⁹⁶ *Ibid*.

tertuang di dalam dokumen kebijakan Amerika Serikat, yaitu *Nuclear Posture Review*.⁹⁷ Kebijakan Amerika tersebut kemudian dibalas Korea Utara dengan kembali melanjutkan kebijakan keamanannya, yaitu meneruskan pengembangan senjata nuklirnya.⁹⁸

Pengembangan senjata nuklir tersebut kemudian menghasilkan berbagai bentuk persenjataan rudal. Persenjataan tersebut yang dilengkapi hulu ledak nuklir merupakan produk dari kebijakan keamanan Korea Utara melalui pengadopsian doktrin nuklirnya dengan tujuan sebagai strategi penangkalan nuklir untuk menghadapi pola permusuhan antara Korea Utara *vis a vis* Amerika Serikat dan aliansinya di Semenanjung Korea.

2.3. Kesimpulan

Konteks pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang dimulai kembali paska keluarnya dari NPT menjelaskan keterbukaan negara tersebut kepada dunia mengenai pengembangan senjata nuklirnya yang diproduksi di berbagai reaktor nuklir negara tersebut. Penolakan atas pemeriksaan dari PBB dan IAEA yang berupaya untuk melakukan investigasi atas kecurigaan terhadap perilaku Korea Utara, serta pengaktifan kembali sejumlah reaktor nuklir di berbagai wilayah negara tersebut, sampai pada penanaman *warhead* pada beberapa rudal persenjataannya, dan dilanjutkan pada proses uji coba sebagai bentuk pembangunan kredibilitas kekuatan penangkalan. Dengan kata lain, dimulai kembalinya aktifitas reaktor nuklir untuk melakukan pengayaan uranium yang ditujukan untuk membangun senjata nuklir, berupa misil balistik telah menggambarkan implementasi kebijakan keamanan yang menjelaskan proses pengembangan senjata nuklir Korea Utara periode 2003 sampai 2010.

⁹⁷ *Ibid*, hal. 137

⁹⁸ *Ibid*, hal. 138

Berikut disimpulkan pengembangan senjata misil balistik nuklir Korea Utara:

Tabel 5: Pengembangan Nuklir Korea Utara

No	Tahun	Kegiatan Pengembangan Nuklir
1.	2003	Korea Utara keluar dari NPT
2.	2003	Membuka kembali aktifitas reaktor nuklir berkekuatan 5 megawatt
3.	2003	Pengalokasian dana sebesar 25% dari keuangan negara untuk kebutuhan militer
4.	2003	Pernyataan melakukan pengembangan senjata nuklir pada April di Beijing Talks
5.	2003	Program penanaman warhead pada akhir 2003
6.	2006	Pernyataan resmi untuk uji coba nuklir
7.	2007	Pengembangan senjata nuklir yang menghasilkan 600 Misil Scud jenis SRBM dan sekitar 100-200 Misil No-Dong jenis MRBM
8.	2009	Menutup akses kerjasama dengan IAEA

Bab III

Strategi Penangkalan Militer Korea Utara

Bab ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara pengembangan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi penangkalan Korea Utara. Karena itu, bab ini akan menjelaskan bentuk strategi penangkalan nuklir Korea Utara yang menggambarkan bentuk kapabilitas militer Korea Utara dalam menghadapi ancaman dengan mengimplementasikan strategi penangkalan melalui kemampuan defensif atau serangan balik dan kemampuan koersif. Dalam menganalisa strategi penangkalan nuklir Korea Utara, bab ini juga akan menggunakan pola pikir teori penangkalan nuklir yang akan menuntun pada bagaimana implementasi strategi penangkalan ini dalam menghadapi ancaman sekaligus menjadikan strategi penangkalan nuklir ini sebagai bagian dari jaminan keamanan nasional, serta esensi kemampuan defensif dan koersif Korea Utara sebagai bagian dari kemampuan dan kredibilitas militer negara tersebut.

3.1. Strategi *Deterrence* Korea Utara

Kemampuan *defense* (nuklir) ini memberikan perubahan atmosfer yang kini diadaptasi oleh beberapa negara sebagai bagian strategi keamanan. Salah satunya mengenai pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara sejak tahun 2003 yaitu ketika ia memutuskan untuk keluar dari NPT sampai dengan tahun 2010. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Timur telah serta merta memberikan sanksi dalam waktu yang cukup lama yang akibatnya telah menimbulkan permasalahan utama di bidang ekonomi yang cukup serius yang hingga saat ini masih diderita oleh Korea Utara. Tentu saja, bahwa kemarahan Pyongyang terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya adalah satu dari sekian alasan utama yang melatarbelakangi uji coba nuklir yang terkesan memberikan satu bentuk perlawanan baru. Pada umumnya, Korea Utara menganggap AS sebagai ancaman utama. AS juga mengawasi Korea Utara sebagai

negara pendukung teroris. Kecurigaan yang tinggi antar pihak ini mengindikasikan pola interaksi Korea Utara dan Amerika serta aliansinya berada pada level permusuhan. Konteks ini menjelaskan adanya perbedaan cara pandang setiap pihak dalam melihat pihak lain. Kecurigaan yang berkembang memicu terjadinya friksi menciptakan ketegangan, tidak hanya Korea Utara dengan Korea Selatan, juga melibatkan Amerika Serikat sebagai faktor dominan yang berada di belakang konflik di wilayah Semenanjung Korea.

Di sisi lain, kekhawatiran Amerika Serikat atas pengembangan nuklir Korea Utara yang mengindikasikan adanya pelanggaran pada perjanjian NPT dinilai sebagai tindakan provokatif. Tindakan provokatif ini terlihat pada adanya kepentingan politik antara Korea Utara dan Amerika Serikat yang berseberangan satu sama lain. Jika Korea Utara dapat memiliki senjata nuklir, maka akan terdapat bentuk strategi penangkalan yang dapat merubah konstelasi kekuatan di wilayah Semenanjung Korea. Tidak hanya berimbas pada pengaruh Amerika Serikat yang semakin menurun, juga akan ada indikasi yang menjelaskan meningkatnya potensi keamanan berbagai negara-negara yang selama ini bertikai dengan Korea Utara sekaligus negara yang juga menjadi aliansinya Amerika Serikat atau negara-negara yang selama ini dapat mengimplementasikan berbagai kepentingan negara adidaya tersebut di wilayah Asia Timur. Kondisi ini tentu saja merugikan Amerika Serikat sebagai negara yang terus berusaha menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut.

Berbagai kondisi empiris di atas menggambarkan bentuk kekhawatiran Amerika Serikat terhadap peningkatan potensi militer yang dapat membahayakan negara *superpower* tersebut berikut aliansinya. Dengan alasan itu, Washington memberikan sanksi ekonomi kepada Pyongyang. Dalam keadaan seperti itu, melihat hasil perang di Afganistan dan Irak, Korea Utara mengkhawatirkan bahwa pihaknya akan bisa juga menjadi sasaran berikut dalam daftar gempuran AS. Oleh karena itu, Korea Utara menaruh perhatian pada pengembangan senjata nuklir dengan harapan bahwa nuklir itu akan mencegah AS tidak melakukan aksi provokasi militer terhadap Korea Utara.

Langkah penangkalan yang dilakukan Korea Utara dengan mengadopsi doktrin nuklir ini kemudian diimplementasikan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006. Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu. Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB. Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (*Six Party Talks*), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti *Six Party Talks* bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil.

Bentuk unjuk kekuatan kembali dilakukan Korea Utara pada 09 Oktober 2006. Saat itu, Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi langsung mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Aksi yang dilakukan oleh Korea Utara ini telah mengantarkan negara ini sebagai negara yang kini dikenal dengan kekuatan militer yang berkekuatan nuklir dan menjadi salah satu negara yang telah melakukan uji coba nuklirnya secara terbuka.

Unjuk kekuatan militer yang dilakukan Korea Utara, setidaknya, telah menunjukkan pada lawan-lawan politiknya mengenai kemampuan kekuatan senjata nuklir. Kondisi itu berimbas pada pemahaman lawan untuk tidak melakukan serangan pertama, namun justru dengan mengurungkan niat untuk melakukan invasi. Keengganan lawan dalam melakukan invasi menjelaskan adanya bentuk kekhawatiran Amerika Serikat dan sekutunya sebagai lawan politik Korea Utara terhadap bentuk ketakutan dan kerugian yang dapat terjadi jika tidak mengindahkan unjuk kekuatan senjata nuklir Korea Utara sebagai bagian dari kebijakan untuk menangkal setiap musuh yang berupaya menekan.

3.1.1 Ancaman Pihak Lawan terhadap Keamanan Nasional Korea Utara

Dalam interaksi regional dan internasionalnya, Korea Utara dihadapkan pada pola permusuhan dengan negara yang memiliki kemampuan militer yang sangat kuat, yaitu Amerika Serikat dan aliansinya. Bentuk permusuhan yang diakibatkan oleh adanya keinginan Korea Utara untuk melakukan reunifikasi atau penyatuan kembali dua Korea mendapat tentangan Amerika Serikat dan keengganan Korea Selatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap Amerika Serikat yang lebih memilih untuk beraliansi dengan Korea Selatan dan Jepang. Bantuan keamanan yang diberikan negara *superpower* tersebut kepada dua tetangga Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan menimbulkan kekhawatiran keamanan Korea Selatan atas kemampuan militer negara-negara tetangga di wilayah regional yang sama. Kondisi ini menyebabkan hubungan antar Amerika Serikat dan Korea Utara semakin meruncing. Konflik antar keduanya menjadi rintangan tersendiri bagi terciptanya rekonsiliasi antar dua Korea, terlebih lagi bentuk reunifikasi yang semakin sulit tercapai.⁹⁹

Konflik antar Amerika Serikat dan Korea Utara, dalam perjalanan sejarahnya, tidak terlepas dari kebijakan Amerika Serikat. Sebagai kekuatan besar yang memiliki banyak kepentingan di berbagai wilayah, termasuk Semenanjung Korea, Amerika Serikat sangat menyadari bahwa terdapat motivasi Korea Utara untuk menyerang Korea Selatan, dan bahkan berpotensi untuk menguasai Korea Selatan sebelum Amerika dapat mengirimkan bantuan kepada negara aliansinya tersebut. Skenario perang Korea inilah yang menjadi pertimbangan Agen Intelijen Pertahanan Amerika yang menyatakan bahwa wilayah Korea Utara menjadi perhatian utama militer Amerika Serikat.¹⁰⁰ Untuk mengantisipasi hal tersebut, Amerika dengan kekuatan militernya telah menyiapkan strategi militer yang ditujukan untuk membantu pertahanan Korea Selatan sebagai negara aliansinya di wilayah Korea. Estimasi

⁹⁹ Patrick A. Morgan, *The Role of The United States in The North Korean Nuclear Crisis*, dalam Terence Roehrig (eds), *Korea Security in a Changing East Asia*, USA: Greenwood Publishing Group, Inc, 2007, hal. 13

¹⁰⁰ Michael O'Hanlon and Mike Mochizuki, *Crisis on the Korean Peninsula: How to Deal With A Nuclear North Korea*, London: the Brooking Institution, 2003, hal. 59

perencanaan yang dilakukan Pentagon untuk kebutuhan pertahanan dan kebebasan Korea Selatan dijalankan dengan mengerahkan 6 divisi perang, yaitu unit kekuatan laut dan darat, kekuatan pesawat tempur, dan kapabilitas pesawat angkut untuk kekuatan udara.¹⁰¹

Pengerahan pasukan untuk mendukung aliansinya ini, tidak hanya membuat negara adidaya ini untuk terus memberikan dukungan militer sebagai dampak atas kondisi di Korea, juga dipengaruhi oleh bentuk kekhawatiran Amerika terhadap Korea Utara yang dinilai sebagai negara ekstrimis. Korea Utara dianggap sebagai negara yang dapat membahayakan stabilitas politik di Semenanjung Korea mengingat keaktifan dan peningkatan program persenjataan nuklir Korea Utara. Kekuatan militer Korea Utara yang meski saat ini masih jauh di bawah superioritas Amerika-Korea Selatan tetap saja menjadi ancaman bagi keamanan Korea Utara. Amerika beranggapan bahwa jika perang terjadi maka Korea Utara akan tetap sulit dikalahkan meski Amerika dan Korea Selatan unggul dalam hal militer.

Terdapat beberapa alasan yang menjelaskan tingkat kesulitan dalam mengalahkan Korea Utara, yaitu:¹⁰²

- Penempatan senjata Korea Utara dalam jumlah yang banyak berada sangat dekat pada wilayah Korea Selatan. Jarak penempatan dan jumlahnya akan tetap menyulitkan meski terdapat serangan tiba-tiba dan cepat dari pihak sekutu (Amerika dan aliansinya).
- Markas besar militer dan politik Korea Utara yang berada di bawah tanah sehingga hal ini menyebabkan Amerika akan mengalami kesulitan untuk melakukan penyerangan udara yang dapat melumpuhkan.
- Keberadaan geografis Korea Utara jauh lebih sulit untuk ditaklukkan dan dimanfaatkan untuk melakukan invasi jika dibandingkan dengan beberapa

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid*, hal. 61-62

wilayah yang pernah mengalami invasi Amerika dan sekutunya. Hal ini akan menyulitkan dalam melakukan operasi militer.

- Besaran jumlah pasukan militer Korea Utara yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah prajurit seperti di Irak, tentu saja akan menyulitkan invasi. Terlebih lagi hal itu akan membuat Amerika membutuhkan lebih banyak pasukan koalisi jika ingin melakukan invasi.
- Rasa nasionalisme para prajurit Korea Utara jauh lebih besar dibandingkan pasukan negara-negara lain, seperti Irak. Hal ini disebabkan oleh bentuk indoktrinasi pemimpin mereka yang didedikasikan untuk pertahanan nasional.

Berbagai alasan di atas merupakan bentuk kalkulasi analisa mengenai bagaimana Amerika mesti bersikap dalam menghadapi potensi perang dengan Korea Utara. Hal itu masih diperparah dengan berbagai kebijakan provokatif Korea Utara untuk tetap bersikukuh untuk menciptakan bentuk reunifikasi dua Korea. Sikap Amerika Serikat yang melihat Korea Utara sebagai penghalang untuk memperkuat aliansinya di wilayah Semenanjung Korea sekaligus tanggung jawab sebagai negara *superpower* untuk tetap melindungi setiap aliansinya, membuat negara adikuasa tersebut menjadikan Korea Utara sebagai ancaman. Berikut kronologis yang menjelaskan pola permusuhan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat.¹⁰³

- Pada 29 Januari 2002, dalam pidato kenegaraannya, Presiden George W. Bush melabelkan bahwa Korea Utara, Irak, dan Iran sebagai negara-negara poros setan atau *axis of evil* yang bertujuan untuk mengancam perdamaian dunia.
- 29 Juni 2002 terdapat *clash* antara kapal laut Korea Utara dan Korea Selatan di wilayah laut sebelah barat.
- 10 Januari 2003, Korea Utara mengumumkan penarikan dirinya dari keanggotaannya sebagai anggota NPT (non-Proliferation Treaty).

¹⁰³ Tim Beal, *North Korea: the Struggle Against American Power*, London: Pluto Press, 2005

- 18 September 2003, Amerika memberikan sanksi baru kepada Korea Utara terkait dengan dugaan perdagangan manusia.

Korea Utara sebagai ancaman dalam perspektif Amerika Serikat tertuang di dalam berbagai dokumen resmi pertahanannya yang menjelaskan bahwa tantangan terhadap keamanan Amerika dan dunia terletak pada keberadaan negara-negara dengan menganut sistem pemerintahan tirani. Negara-negara ini dikuasai oleh para diktator yang cenderung mengambil langkah provokatif untuk menciptakan instabilitas di baik dalam tataran regional maupun internasional. Negara-negara tersebut merupakan memiliki karakteristik kebrutalan dan sama sekali tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang selama ini terus digaungkan Amerika Serikat untuk menciptakan perdamaian dunia.. Negara-negara tirani tersebut memiliki sistem pemerintahan yang dibentuk oleh penguasa-penguasa lalim dengan menerapkan sistem pemerintahan yang semena-mena, seperti Korea Utara. Bentuk kesewenangan tirani tidak hanya diimplementasikan ke dalam kehidupan nasional saja, juga ke lingkup yang lebih luas, yaitu dunia internasional. Pemimpin negara-negara tirani ini mengancam kepentingan dunia dengan melakukan tindakan-tindakan ekspansi dan mencapai kepentingan dengan menciptakan jenis senjata pemusnah massal atau mensponsori kelompok-kelompok terorisme dan mengancam keamanan bersama.¹⁰⁴

Di sisi lain, keberadaan Amerika sebagai aliansi dari Korea Selatan yang selama ini coba disatukan kembali oleh Korea Utara melalui kebijakan reunifikasinya menjadi ancaman tersendiri bagi Korea Utara. Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar sekaligus kebijakan negara tersebut untuk memberikan payung keamanan, memberikan rasa ketidakamanan bagi Korea Utara untuk mencapai kepentingannya.

Rasa tidak aman tersebut diantisipasi oleh Korea Utara dengan mulai membangun kekuatan nuklir. Strategi yang diadopsi melalui doktrin nuklir ini

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 3

menuntun negara tersebut untuk mulai mengembangkan senjata nuklir sebagai bentuk perimbangan atas kekuatan militer Amerika Serikat dan aliansinya.

Implementasi strategi untuk menghadapi pola ancaman tersebut kemudian memicu negara tersebut untuk mulai melakukan pengembangan senjata nuklir. Sejak awal, nuklir yang ditujukan untuk menghasilkan energi untuk kebutuhan domestik ini kemudian berganti peran menjadi sebuah persiapan strategi militer. Perubahan kebijakan nuklir dari kebutuhan energi menjadi kekuatan militer ini ditujukan agar Korea Utara mampu menghasilkan kekuatan militer yang cukup kuat. Pengembangan senjata nuklir yang pada akhirnya diketahui dunia internasional melalui laporan Badan Atom Internasional yang menaruh curiga atas pengembangan rahasia pengayaan nuklir Korea Utara untuk kebutuhan militer ini kemudian direspon keras oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi aliansinya.

Untuk menghadapi Amerika dan aliansinya, Korea Utara ingin mewujudkan rasa aman, dan untuk itu, negara tersebut perlu memastikan bahwa tidak ada satupun negara yang berani untuk melakukan serangan militer. Hal ini disebabkan oleh rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan Korea Utara terhadap Amerika Serikat yang begitu tinggi.¹⁰⁵ Rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan yang begitu tinggi tersebut kemudian mendorong Korea Utara untuk menganut doktrin nuklir yang mendeskripsikan berbagai bentuk kebijakan negara tersebut untuk dapat mengimplementasikan strategi pertahanan yang bersandar pada pola sistem pertahanan yang berkiblat pengembangan senjata nuklir.

3.1.2 Jaminan Keamanan Korea Utara

Ketika Amerika Serikat menunjukkan kepemilikan kekuatan senjata nuklirnya kepada dunia, beberapa negara lain juga ingin melakukan hal serupa, memiliki senjata nuklir tersebut, apalagi jika mereka melihat akan adanya konflik kepentingan dengan

¹⁰⁵ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 100

AS atau dengan negara berkekuatan nuklir lainnya. Tidak ada satupun negara yang merasa nyaman dengan membiarkan negara musuh melakukan monopoli, secara terang-terangan atau rahasia, terhadap senjata nuklir.¹⁰⁶ Kondisi ini yang kemudian memicu Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir melalui implementasi strategi penangkalannya sebagai jaminan atas keamanan nasional.

Jaminan atas keamanan nasional juga dipicu oleh berbagai permasalahan masa lalu atau perjalanan sejarah Korea Utara. Perjalanan sejarah yang dipengaruhi oleh berbagai konflik yang melibatkan dua Korea menjadi alasan tersendiri bagi Korea Utara untuk terus mempersiapkan kekuatan militer sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi potensi konflik yang sewaktu-waktu terjadi. Perang Korea yang terjadi pada periode 1950-1953 memang secara *de facto* masih berlangsung mengingat penyelesaian perang tidak berdasarkan perjanjian kesepakatan untuk menghentikan perang namun hanya dilalui dalam proses gencatan senjata. Perang dua korea atau yang lebih dikenal perang Korea tersebut melibatkan Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi sebagai dampak polarisasi dua kutub ketika masih berada pada era perang dingin. Korea Selatan yang didukung oleh Amerika sementara Korea Utara yang beraliansi dengan Uni Soviet. Dalam sejarahnya, perang Korea terjadi akibat permasalahan internal yang mengakibatkan timbulnya perang sipil, namun intervensi pihak luar yang memiliki kepentingan dalam permasalahan tersebut memberikan permasalahan krusial tersendiri.¹⁰⁷

Intervensi asing dalam kerangka aliansi yang dimulai sejak lama terus berlangsung sampai sekarang. Korea Utara yang kini beraliansi dengan Cina dengan memperkuat hubungan perdagangan telah banyak membantu negara tersebut melalui peningkatan ekspor pasar dan menjadikan Cina sebagai *partner* perdagangan terbesar Korea Utara. Di sisi lain, motivasi Amerika dalam melindungi setiap aliansinya yang mendapat ancaman terus memberikan dukungan militer agar Korea Selatan tetap berada posisi dominasi atau keunggulan militer melalui kerjasama komando

¹⁰⁶ *Op. Cit.*, A.J.C. Edwards, "Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace", hal. 17

¹⁰⁷ *Op. Cit.*, Tim Beal, *North Korea: the Struggle Against American Power*, hal. 51

kombinasi militer Korea Selatan-Amerika dengan menempatkan lebih dari 37.000 pasukannya di Okinawa.¹⁰⁸

Untuk mengimbangi kekuatan Amerika dan aliansinya di wilayah Semenanjung Korea, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklir. Negara tersebut mengklaim telah melakukan beberapa tes senjata misilnya sejak Februari 2003 sebagai persiapan untuk kapabilitas pertahanannya.¹⁰⁹ Pengembangan kapabilitas pertahanan Korea Utara ini dilakukan secara serius meskipun pihak Korea Utara berdalih bukan untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman nyata yang berasal dari Amerika Serikat dan Korea Selatan.¹¹⁰

Ancaman nyata dari Amerika dan aliansinya membuat Korea Utara mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang ada. Besarnya kekuatan ancaman menjadi indikator tersendiri bagi Korea Utara untuk mencari cara agar dapat mengimbangi kekuatan lawan. Dalam kalkulasinya, terdapat perbedaan atau kesenjangan kekuatan ekonomi dan militer antar kedua belah pihak. Berikut tabel yang menjelaskan bentuk kesenjangan kekuatan antara Korea Utara dengan Amerika dan Korea Selatan:

Tabel 6: Perbandingan Kemampuan Kapabilitas Pertahanan¹¹¹

	KOREA UTARA	KOREA SELATAN	AMERIKA SERIKAT
GDP (billions of dollars)	15	865	10.082
Defense budget (billions of dollars)	4	14	396

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 52

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 53

¹¹¹ Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2002/2003*, London: Oxford University Press, 2002

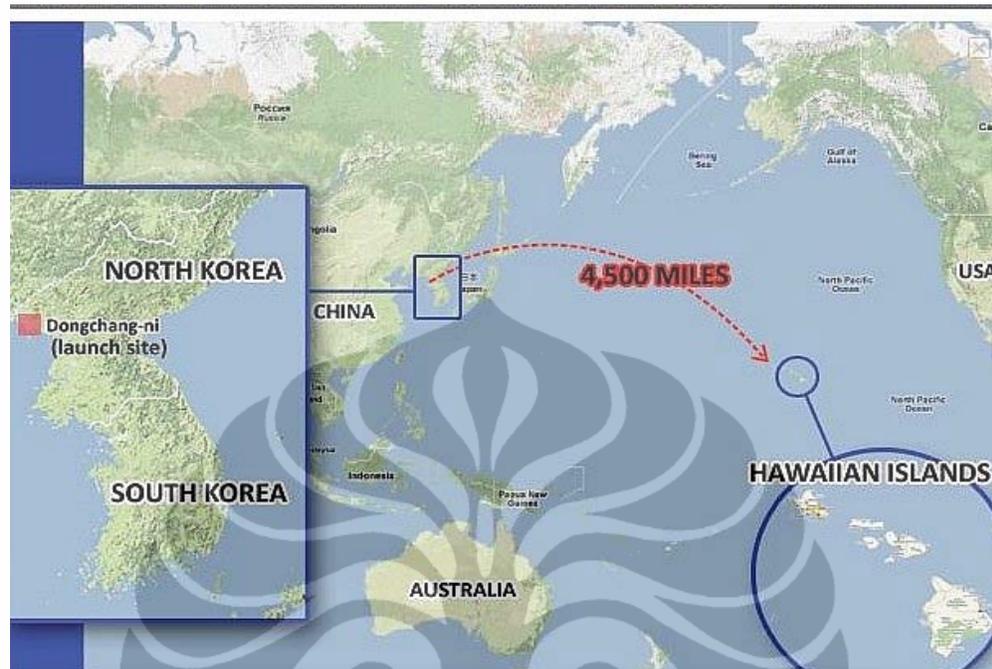
Defense spending as % of GDP	25	3	3.3
Active duty troops (millions)	1.1	0.685	1.4
Reservist	6	4.5	1.0

Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2002/2003*, London: Oxford University Press, 2002

Gambaran tabel di atas menjelaskan bentuk kapasitas kekuatan tiga negara yang terlibat di dalam pola *enmity* atau pola permusuhan. Bentuk kesenjangan kekuatan Korea Utara *vis a vis* Korea Selatan dan Amerika menghadirkan bentuk superioritas pihak sekutu yang memiliki potensi dominasi yang jauh lebih besar dibandingkan Korea Utara. Hal inilah yang menjadi pertimbangan untuk Korea Utara agar mampu menghadapi potensi konflik yang ada. Untuk mampu menghadapi potensi tersebut, maka pada tahun 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian NPT dan mulai mengembangkan nuklir untuk menghasilkan berbagai senjata-senjata berat yang mampu meningkatkan kemampuan militer Korea Utara.

Pengembangan senjata nuklir tersebut kemudian menghasilkan berbagai bentuk persenjataan rudal. Persenjataan tersebut yang dilengkapi hulu ledak nuklir merupakan produk dari kebijakan keamanan Korea Utara melalui pengadopsian doktrin nuklirnya dengan tujuan sebagai strategi penangkalan nuklir untuk menghadapi pola permusuhan antara Korea Utara *vis a vis* Amerika Serikat dan aliansinya di Semenanjung Korea.

Gambar 1: Jangkauan Nuklir Korea Utara



Sumber diolah dari http://farm3.static.flickr.com/2498/3690280524_e70e7774d6_o.jpg

3.2 Kredibilitas Militer Korea Utara melalui Senjata Nuklir

Paska keluarnya Korea Utara dari NPT pada tahun 2003 terkesan seperti sebagai sebuah permulaan bagi negara tersebut untuk dengan tegas mengakui bahwa saatnya bagi negara tersebut untuk memberikan peringatan kepada dunia bahwa sekarang negara tersebut telah memiliki kemampuan nuklir di bidang militer. Kondisi tersebut tidak hanya kembali mempertegas keyakinan masyarakat internasional bahwa Korea Utara telah kembali memulai pengembangan program senjata nuklirnya, juga mempertegas pemahaman bahwa Korea Utara memang telah menjadikan nuklir sebagai strategi militernya untuk kepentingan pertahanan yang bersifat ofensif dan defensif. Implementasi strategi nuklir tersebut diungkapkan kepada publik melalui pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Korea Utara pada Oktober 2006 yang menyatakan bahwa “will in the future conduct a nuclear test”. Pembangunan militer Korea Utara yang dilakukan melalui

pengembangan senjata nuklirnya ini memang ditujukan untuk menciptakan sebuah kekuatan militer yang ditujukan untuk menghadapi berbagai bentuk intimidasi dari negara-negara yang memiliki pola permusuhan dengan Korea Utara.

Gambar 2: Kapabilitas Serangan Nuklir Korea Utara



Sumber diolah dari http://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs028.snc1/3167_1133710991620_1492663093_30341693_5797939_n.jpg

Bentuk intimidasi yang dilakukan Amerika dan aliansinya baik melalui isolasi hubungan internasional maupun embargo ekonomi yang ditujukan untuk Korea Utara ini kemudian disikapi negara tersebut dengan membangun sebuah kredibilitas militer yang bersandar pada peningkatan kekuatan militer melalui pengembangan senjata nuklir yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Kredibilitas pengembangan senjata nuklir negara tersebut menjelaskan kapabilitas militer yang mampu mengimbangi kekuatan lawan dan kredibilitas ancaman Korea Utara yang juga memberikan tekanan politik dan militer.

Konteks kapabilitas militer terlihat pada bentuk perimbangan kekuatan yang kini tidak lagi didominasi oleh seberapa besar kekuatan udara, darat dan laut Korea Utara, namun terletak pada kepemilikan senjata nuklir yang mampu memberikan kehancuran masif pada setiap negara yang memiliki hubungan konfliktual.

Kehancuran masif tersebut terletak pada kemampuan destruktif senjata nuklir jika senjata tersebut diluncurkan. Keengganan pihak lawan untuk melakukan tekanan politik terlihat sebagai bentuk kredibilitas militer yang setidaknya mencapai level perimbangan.

Level perimbangan atas kekuatan lawan juga menjelaskan bahwa konteks hubungan konfliktual antara Korea Utara dan Amerika berikut sekutunya tidak lagi menekankan pada bentuk dominasi sepihak dari Amerika dan sekutunya. Kepemilikan senjata nuklir Korea Utara dengan berbagai jenis persenjataannya berimplikasi pada adanya bentuk penangkalan yang efektif antara dua pihak bertikai, Korea Utara dengan kesiapan senjata nuklirnya jika sewaktu-waktu mendapatkan serangan dan Amerika dengan senjata nuklir juga memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman yang seaktu-waktu datang. Konteks ancaman Amerika yang dirasakan Korea Utara dan ancaman yang dirasakan Amerika dari Korea Utara menjelaskan bahwa terdapat bentuk penangkalan dari masing-masing pihak atau *mutual deterrence*. Situasi ini menggambarkan adanya proses perimbangan kekuatan sehingga tidak ada satupun pihak yang berniat untuk melakukan serangan pertama atau *first strike*.

Bentuk motivasi yang mengarah pada keengganan untuk melakukan *first strike*, baik Korea Utara terhadap Amerika dan sekutunya dan sebaliknya, Amerika Serikat terhadap Korea Utara menjelaskan adanya perubahan komunikasi yang kini tidak lagi didominasi secara sepihak oleh Amerika. Kapabilitas dan kredibilitas senjata nuklir sebagai bentuk penangkalan dirasakan merubah perilaku komunikasi Amerika yang kini tidak lagi superior dalam memberikan berbagai tekanan-tekanan politik.

3.2.1 Kemampuan Defensif atau Serangan Balasan (Second Strike) Korea Utara

Bentuk penangkalan yang dicapai melalui pengembangan senjata nuklir yang kemudian diimplementasikan melalui strategi nuklir memberikan sebuah bentuk penangkalan yang jauh berbeda dengan strategi penangkalan yang hanya bersandar pada kemampuan militer lainnya. Konsekuensi atas pengimplementasian strategi ini tidak hanya mampu memberikan bentuk perlawanan atas manuver militer lawan saja untuk menghalangi kekuatan militer lawan dalam mencapai tujuan objektifnya atau meredam kemenangan militer pihak lawan saja, namun juga berimbas pada bentuk kehancuran yang sangat destruktif pada pihak lawan. Kondisi ini sejalan dengan bentuk *fear and suffering* yang menjadi esensi dari kemampuan destruktif strategi penangkalan nuklir.

Strategi penangkalan nuklir memiliki efektifitas dalam memberikan sebuah bentuk kehancuran yang jauh lebih kredibel. Kredibilitas strategi penangkalan ini menjadikan senjata nuklir sebagai strategi penangkalan yang mampu menciptakan bentuk kehancuran yang tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai namun memiliki dampak kehancuran yang sangat luas jika terdapat peluncuran senjata nuklir, maka bentuk pertahanan yang dipersiapkan lawan seperti apapun akan menjadi sangat sia-sia. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi logis dari kemampuan destruktif nuklir sehingga senjata nuklir ini mampu memberikan negara yang memiliki senjata nuklir untuk memberikan ancaman yang jauh lebih diperhitungkan dibandingkan ancaman untuk melancarkan serangan militer masif lainnya.

Kondisi inilah yang pada akhirnya mengantar mengapa Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir. Tujuan negara tersebut dalam mengembangkan senjata nuklir adalah demi memenuhi kebutuhan akan keamanan (*security needs*) negaranya, sebagai sebuah senjata pamungkas untuk melindungi negara mereka dari invasi dan pengaruh Amerika Serikat dan aliansinya yang selama ini lebih menekankan pada bentuk kekuatan militer dalam menghadapi konflik yang ada.

Bentuk penangkalan Korea Utara terletak pada jika terdapat bentuk invasi yang dilakukan oleh Amerika dan aliansinya maka akan terdapat konsekuensi serangan balik atau serangan balasan yang dapat berakibat pada kehancuran yang bersifat masif dan tidak hanya diderita oleh pihak-pihak yang berkonflik saja, namun berdampak luas. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa langkah *first strike* Amerika Serikat dan aliansinya akan menjadi sebuah kesalahan strategi militer jika konflik yang ada dihadapi dengan pilihan militer sebagai prioritas utama.

Sebagai antisipasi atas serangan *first strike* pihak lawan ini kemudian, pada tanggal 18 Juni 2004, Korea Utara menyatakan bahwa negara tersebut sedang membangun sebuah kekuatan penangkalan untuk kekuatan pertahanan.¹¹² Pengembangan senjata yang dilakukan Korea Utara ditujukan agar negara tersebut dapat memiliki kekuatan militer yang mampu menangkal berbagai motivasi invasi negara-negara yang selama ini memiliki pola permusuhan dengan Korea Utara. Hal itu diperkuat dengan adanya laporan dari Komandan Militer Amerika Serikat Jenderal Leon J. Lapoerte pada Bulan Maret 2005 yang mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan di tahun 2015 akan memiliki roket jarak jauh yang mampu mencapai Amerika. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Korea Utara akan memiliki kemampuan senjata nuklir yang ditujukan untuk menyerang wilayah Amerika Serikat dalam periode 10 tahun.¹¹³

Jenis persenjataan Korea Utara yang menggambarkan kekuatan defensifnya terlihat pada berbagai persenjataan nuklir yang memiliki jangkauan ke wilayah-wilayah strategis pihak lawan, di antaranya:

- Rudal Taepodong 2 yang memiliki jangkauan 5000-6000 kilometer yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan target Amerika Serikat.
- Rudal Taepodong 1 yang memiliki jangkauan 2200 kilometer yang dilengkapi hulu ledak nuklir dengan target Kota Okinawa, Jepang.

¹¹² *Op. Cit*, Tim Beal, *North Korea: the Struggle Against American Power*, hal. 117

¹¹³ *Ibid*, hal. 77-78

- Taepodong X yang memiliki jangkauan 2500-4000 kilometer dengan dilengkapi hulu ledak nuklir.

Berbagai jenis persenjataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kesiapan Korea Utara untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas negara tersebut dalam menghadapi potensi invasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dengan adanya kepemilikan jenis persenjataan nuklir ini maka kekuatan militer Korea Utara secara otomatis memberikan pengaruh penangkalan yang efektif dalam menjaga keamanan nasionalnya.

Adanya peningkatan kekuatan militer Korea Utara sebagai bentuk penangkalan membuat negara tersebut dianggap telah memiliki kemampuan dalam mengurangi pengaruh negara-negara yang selama ini mendominasi hubungan internasional. Berbagai usaha invasi dan perubahan keputusan politik telah mengalami perubahan paska peningkatan kekuatan militer Korea Utara sebagai strategi penangkalan nuklir. Pengembangan persenjataan nuklir Korea Utara dinilai sebagai implementasi strategi defensif sebagai bagian dari kerangka penangkalan atas rasa ketakutan terhadap invasi pihak asing. Upaya penangkalan ini menjelaskan bahwa adanya usaha Korea Utara agar kemampuan nuklir yang dimiliki negara tersebut pada akhirnya akan mencegah Amerika Serikat dan aliansinya untuk tidak lagi melakukan provokasi militer terhadap Korea Utara. Kondisi ini menggambarkan bahwa Amerika yang selama ini terus berusaha menentang usaha Korea Utara untuk melakukan reunifikasi dengan melakukan kerjasama militer mulai memperhatikan Korea Utara. Perubahan kebijakan Amerika Serikat yang kini mulai melunak menjelaskan bahwa adanya perubahan kebijakan yang kini mengarah pada kondisi diplomasi sebagai cara yang lebih damai dalam menyelesaikan bentuk perselisihan antara Korea Utara dengan Amerika dan aliansinya menggambarkan adanya signifikansi kekuatan defensif Korea Utara dalam menangkal upaya invasi yang dilakukan Amerika dan sekutunya.

Dampak pengembangan senjata nuklir Korea Utara sebagai bentuk penangkalan yang bersifat defensif ini mulai mendapatkan titik terang dengan adanya sikap Amerika Serikat yang mulai melunak. Sikap Amerika yang mulai melunak ini terlihat pada berbagai usaha diplomasi Amerika terhadap Korea Utara dengan tidak lagi menekankan pada bentuk militer sebagai prioritas utama dalam menghadapi Korea Utara, namun dengan menawarkan berbagai bantuan ekonomi dan upaya perundingan yang melibatkan berbagai negara yang tergabung di dalam *Six Party Talks*. Upaya ini dilakukan secara persuasif agar Korea Utara mau menghentikan pengembangan senjata nuklirnya yang kini telah menghasilkan banyak persenjataan nuklir yang mampu memberikan dampak kerusakan masif kepada pihak penyerang atau Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang.

Strategi penangkalan nuklir ini memiliki atmosfer defensif untuk menangkal kekuatan musuh. Peranan senjata nuklir Korea Utara sangat menjanjikan dalam meningkatkan kekuatan politik negara tersebut, bahkan di dunia dimana terdapat negara-negara pemilik senjata nuklir. Konsekuensi logis dari pengembangan senjata nuklir tersebut membuat negara lain akan mengalami degradasi kemampuan dalam mempengaruhi, mengintimidasi atau mendominasi Korea Utara.

3.2.2 Kemampuan Koersif atau Penyerangan (Future Attack) Korea Utara

Korea Utara kini lebih ofensif dengan didukung oleh kepemilikan senjata nuklir yang dapat memberikan kemampuan penyerangan dan dampak penyerangan yang sewaktu-waktu dapat dilakukan dengan dampak yang sangat destruktif sehingga negara tersebut dapat meningkatkan kemampuannya untuk mempengaruhi, mengintimidasi dan mendominasi negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer, untuk membuat mereka melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Walaupun negara lain tidak yakin bahwa negara pemilik nuklir tersebut akan menggunakan kekuatannya melawan negaranya dan siapapun tahu bahwa terdapat resiko yang mungkin tidak sebanding jika hal itu dilakukan.

Alasan lainnya terletak pada kemampuan senjata nuklir yang dapat mempengaruhi persoalan politik dan ekonomi yang dihadapi Korea Utara. Terdapat berbagai bentuk perundingan diplomasi yang dilakukan negara-negara lawan untuk mengedepankan diplomasi dan memberikan bantuan ekonomi untuk meredam kekuatan ofensif Korea Utara, sehingga dapat memberikan sebuah dominasi diantara negara sekitarnya di kawasan. Upaya diplomasi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya dengan meminta Korea Utara terlibat di dalamnya menggambarkan adanya bentuk diplomasi pertahanan antar pihak yang bertikai. Korea Utara, dalam hal ini, ikut terlibat dalam perundingan tersebut sebagai salah satu strategi untuk mengedepankan jalan damai melalui kebijakan diplomasi pertahanannya dengan tetap bergantung pada kekuatan ofensif senjata nuklirnya. Kondisi ini pada akhirnya membuat negara tersebut merupakan salah satu bagian dari strategi nuklir ofensif Korea Utara dengan tetap terlibat dalam pembicaraan di *Six Party Talks*. Upaya tersebut menggambarkan adanya posisi tawar Korea Utara yang kini tidak lagi inferior, namun sebaliknya, memberikan ruang bagi negara tersebut untuk melakukan upaya perundingan untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea.

Tujuan upaya diplomasi tersebut adalah sebagai bentuk keinginan untuk mencapai tujuan-tujuan politis. Kemampuan ofensif yang kini dimiliki Korea Utara terlihat pada adanya bentuk dominasi terhadap berbagai upaya diplomasi Amerika Serikat yang tidak langsung disepakati oleh Korea Utara, namun sebaliknya, justru Korea Utara yang telah memberikan pengaruh besar di dalam berbagai upaya diskusi keamanan dengan Amerika Serikat.

Berbagai keputusan politik yang dijatuhkan kepada Korea Utara, baik isolasi dalam hubungan antar negara maupun embargo ekonomi setidaknya telah mengalami pengurangan mengingat terdapat berbagai sikap Amerika Serikat yang kini lebih lunak untuk mengantisipasi kemampuan senjata nuklir Korea Utara. Diskusi keamanan yang menghadirkan berbagai pihak dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Semenanjung Korea menjelaskan bahwa terdapat upaya pengembangan senjata nuklir merupakan strategi untuk mempengaruhi berbagai kepentingan

nasional Korea Utara. Strategi nuklir tersebut ditujukan untuk memberikan posisi tawar dalam pengajuan syarat di dalam berbagai upaya diplomasi. Konteks pengajuan syarat ini menjelaskan bahwa kini terdapat peranan lebih Korea Utara untuk memainkan peranannya di dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Adapun berbagai persyaratan yang diajukan negara tersebut meliputi berbagai usaha untuk menormalisasikan krisis politik yang meruncing dengan mengedepankan diskusi keamanan.

Tujuan diskusi keamanan ini merupakan sikap diplomasi yang dikedepankan demi menghindari konfrontasi militer. Hal ini disebabkan karena Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklirnya telah menggambarkan bentuk kesiapan negara tersebut untuk terus meningkatkan kemampuan ofensifnya. Implikasi dari pengembangan persenjataan yang berbasis nuklir ini dipercaya, pada awal tahun 2007, telah berhasil melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Pengembangan jenis persenjataan yang ada seperti 600 Misil Scud jenis SRBM dan sekitar 100-200 Misil No-Dong jenis MRBM. Selain jenis misil tersebut Korea Utara juga sedang mempersiapkan jenis misil yang memiliki jangkauan target yang lebih jauh atau jenis misil yang dapat melintasi benua, seperti Misil Seri Taepodong jenis ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), yang kini sedang dalam proses pengembangan dan pengujian.¹¹⁴ Secara keseluruhan, Korea Utara kini telah memiliki lebih dari 600 sampai 800 misil ukuran sedang. Jumlah misil dengan kemampuan ofensif tersebut menjelaskan bahwa program pengembangan senjata nuklir Korea Utara bukanlah kebijakan yang mengada-ada. Keseriusan Pemerintah Pyongyang dalam meningkatkan kemampuan ofensifnya melalui berbagai uji coba nuklir di berbagai wilayah yang menggambarkan adanya bentuk peningkatan kekuatan strategi penangkalan nuklir, telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan program nuklir kini telah memberikan perubahan kondisi kekuatan militer negara tersebut.

¹¹⁴ *Ibid.*

Kondisi gambaran kekuatan ofensif Korea Utara memberikan sebuah potensi ancaman yang dapat diimplementasikan negara tersebut kepada pihak-pihak lawan sebagai bentuk penangkalan yang menitikberatkan pada kemampuan koersif sebagai bentuk kredibilitas atas kemampuan Korea Utara untuk menciptakan tindakan-tindakan ancaman di masa mendatang yang jauh lebih meyakinkan sebagai bentuk perimbangan.

3.3 Kapabilitas Kekuatan Udara Korea Utara dan Senjata Nuklir Korea Utara sebagai Bentuk Perimbangan

Dalam krisis di Semenanjung Korea seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat berbagai pola permusuhan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat. Kondisi ini yang kemudian menjadi pemicu utama bagi Korea Utara untuk segera menerapkan strategi nuklirnya sebagai bentuk perimbangan atas kekuatan militer Amerika Serikat yang jauh di atas kemampuan Korea Utara. Dukungan dana untuk pengembangan kekuatan militer negara adikuasa tersebut terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7: US National Defense Budget Authority¹¹⁵

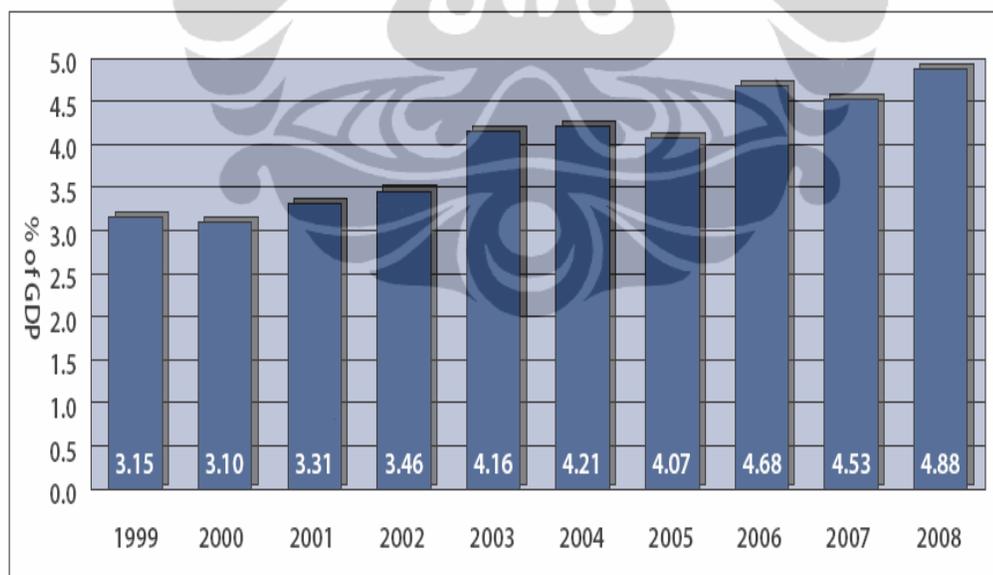
(US\$million)	2007	2008	2009			2010 Request		
			Base + Bridge	Remaining Supplemental Request	Total	Base	Overseas Contingency Operations	Total
Military Personnel	130,756	139,033	129,805	16,658	146,463	141,079	13,586	154,665
Operations & Maintenance	240,252	256,223	240,072	32,412	272,484	186,334	90,561	276,895
Procurement	133,772	165,006	109,818	22,858	132,676	107,418	23,741	131,159
R,D,T & E	77,548	79,567	80,181	759	80,940	78,634	310	78,944
Military Construction	13,961	22,064	24,081	2,295	26,376	20,987	1,405	22,392
Family Housing	4,024	2,846	3,848	-	3,848	1,959	-	1,959
Other	934	9,976	114	847	961	1,282	397	1,679
Total Department of Defense	602,247	674,715	587,919	75,829	663,748	537,693	130,000	667,693
Department of Energy (defence-related)	17,189	16,636			22,899			17,671
Other (defence-related)	5,696	4,917			6,973			7,416
Total National Defense	625,851	696,268			693,620			692,780

¹¹⁵ International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010, hal. 22

Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa besarnya dukungan dana untuk menggelar sebuah pasukan militer sekaligus pengembangan kekuatan militer yang dibangun untuk kebutuhan operasi militer. Kondisi ini menyebabkan bentuk kesiapan negara tersebut di dalam melakukan intervensi militer sekaligus dukungan bantuan militer kepada setiap aliansinya di berbagai kawasan. Jika dilihat secara kuantitatif, maka Korea Utara tentu saja akan sangat sulit menghadapi Amerika. Kondisi itu disebabkan pada bentuk kemampuan, kekuatan, dan kapabilitas militer Amerika yang sangat kuat. Dalam kalkulasinya terlihat pada besaran dukungan dana militer Amerika yang cukup besar di dalam membangun kekuatannya. Sebagai negara *superpower*, Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan militer yang sangat luar biasa.

Tabel 8: US Defense Expenditure¹¹⁶



Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010

¹¹⁶ *Ibid.*

Tabel di atas menjelaskan bentuk besaran dana belanja negara adikuasa tersebut sekaligus mencerminkan bentuk kekuatan militer negara tersebut dalam sisi pertahanan. Kondisi secara otomatis mempengaruhi kemampuan ofensif dan defensif negara *superpower* ini dalam menghadapi berbagai ancaman dan memperbesar peluang ketika melakukan invasi militer ke negara lain.

Tingkat pengembangan dan operasi militer Amerika Serikat dilakukan tidak hanya dengan meningkatkan dana dukungan pengembangan militer, juga dengan pengimplementasian belanja militer. Kondisi ini menggambarkan besaran kekuatan militer Amerika untuk menjalankan berbagai kebijakan pertahanannya. Besaran belanja militer negara tersebut dapat dilihat pada estimasi periode 2000 awal sampai dengan 2008. Besaran belanja militer negara tersebut tidak terlepas dari besaran tingkat operasi militer yang akan digelar demi memenuhi kebutuhan keamanan, baik keamanan nasional maupun keamanan internasional.

Tabel 9: US Air Force Capability 2010¹¹⁷

TOTAL AIRCRAFT	5484	256	1886	140	544	62	77	36	8485
TOTAL Combat Capable	2708	0	900	66	371	27	0	18	4090
TOTAL HELICOPTERS	167	3877	644	32	573	60	133	19	5505
TOTAL UAVs	158	4034	42	0	587	0	3	0	4824

Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010

Dalam kemampuan invasinya, Amerika memiliki dukungan kemampuan udara yang sangat besar. Kemampuan udara ini memiliki keunggulan untuk melakukan serangan yang masif dan cepat dalam menghancurkan kekuatan lawan.

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 49

Kondisi ini menjelaskan kemampuan ofensif negara ini dalam menghancurkan lawan-lawan politiknya di berbagai belahan dunia di manapun. Tabel di atas menjelaskan kemampuan udara Amerika Serikat yang sangat ofensif jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama Korea Utara.

Seperti yang tertuang di dalam dokumen strategi militernya, Amerika akan terus melakukan dan mendukung setiap aliansinya di berbagai belahan dunia di manapun, termasuk di wilayah Asia Timur di mana Korea Selatan berada. Untuk menghadapi sikap provokasi Korea Utara, Amerika juga menempatkan berbagai kemampuan militernya di Korea Selatan guna menghadapi Korea Utara. Untuk itu, negara adidaya tersebut menempatkan beberapa pasukan tempurnya yang didukung berbagai peralatan militer untuk menghadapi berbagai kemungkinan potensi konflik yang ada. Tabel di bawah menjelaskan bantuan militer Amerika Serikat yang ditempatkan di berbagai wilayah di Korea Selatan untuk kebutuhan pertahanan.

Tabel 10: US Pacific Command in South Korea¹¹⁸

	8 th Army	US Navy	USAF	USMC
Man Power	17.130	254	7.857	133
Forces by Role	<ul style="list-style-type: none"> • 1 HQ (8th Army) located at Seoul • 1 div HQ (2nd Inf) located at Tongduchon • 1 armd HBCT • 1 (hvy) cbt avn Bde • 1 arty (fires) bde; 1 AD bde 		<ul style="list-style-type: none"> • 1 (AF) HQ (7th Air Force) located at Osan AB • 1 ftrwg located at Osan AB with (1 ftr sqn with 20 F-16C <i>Fighting Falcon</i>/F-16D <i>Fighting Falcon</i>, 1 ftr sqn with 12 A-10 <i>Thunderbolt II</i>, 12 OA-10 <i>Thunderbolt</i> 	

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 43

			<i>II)</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 fr wglocated at Kunsan AB with (1 fr sqn with total of 20 F-16C <i>Fighting Falcon/F- 16D Fighting Falcon)</i> • 1 Special Ops sqn 	
Equipment by Type	<ul style="list-style-type: none"> • M-1 <i>Abrams</i> • M-2/M-3 <i>Bradley</i> • M-109; AH- 64 <i>Apache</i> CH-47 <i>Chinook</i> • UH-60 <i>Black Hawk</i> • MLRS • MIM-104 <i>Patriot/ FIM-92A Avenger</i> • 1 (APS) HBCT set 			

Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010

Jika dilihat pada tabel di atas maka terdapat bentuk perbandingan kekuatan militer yang cenderung bersifat asimetris. Dalam perbandingan tersebut, sangat terlihat ketimpangan kekuatan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Korea Utara hanya memiliki kemampuan militer yang sangat minimum jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Korea Utara, baik secara ekonomi dan militer, bukanlah lawan yang sepadan dengan Amerika jika dilihat dari bentuk kemampuan militernya. Korea Utara sama sekali tidak memiliki kemampuan penyerangan, terutama ke wilayah-wilayah yang berjarak cukup jauh mengingat negara tersebut hanya memiliki beberapa kapal terbang tempur. Kondisi ini menjelaskan bentuk

kekuatan udara Korea Utara yang tidak memiliki kemampuan penyerangan yang cukup untuk menghadapi pihak lawan, terutama Amerika Serikat. Tabel di bawah menggambarkan bahwa Korea Utara belum memiliki kemampuan ofensif yang memadai jika hanya bergantung pada kekuatan pesawat tempurnya.

Tabel 11: Kekuatan Udara Korea Utara, 2009/2010¹¹⁹

POWER TYPE	TOTAL
Man Power	110.000
Ftr 5/FGA	35
Tpt	6
Aslt Helicopter	1
Trg	3
Helicopter	5
SAM	70

Sumber diolah dari International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010

Kondisi atau kemampuan militer Korea Utara akan sangat berbeda jika kemampuan militernya, baik untuk kemampuan ofensif dan defensifnya didukung oleh kekuatan lain. Karena itulah, sejak Korea Utara mengumumkan untuk keluar dari NPT atau perjanjian mengenai pelarangan pengembangan senjata nuklir, negara ini telah mengembangkan persenjataan nuklir yang secara otomatis telah meningkatkan kemampuan militernya.

Kemampuan militer Korea Utara dengan didukung oleh rudal yang memiliki hulu ledak nuklir ini telah memberikan kredibilitas ofensif dan defensif negara ini sehingga, meski berada pada level militer yang rendah jika dibandingkan dengan Amerika dan aliansinya, namun dengan berhasilnya pengembangan senjata nuklir maka Korea Utara setidaknya telah melakukan pengembangan militer yang

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 412-413

meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya mengingat dampak destruktif yang dihasilkan senjata nuklirnya jika terjadi invasi terhadap negaranya atau jika digunakan untuk mengancam pihak lawan demi tujuan-tujuan politiknya. Dampak kekuatan nuklir yang bersifat *mutually assured destruction* atau bentuk kehancuran yang bersifat masif tersebut menjadi esensi tersendiri bagi pihak yang bertikai.

Jenis persenjataan nuklir Korea Utara di bawah ini menunjukkan bahwa Korea Utara telah memiliki kemampuan militer yang mematikan dan bahkan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah mengingat kemampuan Korea Utara dalam memproduksi berbagai materi nuklirnya.

Tabel 12: Jenis Rudal Nuklir Korea Utara¹²⁰

Range Type	Range (km)	Payload (kg)	Warhead	CEP (meters)	Launcher/ Fuels	Target	Status
Hwasong-6	500	770	Conventional possible nuclear, biological, or chemical	2000	Mobile, liquid fuel	South Korea	Deployed Exported
Hwasong-5	300	987-989	Conventional possible nuclear, biological, or chemical	800-1000	Mobile, liquid exported	South Korea	Deployed
Nodong	1000	700	Conventional possible nuclear, biological, or chemical	2000-4000	Mobile, liquid fuel	Japan	Deployed Exported
Scud-D	700	500	Conventional no information on other types	Unknown	Mobile, liquid	South Korea	Deployed Exported
Taepodong 2	5000-6000?	Unknown	Conventional possible nuclear,	Unknown	Fixed liquid fuel	United States	R&D Prototype Testing

¹²⁰ *Op. Cit.*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*

			biological, or chemical				
Taepodong 1	2200	Unknown	Convention al possible nuclear, biological, or chemical	Unknown	Fixed liquid fuel	Japan Okinawa Guam	Testing Deployed? Exported?
Taepodong X	2500- 4000	Unknown	Convention al possible nuclear, biological, or chemical	1000-2000	Mobile, Liquid Fuel		Deployed? Exported?

Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*

Berbagai jenis persenjataan di atas merupakan produk dari pengembangan nuklir yang dilakukan Korea Utara. Kemampuan produksi negara tersebut dalam menghasilkan berbagai variasi jenis persenjataan merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan pengembangan program nuklirnya. Pengembangan senjata nuklir yang memiliki kemampuan ofensif dan defensif tersebut telah menghasilkan persenjataan yang dapat mendukung negara tersebut dalam meningkatkan kekuatan dan kemampuan militernya. Dengan kata lain, Korea Utara berupaya mengembangkan nuklirnya melalui pengayaan uranium dengan tujuan menghasilkan berbagai jenis persenjataan nuklir sebagai indikator yang mendukung kekuatan militer negara tersebut, diantaranya dengan menghasilkan persenjataan yang memiliki kemampuan ofensif, seperti misil balistik, senjata nuklir, dan kapal selam bertenaga nuklir.

Pengembangan berbagai jenis kebutuhan militer ini menggambarkan bentuk kesiapan negara ini untuk terus meningkatkan kemampuan ofensifnya. Implikasi dari pengembangan persenjataan yang berbasis nuklir ini dipercaya, pada awal tahun 2007, telah berhasil melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Pengembangan jenis persenjataan yang ada seperti 600 Misil Scud jenis SRBM dan sekitar 100-200 Misil No-Dong jenis MRBM. Selain jenis misil tersebut, Korea Utara juga sedang mempersiapkan jenis misil yang memiliki jangkauan target yang lebih jauh atau jenis

misil yang dapat melintasi benua, seperti Misil Seri Taepodong jenis ICBM (*Intercontinental Ballistic Missile*), yang kini sedang dalam proses pengembangan dan pengujian.

Pengembangan senjata nuklir berupa Misil Seri taepodong jenis ICBM merupakan langkah pengembangan senjata nuklir yang dipersiapkan agar kemampuan nuklir negara tersebut semakin defensif. Jangkauan senjata yang dapat melintasi benua ini secara jelas mengindikasikan bahwa Korea Utara tengah mempersiapkan kemampuan nuklir yang dapat mengancam keamanan negara yang berjarak jauh sekalipun. Dalam konstelasi sistem internasional dan pola permusuhan yang menjelaskan konflik kepentingan yang dihadapi Korea Utara, terlihat jelas ancaman atau target misil ini sepertinya ditujukan untuk menghadapi Amerika yang sewaktu-waktu dapat digunakan.

Tujuan penggunaan misil dengan jangkauan yang sangat jauh ini mengindikasikan jika Amerika Serikat melakukan invasi militer atau melakukan intervensi yang dapat memicu terjadinya krisis yang mengarah perang maka peluncuran misil ini dapat digunakan. Dengan kata lain, implementasi kekuatan militer sebagai opsi terakhir dengan menggunakan misil ini untuk melakukan serangan balasan ke wilayah Amerika Serikat.

Dengan adanya berbagai pengembangan senjata nuklir, termasuk misil yang memiliki jangkauan lintas benua ini menggambarkan bahwa Korea Utara kini telah memiliki kemampuan untuk mengimbangi berbagai keunggulan militer Amerika Serikat dan aliansinya. Pengembangan program nuklir yang telah memberikan hasil signifikan di dalam proses pembuatan senjata nuklir seperti pada gambar di atas setidaknya telah memberikan kontribusi besar bagi Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan militernya. Jika negara tersebut tidak melakukan pengembangan senjata nuklir maka akan sulit bagi negara tersebut untuk memiliki kemampuan penangkalan yang dapat bersifat ofensif dan defensif.

Dengan adanya senjata nuklir tersebut, maka kekuatan ofensif dan defensif Korea Utara dalam kerangka penangkalan nuklir tersebut setidaknya memberikan sebuah potensi ancaman yang dapat diimplementasikan negara tersebut kepada pihak-pihak lawan sebagai bentuk penangkalan yang menitikberatkan pada kemampuan bertahan dan koersif sebagai bentuk kredibilitas atas kemampuan Korea Utara untuk menciptakan tindakan-tindakan penangkalan terhadap invasi Amerika Serikat sekaligus memberikan ancaman di masa mendatang yang jauh lebih meyakinkan sebagai bentuk perimbangan militer terhadap Amerika dan aliansinya.



Bab IV

Kebijakan Pengembangan Senjata Nuklir dan Strategi Penangkalan Nuklir Korea Utara

Bab ini merupakan bab analisa yang menjelaskan hubungan kausalitas antara pengembangan senjata nuklir dengan produksi jenis persenjataan nuklir dengan strategi penangkalan nuklir. Pengembangan senjata nuklir yang dibangun dengan melakukan pengayaan berbagai material nuklir dan kemudian ditujukan untuk menciptakan berbagai jenis persenjataan nuklir dengan jangkauan target yang bervariasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kemampuan militer Korea Utara. Peningkatan militer tersebut terbagi ke dalam dua sifat kemampuan militer, yaitu defensif dan ofensif.

Kemampuan defensif menjelaskan bentuk penangkalan yang dilakukan dengan mengimplementasikan unjuk kekuatan militer. Tujuan dari unjuk kekuatan militer ini merupakan bentuk sepihak dari Korea Utara untuk menggambarkan kredibilitas kemampuan dalam melakukan serangan balik sehingga pihak lawan atau Amerika dan aliansinya akan memiliki kecenderungan untuk mengurungkan niatnya di dalam melakukan penekanan maupun invasi militer ke Korea Utara.

Sedangkan kemampuan ofensif Korea Utara terletak pada produksi material nuklir yang terus dikembangkan sehingga terdapat akumulasi kuantitas persenjataan nuklir yang akan terus bertambah jumlahnya dan kredibilitas ancaman kepada Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Kemampuan ofensif lainnya terletak pada jenis persenjataan yang dihasilkan dengan variasi jangkauan persenjataan yang dapat mencapai target yang dituju. Terdapat beberapa jenis persenjataan dengan jangkauan dapat mencapai Jepang dan Korea Utara, dan bahkan Amerika Serikat. Akumulasi jenis persenjataan yang akan bertambah jumlahnya tersebut serta jangkauan yang jauh memberikan sebuah gambaran nyata atau prediksi terhadap kemampuan militer dan perilaku Korea Utara

yang di periode-periode akan datang mampu untuk memberikan ancaman atau *more credible future attack*.

4.1. Kredibilitas Senjata Nuklir sebagai Strategi Penangkalan Defensif

Dalam mencapai keamanan nasionalnya serta mencapai berbagai tujuan-tujuan politik demi kepentingan nasionalnya, Korea Utara telah mengambil langkah radikal yang selama ini ditentang oleh berbagai negara, terutama Amerika Serikat dan aliansinya. Keluarnya negara tersebut dari NPT tahun 2003 yang menjelaskan pelarangan pengembangan senjata nuklir bagi negara non-nuklir untuk kepentingan militer sebagai salah satu cara untuk meminimalisasi penyebaran nuklir, bagi Korea Utara, bukanlah sebuah hal yang patut dikhawatirkan meski harus menghadapi berbagai bentuk tekanan dunia internasional, baik bentuk ketidaksetujuan sampai pada sanksi ekonomi yang harus diderita negara tersebut.

Ketidaksetujuan dan sanksi ekonomi yang diterima oleh Korea Utara merupakan bentuk konsekuensi yang diterima negara tersebut selain semakin meruncingnya pola permusuhan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, meski di satu sisi, Korea Utara tetap menyadari bahwa negara tersebut belum memiliki kemampuan yang dapat mengimbangi negara-negara lawannya. Ketidaksetujuan dan sanksi ekonomi merupakan tekanan-tekanan politik yang dilakukan oleh Amerika sebagai bentuk ancaman atas eksistensi Korea Utara. Hal tersebut akan merubah konstelasi kekuatan. Untuk menghadapi hal itu, Korea Utara, kemudian, melalui produksi nuklirnya mulai bersikap radikal terhadap ancaman yang ada dengan membangun kekuatan yang memiliki daya tangkal terhadap ancaman invasi dan tekanan-tekanan politik yang ada. Bentuk penangkalan yang dilakukan Korea Utara secara komprehensif dilakukan untuk menghadapi sekaligus mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada dengan melakukan perimbangan kekuatan.

Untuk mengimbangi kekuatan lawan, maka Korea Utara, paska keluarnya dari NPT tahun 2003, mulai melakukan pembenahan strategi keamanan yang dimulai dari

pengadopsian doktrin nuklir. Doktrin ini kemudian menjadi dasar pemikiran untuk mengimplementasikan berbagai keputusan strategi militer yang diambil demi memenuhi kebutuhan pertahanan. Proses kebutuhan pertahanan yang bertitik tolak pada kemampuan penangkalan ini yang bersandar pada doktrin nuklir memicu dimulainya proses pengembangan senjata nuklir sebagai bentuk perimbangan atas kekuatan pihak lawan, baik secara defensif maupun ofensif.

Kredibilitas pertahanan sebagai strategi penangkalan yang bersifat defensif terletak pada pembangunan kekuatan militer yang mampu memberikan persepsi kepada lawan bahwa bentuk penekanan dan invasi militer bukanlah pilihan bijak yang patut dilaksanakan. Tujuan penangkalan yang bersifat defensif terletak pada pembangunan militer yang dapat meminimalisasi keinginan pihak lawan untuk melakukan penyerangan militer. Dalam beberapa kesempatan, termasuk di dalam dokumen keamanan Amerika, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa terdapat “misi perdamaian” yang diemban oleh Amerika dengan melakukan berbagai bentuk manuver politik dan militer, seperti ajakan kepada dunia internasional untuk mengisolasi Korea Utara sampai pada dukungan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap sekutunya, Korea Selatan, dengan memberikan bantuan militer, termasuk gelar pasukan dan senjata di berbagai wilayah Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara.

Untuk menghadapi kemungkinan invasi militer Amerika Serikat dan aliansinya, Korea Utara telah berupaya menghadapi bentuk penekanan dan invasi dengan mengembangkan kekuatan militer yang bersandar pada pengembangan senjata pemusnah massal yang memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa. Pengembangan senjata nuklir yang kini telah menghasilkan berbagai jenis persenjataan seperti yang telah dijelaskan pada tabel di atas menjelaskan bahwa akan terdapat bentuk kondisi dimana jika Amerika dan aliansinya melakukan penekanan dari sisi militer, seperti invasi maka Korea Utara, dengan kapabilitas penangkalannya, dapat melakukan serangan balasan yang dapat memberikan bentuk kehancuran yang bersifat massif. Sebelum hal itu terjadi, maka Korea Utara perlu untuk memberikan

sebuah pemahaman dengan memberikan berbagai sikap dan aksi sehingga Amerika Serikat dan aliansinya dapat menyadari dan memahami kredibilitas penangkalan defensif Korea Utara.

Kemampuan defensif ini telah memberikan perubahan atmosfer yang kini diadaptasi oleh Korea Utara sebagai bagian strategi keamanan. Salah satunya mengenai pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh negara tersebut setidaknya telah dilakukan ketika negara tersebut memutuskan untuk keluar dari NPT sampai dengan tahun 2010. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Asia Timur telah serta merta memberikan sanksi dalam waktu yang cukup lama yang akibatnya telah menimbulkan permasalahan utama di bidang ekonomi yang cukup serius yang hingga saat ini masih diderita oleh Korea Utara. Tentu saja, bahwa kemarahan Pyongyang terhadap sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya adalah satu dari sekian alasan utama yang melatarbelakangi uji coba nuklir yang terkesan memberikan satu bentuk perlawanan baru. Pada umumnya, Korea Utara menganggap AS sebagai ancaman utama. AS juga mengawasi Korea Utara sebagai negara pendukung teroris. Dengan alasan itu, Washington memberikan sanksi ekonomi kepada Pyongyang. Dalam keadaan seperti itu, melihat hasil perang di Afganistan dan Irak, Korea Utara mengkhawatirkan bahwa pihaknya akan bisa juga menjadi sasaran berikut dalam daftar gempuran AS. Oleh karena itu, Korea Utara menaruh perhatian pada pengembangan senjata nuklir dengan harapan bahwa nuklir itu akan memberikan gambaran kredibilitas kekuatan militer Korea Utara terkait dengan kekuatan nuklirnya yang digunakan untuk mencegah AS tidak melakukan aksi provokasi militer terhadap Korea Utara.

Kredibilitas penangkalan yang bersifat defensif tersebut telah dibangun oleh Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklir yang dimulai dari pengayaan uranium sampai pada langkah uji coba senjata yang telah beberapa kali dilakukan.

Berikut beberapa upaya pembangunan kredibilitas penangkalan defensif Korea Utara melalui uji coba senjata nuklirnya:¹²¹

- 5 Juli 2006, aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara
- 9 Oktober 2006, Korea Utara berhasil melakukan uji coba pada sebuah terowongan di Pantai Timur dan ledakan yang terjadi langsung mendapatkan respon protes dari dua negara tetangganya, yaitu Korea Selatan dan Jepang
- Mei 2009, uji coba nuklir dengan estimasi kekuatan nuklir yang diperkirakan sebesar 4-5 kiloton

Langkah pengujian persenjataan nuklir ini jelas ditujukan untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya pihak-pihak lawan atau Amerika Serikat dan aliansinya agar mereka mengetahui bahwa Korea Utara telah berhasil mengembangkan senjata nuklir. Pesan yang ingin disampaikan adalah adanya bentuk kredibilitas senjata pemusnah massal yang harus diwaspadai. Tujuan penangkalan ini jelas mengisyaratkan bahwa telah terdapat perimbangan antar pihak yang bertikai.

4.2. Kredibilitas Senjata Nuklir sebagai Strategi Penangkalan Ofensif

Konteks strategi militer Korea Utara yang kini telah mengalami peningkatan kualitas telah mengkhawatirkan setiap negara yang memiliki potensi konflik dengan negara tersebut. Kekhawatiran tersebut disebabkan oleh terdapatnya peningkatan kekuatan militer Korea Utara pasca keluarnya dari NPT dan mulai memproduksi berbagai jenis persenjataan nuklir. Peningkatan kekuatan militer tersebut merupakan peningkatan kualitas kemampuan ofensif Korea Utara melalui pengembangan

¹²¹ *Op.Cit*, Andrew Scobell, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces*, hal. 95; Lihat juga *Op. Cit*, Larry A. Niksch, *North Korea's Nuclear Weapons Development and Diplomacy*, hal. 29

produksi material nuklir yang kemudian diimplementasikan ke dalam penciptaan berbagai hulu ledak nuklir.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat aktifitas pengembangan senjata nuklir dengan memproduksi pengayaan uranium dilaporkan telah membuat negara tersebut menghasilkan persediaan bahan perang kimia dalam jumlah besar. Dampak dari pelaksanaan program nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, menurut laporan CIA Amerika, Korea Utara dipercaya akan sudah memiliki 2 bom atom yang dicapai melalui pengayaan HEU Program atau *Highly Enriched Uranium Program*. Program ini dipercaya merupakan program yang dilakukan secara besar-besaran sehingga negara tersebut dianggap memiliki banyak deposito uranium yang menjadi alat utama di dalam mengembangkan senjata nuklir. Kepala Departemen Biro Perencanaan Kebijakan Amerika menyatakan bahwa melalui pengayaan uranium tersebut maka dapat diprediksi bahwa Korea Utara akan mampu menghasilkan atau menciptakan dua atau lebih senjata nuklir dalam setahun. Informasi lainnya menjelaskan bahwa dengan memiliki program pengayaan uranium tersebut, maka Korea Utara dapat menghasilkan 6 bom atom per tahunnya.

Melalui proses pengayaan uranium dan penanaman plutonium yang dilakukan di berbagai instalasi program pengembangan senjata nuklir, banyak yang berpendapat bahwa, terdapat setidaknya delapan fasilitas yang digunakan Korea Utara untuk memproduksi senjata kimia. Jumlah senjata kimianya berjumlah 12 buah atau lebih dan ditempatkan di enam tempat berbeda, dan diprediksi jumlah senjata berbahaya tersebut masih akan terus bertambah jumlahnya jika dilihat dari kemampuan produksi negara tersebut.

Kemampuan produksi negara tersebut di dalam mengimplementasikan pengembangan program nuklirnya ditujukan antara lain untuk mewujudkan dan mengembangkan persenjataan yang memiliki kemampuan ofensif, seperti misil balistik, senjata nuklir, dan kapal selam bertenaga nuklir. Kemampuan di dalam memproduksi berbagai jenis persenjataan itu memang ditujukan untuk menghadapi

potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tujuan utamanya terletak pada strategi penangkalan nuklir yang bersifat ofensif. Kondisi ini menggambarkan kesiapan militer Korea Utara untuk melakukan serangan kapan saja dan bahkan, berdasarkan kemampuan produksi negara tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah persenjataan nuklir negara tersebut dapat terus bertambah sebagai bentuk kesiapan negara tersebut, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Korea yang menyatakan bahwa “will in the future conduct a nuclear test”.

Gambar 3: Lokasi Uji Coba Nuklir Korea Utara



Sumber diolah dari <http://unik13.info/wp-content/uploads/2010/11/taepodong-2-korea-utara-13.jpg>

Pernyataan menteri pertahanan Korea Utara tersebut sepertinya ditujukan agar pihak lawan mulai menyadari bahwa kredibilitas ofensif Korea Utara kini tidak lagi diragukan. Hal tersebut dilakukan mengingat keberadaan Amerika Serikat sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar sekaligus kebijakan negara tersebut untuk

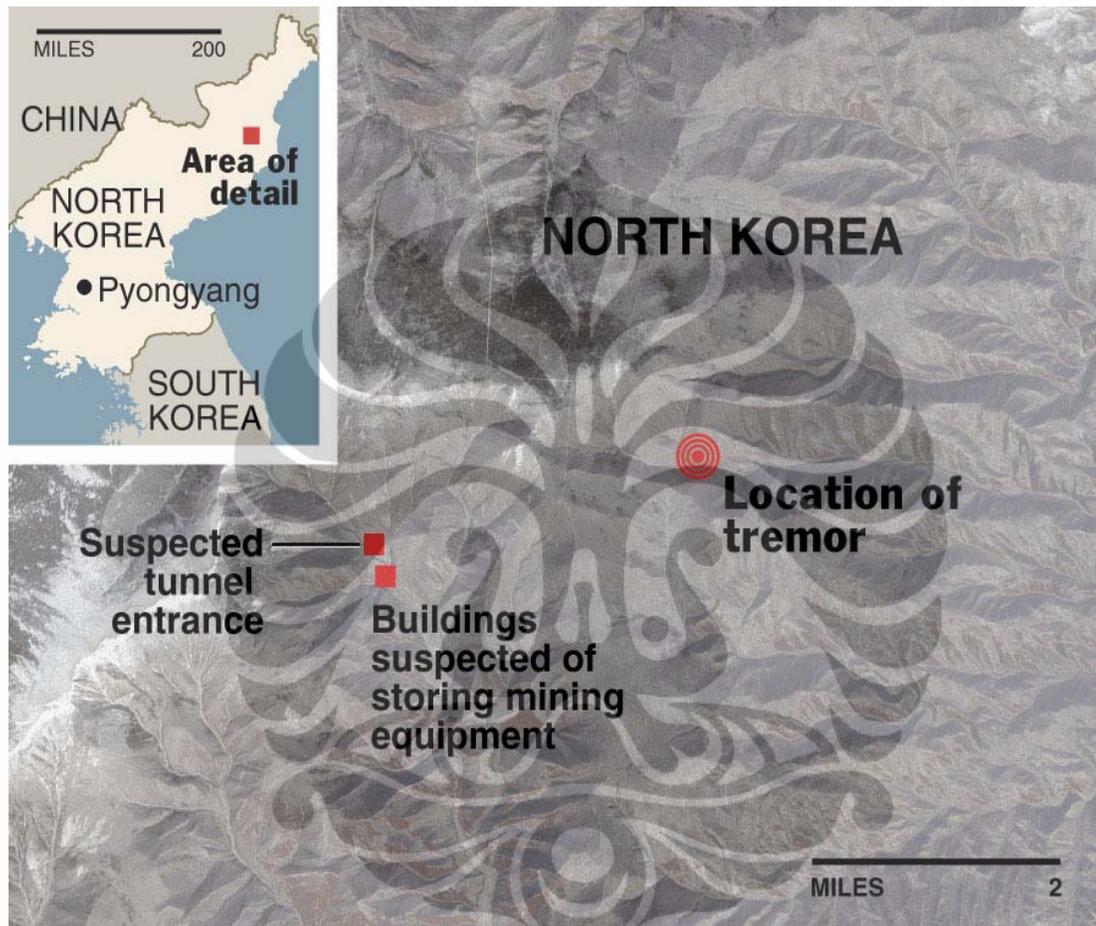
memberikan payung keamanan memberikan rasa ketidakamanan bagi Korea Utara untuk mencapai kepentingannya.

Seiring dengan terdapatnya peningkatan kemampuan ofensif Korea Utara, terdapat perubahan sikap dari Amerika Serikat dan aliansinya. Perubahan sikap ini mulai mengacu pada bentuk perundingan untuk mengatasi krisis nuklir yang ada. Tujuan diskusi keamanan ini merupakan sikap diplomasi yang dikedepankan demi menghindari konfrontasi militer. Hal ini disebabkan karena Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklirnya telah menggambarkan bentuk kesiapan negara ini untuk terus meningkatkan kemampuan ofensifnya. Implikasi dari pengembangan persenjataan yang berbasis nuklir ini dipercaya, pada awal tahun 2007, telah berhasil melakukan pengembangan senjata nuklirnya. Pengembangan jenis persenjataan yang ada seperti 600 Misil Scud jenis SRBM dan sekitar 100-200 Misil No-Dong jenis MRBM. Selain jenis misil tersebut, Korea Utara juga sedang mempersiapkan jenis misil yang memiliki jangkauan target yang lebih jauh atau jenis misil yang dapat melintasi benua, seperti Misil Seri Taepodong jenis ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), yang kini sedang dalam proses pengembangan dan pengujian. Secara keseluruhan, Korea Utara kini telah memiliki lebih dari 600 sampai 800 misil ukuran sedang. Jumlah misil dengan kemampuan ofensif tersebut menjelaskan bahwa program pengembangan senjata nuklir Korea Utara bukanlah kebijakan yang mengada-ada. Keseriusan Pemerintah Pyongyang dalam meningkatkan kemampuan ofensifnya telah menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan program nuklir kini telah memberikan perubahan kondisi kekuatan militer negara tersebut.

Terdapat berbagai bentuk perundingan diplomasi yang dilakukan negara-negara lawan untuk mengedepankan diplomasi dan memberikan bantuan ekonomi untuk meredam kekuatan ofensif Korea Utara, sehingga dapat memberikan sebuah dominasi diantara negara sekitarnya di kawasan. Korea Utara menginginkan senjata nuklir demi tujuan-tujuan politis. Kemampuan ofensif yang kini dimiliki Korea Utara terlihat pada adanya bentuk dominasi terhadap berbagai upaya diplomasi Amerika Serikat yang tidak langsung disepakati oleh Korea Utara, namun sebaliknya, justru

Korea Utara yang telah memberikan pengaruh besar di dalam berbagai upaya diskusi keamanan dengan Amerika Serikat.

Gambar 4: Lokasi Uji Nuklir Korea Utara



Sumber diolah dari http://www.nytimes.com/imagepages/2006/10/09/world/asia/20061009_KOREA_GRAPHIC_SUB.html

4.3. Kesimpulan

Pengembangan material nuklir yang berimbas pada perubahan signifikan Korea Utara di dalam kapabilitas dan kredibilitas kekuatan dan kemampuan militernya memberikan pengaruh terhadap pola interaksi antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Uji coba nuklir yang beberapa kali dilakukan telah menggambarkan kredibilitas kekuatan militer sebagai strategi penangkalan, baik secara ofensif maupun defensif dalam mempengaruhi kemampuan

diplomasi Korea Utara, tidak hanya untuk memberikan ruang bagi pihak lawan untuk mengurungkan niatnya melakukan invasi militer, juga memaksa pihak lawan untuk tetap menyadari bahwa Korea Utara kini tidak lagi dapat dipandang sebelah mata mengingat terdapat peningkatan kekuatan militer negara tersebut sebagai bentuk perimbangan terhadap kekuatan militer pihak-pihak bertikai di wilayah Semenanjung Korea.



Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Analisa penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa yang diajukan di awal penelitian. Bentuk analisa yang dilakukan melalui interaksi antar variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Interaksi antar variabel ini ditujukan untuk melihat pola interaksi yang pada akhirnya menggambarkan bentuk perimbangan kekuatan militer Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklir yang diawali oleh adopsi doktrin nuklir sebagai langkah perimbangan. Bentuk perimbangan yang bersandar pada pola ancaman yang memberikan bentuk kekhawatiran Korea Utara terhadap pola permusuhan antara Korea Utara dengan Amerika Serikat dan aliansinya. Pola permusuhan ini pada akhirnya menuntun Korea Utara untuk melakukan pengembangan senjata nuklir untuk menghasilkan berbagai jenis persenjataan nuklir.

Dalam menghadapi pola permusuhan di wilayah regionalnya, Korea Utara secara rahasia membangun sebuah kekuatan persenjataan nuklir yang ditujukan sebagai langkah kebijakan negara tersebut dalam mengamankan posisi negaranya dari ancaman kredibilitas kekuatan militer pihak Amerika dan aliansinya. Pengembangan senjata nuklir yang telah lama dicurigai pihak Barat (baca: Amerika) dan Badan Atom Internasional (IAEA). Pengembangan senjata nuklir secara rahasia ini merupakan bentuk kebijakan keamanan negara tersebut untuk menghadapi rasa ketidakamanan dan ketakutan atas serangan Amerika dan sekutunya. Kebijakan keamanan melalui pengembangan senjata nuklir secara rahasia ini merupakan “cry for help” Korea Utara untuk membujuk Amerika agar mau berdiskusi langsung.

Pengembangan senjata nuklir tersebut kemudian menghasilkan berbagai bentuk persenjataan rudal. Persenjataan tersebut yang dilengkapi hulu ledak nuklir merupakan produk dari kebijakan keamanan Korea Utara melalui pengadopsian doktrin nuklirnya dengan tujuan sebagai strategi penangkalan nuklir untuk

menghadapi pola permusuhan antara Korea Utara *vis a vis* Amerika Serikat dan aliansinya di Semenanjung Korea.

Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan dengan diawali kebijakan untuk menarik diri dari NPT pada tahun 2003 dan pengumuman kepada dunia bahwa Korea Utara kini telah mengembangkan senjata nuklir telah menyedot perhatian dunia, termasuk Amerika. Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan melalui berbagai reaktor nuklirnya yang ditempatkan diberbagai lokasi di wilayah negara tersebut telah menghasilkan berbagai jenis persenjataan. Produksi senjata nuklir itu kemudian diuji coba untuk memberikan efek penangkalan kepada pihak-pihak musuh untuk segera menyadari bentuk kekuatan perimbangan Korea Utara terhadap bentuk kekuatan ofensif dan defensif negara tersebut. Rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan yang begitu tinggi tersebut kemudian mendorong Korea Utara untuk menganut doktrin nuklir yang mendeskripsikan berbagai bentuk kebijakan negara tersebut untuk dapat mengimplementasikan strategi pertahanan yang bersandar pada pola sistem pertahanan yang berkiblat pada doktrin yang dianut dengan segera melakukan pengembangan senjata nuklir.

Doktrin nuklir yang bertujuan untuk mengadopsi berbagai kebijakan pertahanan yang menjelaskan pada bagaimana pembangunan kekuatan pertahanan Korea Utara mulai diimplementasikan negara tersebut. Dengan kata lain, implikasi kebijakan pertahanan Korea Utara yang menganut doktrin nuklir berdampak pada pembangunan kekuatan militer yang menjelaskan esensi proses pengembangan senjata nuklir negara tersebut.

Secara keseluruhan, Korea Utara kini telah memiliki lebih dari 600 sampai 800 misil ukuran sedang. Jumlah misil dengan kemampuan ofensif tersebut menjelaskan bahwa program pengembangan senjata nuklir Korea Utara bukanlah kebijakan yang mengada-ada. Keseriusan Pemerintah Pyongyang dalam meningkatkan kemampuan ofensifnya telah menunjukkan bahwa pelaksanaan

pengembangan program nuklir kini telah memberikan perubahan kondisi kekuatan militer negara tersebut.

Perubahan kekuatan militer negara tersebut kemudian berdampak pada konteks internasional dalam menghadapi Korea. Salah satu kebijakan internasional yang ditujukan untuk menghadapi Korea Utara yang dinilai membahayakan keamanan internasional adalah dengan diplomasi penawaran restrukturisasi perekonomian Korea Utara dan pemberian sanksi ekonomi. Restrukturisasi ekonomi yang ditawarkan oleh 4 negara, yaitu China, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan ini ditujukan sebagai bentuk diplomasi kepada Korea Utara agar negara tersebut bersedia menghentikan pengembangan program nuklir untuk menciptakan senjata nuklirnya. Meski begitu, Korea Utara tetap bersikeras untuk tetap melanjutkan pengembangan senjata nuklirnya mengingat tujuan utama negara tersebut adalah untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara nuklir dan keinginan untuk kembali bersatu dengan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Korea Utara.

Langkah penangkalan yang dilakukan Korea Utara dengan mengadopsi doktrin nuklir ini kemudian diimplementasikan dengan aksi peluncuran peluru kendali Korea Utara, 5 Juli 2006. Peluncuran beberapa rudal di Semenanjung Korea itu kian mengkhawatirkan beberapa negara, bahkan Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia mengecam tindakan itu. Dewan Keamanan PBB pada 5 Juli 2006 telah membicarakan hal ini atas permintaan perwakilan Jepang di PBB. Peluncuran rudal itu dapat diartikan Korut ingin mendapat posisi lebih kuat dalam perundingan damai soal nuklir Korut bersama enam negara (*Six Party Talks*), yang mengalami kebuntuan. Korea Utara juga kian frustrasi dengan jalan damai itu, setelah mengikuti *Six Party Talks* bersama AS, Korea Selatan, Jepang, China, dan Rusia, dan hingga kini belum mendapat hasil.

Bentuk unjuk kekuatan kembali dilakukan Korea Utara pada 09 Oktober 2006. Saat itu, Korea Utara berhasil melakukan uji coba nuklir pertamanya, yang diuji pada sebuah terowongan di pantai timur, dan ledakan yang terjadi langsung

mendapatkan banyak protes dari negara tetangga terdekatnya, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Aksi yang dilakukan oleh Korea Utara ini telah menghantarkan negara ini sebagai negara yang kini dikenal dengan kekuatan militer yang berkuatan nuklir dan menjadi salah satu negara yang telah melakukan uji coba nuklirnya secara terbuka.

Uji coba nuklir tersebut merupakan langkah penangkalan untuk mengimbangi kekuatan Amerika dan aliansinya di wilayah Semenanjung Korea, Korea Utara terus melakukan pengembangan senjata nuklir. Negara tersebut mengklaim telah melakukan beberapa tes senjata misilnya sejak Februari 2003 sebagai persiapan untuk kapabilitas pertahanannya. Pengembangan kapabilitas pertahanan Korea Utara ini dilakukan secara serius meskipun pihak Korea Utara beralih bukan untuk membangun kekuatan pertahanan dalam menghadapi ancaman nyata yang berasal dari Amerika Serikat dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi logis dari kemampuan destruktif nuklir sehingga senjata nuklir ini mampu memberikan negara yang memiliki senjata nuklir untuk memberikan ancaman yang jauh lebih diperhitungkan dibandingkan ancaman untuk melancarkan serangan militer masif lainnya.

Kondisi inilah yang pada akhirnya mengantar mengapa Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir. Tujuan negara tersebut dalam mengembangkan demi memenuhi kebutuhan akan keamanan (*security needs*) negaranya, sebagai senjata pamungkas untuk melindungi negara mereka dari invasi dan pengaruh Amerika Serikat dan aliansinya yang selama ini lebih menekankan pada bentuk kekuatan militer dalam menghadapi konflik yang ada.

Bentuk penangkalan Korea Utara terletak pada jika terdapat bentuk invasi yang dilakukan oleh Amerika dan aliansinya maka akan terdapat konsekuensi serangan balik atau serangan balasan yang dapat berakibat pada *mutually assured destruction* atau kehancuran yang bersifat masif dan tidak hanya diderita oleh pihak-pihak yang berkonflik saja, namun berdampak luas. Kondisi menggambarkan bahwa

langkah *first strike* Amerika Serikat dan aliansinya akan menjadi sebuah *blunder* atau kesalahan strategi militer jika konflik yang ada dihadapi dengan pilihan militer sebagai prioritas utama.

Sebagai antisipasi atas serangan *first strike* pihak lawan ini kemudian, pada tanggal 18 Juni 2004, Korea Utara menyatakan bahwa negara tersebut sedang membangun sebuah kekuatan penangkalan atau *deterrence* untuk kekuatan pertahanan. Pengembangan senjata yang dilakukan Korea Utara ditujukan agar negara tersebut dapat memiliki kekuatan militer yang mampu menangkal berbagai motivasi invasi negara-negara yang selama ini memiliki pola permusuhan dengan Korea Utara. Hal itu diperkuat dengan adanya laporan dari Komandan Militer Amerika Serikat Jenderal Leon J. Lapoerte pada Bulan Maret 2005 yang mengatakan bahwa Korea Utara kemungkinan di tahun 2015 akan memiliki roket jarak jauh yang mampu mencapai Amerika. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Korea Utara akan memiliki kemampuan senjata nuklir yang ditujukan untuk menyerang wilayah Amerika Serikat dalam periode 10 tahun.

Kepemilikan senjata nuklir sebagai langkah penangkalan strategi nuklir telah membuat Korea Utara dapat meningkatkan kemampuannya untuk mempengaruhi, mengintimidasi dan mendominasi negara lain tanpa harus menggunakan kekuatan militer, untuk membuat mereka melakukan hal yang sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kepemilikan senjata nuklir yang dapat mempengaruhi persoalan politik dan ekonomi yang dihadapi Korea Utara. Konsekuensi logis yang berkembang adalah terdapatnya berbagai bentuk perundingan diplomasi yang dilakukan negara-negara lawan untuk mengedepankan diplomasi dan memberikan bantuan ekonomi untuk meredam kekuatan ofensif Korea Utara, sehingga dapat memberikan sebuah dominasi diantara negara sekitarnya di kawasan. Korea Utara menginginkan senjata nuklir demi tujuan-tujuan politis.

Kemampuan ofensif yang kini dimiliki Korea Utara terlihat pada adanya bentuk dominasi terhadap berbagai upaya diplomasi Amerika Serikat yang tidak

langsung disepakati oleh Korea Utara, namun sebaliknya, justru Korea Utara yang telah memberikan pengaruh besar di dalam berbagai upaya diskusi keamanan dengan Amerika Serikat.

Dampak dari strategi penangkalan nuklir juga mempengaruhi berbagai keputusan politik yang dijatuhkan kepada Korea Utara, baik isolasi dalam hubungan antar negara maupun embargo ekonomi setidaknya telah mengalami pengurangan mengingat terdapat berbagai sikap Amerika Serikat yang kini lebih lunak untuk mengantisipasi kemampuan senjata nuklir Korea Utara.

Kemampuan militer Korea Utara dengan didukung oleh rudal yang memiliki hulu ledak nuklir ini telah memberikan kredibilitas ofensif dan defensif negara ini sehingga, meski berada pada level militer yang rendah jika dibandingkan dengan Amerika dan aliansinya, namun dengan berhasilnya pengembangan senjata nuklir maka Korea Utara setidaknya telah melakukan pengembangan militer yang meningkatkan kemampuan ofensif dan defensifnya mengingat dampak destruktif yang dihasilkan senjata nuklirnya jika terjadi invasi terhadap negaranya atau jika digunakan untuk mengancam pihak lawan demi tujuan-tujuan politiknya. Jenis persenjataan nuklir Korea Utara di bawah ini menunjukkan bahwa Korea Utara telah memiliki kemampuan militer yang mematikan dan bahkan diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah mengingat kemampuan Korea Utara dalam memproduksi berbagai materi nuklirnya.

Kredibilitas pertahanan sebagai strategi penangkalan yang bersifat defensif terletak pada pembangunan kekuatan militer yang mampu memberikan persepsi kepada lawan bahwa bentuk penekanan dan invasi militer bukanlah pilihan bijak yang patut dilaksanakan. Tujuan penangkalan yang bersifat defensif terletak pada pembangunan militer yang dapat meminimalisasi keinginan pihak lawan untuk melakukan penyerangan militer. Dalam beberapa kesempatan, termasuk di dalam dokumen keamanan Amerika, seperti yang dijelaskan di atas, bahwa terdapat “misi perdamaian” yang diemban oleh Amerika dengan melakukan berbagai bentuk

manuver politik dan militer, seperti ajakan kepada dunia internasional untuk mengisolasi Korea Utara sampai pada dukungan kekuatan militer Amerika Serikat terhadap sekutunya, Korea Selatan, dengan memberikan bantuan militer, termasuk gelar pasukan dan senjata di berbagai wilayah Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara. Untuk menghadapi kemungkinan invasi militer Amerika Serikat dan aliansinya, Korea Utara telah berupaya menghadapi bentuk penekanan dan invasi dengan mengembangkan kekuatan militer yang bersandar pada pengembangan senjata pemusnah massal yang memiliki kemampuan destruktif yang luar biasa.

Di sisi lain, kemampuan produksi negara tersebut di dalam mengimplementasikan pengembangan program nuklirnya ditujukan antara lain untuk mewujudkan dan mengembangkan persenjataan yang memiliki kemampuan ofensif, seperti misil balistik, senjata nuklir, dan kapal selam bertenaga nuklir. Kemampuan di dalam memproduksi berbagai jenis persenjataan itu memang ditujukan untuk menghadapi potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Tujuan utamanya terletak pada strategi penangkalan nuklir yang bersifat ofensif. Kondisi ini menggambarkan kesiapan militer Korea Utara untuk melakukan serangan kapan saja dan bahkan, berdasarkan kemampuan produksi negara tersebut, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah persenjataan nuklir negara tersebut dapat terus bertambah sebagai bentuk kesiapan negara tersebut, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Korea yang menyatakan bahwa “will in the future conduct a nuclear test”.

Kemampuan ofensif yang kini dimiliki Korea Utara terlihat pada adanya bentuk dominasi terhadap berbagai upaya diplomasi Amerika Serikat yang tidak langsung disepakati oleh Korea Utara, namun sebaliknya, justru Korea Utara yang telah memberikan pengaruh besar di dalam berbagai upaya diskusi keamanan dengan Amerika Serikat sebagai langkah perimbangan kekuatan militer Korea Utara melalui pengembangan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi penangkalan nuklir negara tersebut.

5.2. Implikasi Teoritis

Permasalahan, baik pertanyaan penelitian maupun hipotesa yang diajukan di dalam tesis ini merupakan bentuk analisa dengan menggunakan kerangka pemikiran yang mengacu pada pemikiran Robert Powel yang menjelaskan bentuk strategi penangkalan nuklir. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai alat analisa yang menuntun pada pola pikir sistematis dalam menguraikan permasalahan, baik menjawab pertanyaan penelitian maupun membuktikan hipotesa yang diajukan. Implementasi teori strategi penangkalan nuklir ini dijabarkan melalui operasionalisasi konsep yang disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan hipotesa. Operasionalisasi konsep yang telah dirumuskan telah menuntun penulis untuk mampu menganalisa pengembangan nuklir sebagai implementasi strategi penangkalan nuklir yang dimulai pada adopsi doktrin nuklir untuk menciptakan berbagai jenis persenjataan nuklir yang berdampak pada kemampuan penangkalan, baik yang bersifat ofensif maupun defensif.

Teori penangkalan nuklir mengeksplorasi berbagai bentuk pengembangan senjata nuklir serta signifikansi strategi penangkalan nuklir yang mematahkan logika perang klasik dimana bentuk penangkalan hanya fokus pada keamanan nasional saja. Teori penangkalan nuklir ini berimbas pada bentuk kredibilitas negara yang menganut strategi penangkalan nuklir ini untuk menghadapi ancaman dari pihak luar dalam memberikan daya tangkal yang besar sekaligus memberikan dampak ofensif mengenai bentuk kehancuran yang bersifat masif.

Konteks berbeda yang menjadi tujuan utama sekaligus perbedaan nyata antara strategi penangkalan dengan strategi penangkalan nuklir terletak pada karakter kekuatan nuklir yang menjelaskan bentuk kredibilitas strategi penangkalan nuklir yang terletak pada kemampuan penangkalan strategi nuklir yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman pihak lain yang berusaha melakukan penekanan maupun invasi militer sampai pada bentuk strategi penangkalan memberikan tekanan pada pihak lawan. Bentuk tekanan terhadap pihak

lawan ini akan membuat lawan akan berada pada kondisi *fear and suffering* mengingat dampak destruktif yang diakibatkan senjata nuklir. Konteks ini menjelaskan bahwa langkah negara lawan untuk melakukan *first strike* bukanlah pilihan bijak mengingat efek serangan balasan yang bertumpu pada kemampuan nuklir akan berakibat fatal, mengingat kekuatan senjata nuklir akan sulit untuk dibendung sehingga kemampuan bertahan seperti apapun akan menjadi sangat mustahil untuk dilakukan.

Kemampuan nuklir yang dapat memberikan dampak destruktif ini menjelaskan esensi senjata nuklir yang menciptakan kondisi *fear* pada pihak yang menjadi target dan *suffering* pada pihak yang telah menjadi target serangan. Sifat *fear* dan *suffering* inilah yang menjadi faktor pertimbangan bagi negara-negara yang bertikai. Kondisi ini pada akhirnya menentukan pada bagaimana strategi penangkalan nuklir ini juga ditujukan sebagai bentuk jaminan keamanan nasional dari berbagai bentuk tekanan dan gangguan politik dan militer pihak lawan, sekaligus memberikan kemampuan ofensif atau memberikan pengaruh signifikan di dalam mempengaruhi interaksinya melalui bentuk kredibilitas yang dibangun. Karena itu, teori yang digunakan di dalam penelitian ini telah memberikan logika berpikir dalam menganalisa gambaran spesifik dalam menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesa yang diajukan di dalam penelitian ini.

5.3 Implikasi Kebijakan

Dalam menganalisa berbagai bentuk kejadian yang menjelaskan adanya bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara serta pola permusuhan yang dihadapi negara tersebut sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi bentuk pengembangan senjata nuklir yang kini telah menghasilkan berbagai jenis persenjataan, tentu saja diperlukan upaya diplomasi pertahanan yang mampu meredam krisis yang terjadi di Semenanjung Korea. Konteks diplomasi pertahanan sebaiknya dijalankan untuk menciptakan konteks perdamaian yang diatur di dalam kontrol senjata sehingga dampak peningkatan dan perimbangan kekuatan

militer yang dilakukan Korea Utara tidak lagi menuju titik maksimal yang dapat membahayakan kondisi interaksi antar pihak.

Implementasi kontrol senjata diharapkan dapat mengurangi dampak ketegangan antar Korea Utara dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian dapat menciptakan bentuk degradasi krisis politik dan militer sehingga dapat mengarah pada bentuk upaya diplomasi yang sejalan dengan upaya diskusi *Six Party Talks* dan juga sesuai dengan keinginan subjektif Korea Utara melalui diskusi dan perundingan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barnaby, Frank. *How to Build a Nuclear Bomb and Other Weapon of Mass Destruction*, London: Granta Books, 2003
- Beal, Tim. *North Korea: the Struggle Against American Power*, London: Pluto Press, 2005
- Buzan, Barry. *People, States, and Fear*, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991
- Buzan, Barry. *An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relations*, London: The Macmillan Press Ltd, 1994
- Buzan, Barry dan Herring, Eric. *The Arms Dynamic in World Politics*, London: Lynne Rienner Publishers, Inc., 1998
- Cha & Kang. *Nuclear North Korea: A Debate on Engagement Strategies*, New York: Columbia University Press, 2003
- Clark, Ian. *Nuclear Past, Nuclear Present: Hiroshima, Nagasaki, and Contemporary Strategy*, USA: Westview Press Inc, 1993
- CRS Report for Congress, *North Korea's Nuclear Report Program*, Congressional Research Service: the Library of Congress, 2006
- Defense White Paper of the Republic of Korea 2003; Defense White Paper of the Republic of Korea 2006; Defense of Japan 2006
- Edwards, A.J.C. *Nuclear Weapons, The Balance of Terror, The Quest for Peace*, London: The Macmillan Press Ltd, 1986
- Hersman, Rebecca K.C. "Eliminating Adversary Weapons of Mass Destruction: What's at Stake?", *Center for The Study of Weapons of Mass Destruction*, National Defense University Press, Washington D.C, December 2004
- IAEA General Conference, *Implementation of Safeguard Agreement Between the Agency and the Democratic People's Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, GC(47)/13, 4 August 2005

- IAEA General Conference, *Implementation of Safeguard Agreement Between the Agency and the Democratic People's Republic of Korea Pursuant to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, GOV/200745-GC(51)/19, 17 August 2007
- IAEA General Conference, *Application of Safeguard in the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*, GOV/2009/45-GC(53)/13, 30 July 2009
- International Institute for Strategic Studies, *The Military Balance 2009/2010*, London: Oxford University Press, 2010
- Kaufman, Robert G. *In Defense of the Bush Doctrine*, Kentucky: University Press of Kentucky, 2007
- Kim, Samuel S. *North Korea's Nuclear Strategy and Interface between International and Domestic Politics*, Asian Perspective, Vol. 34, No. 1
- Larry A. Niksch. *North Korea's Nuclear Weapons Development and Diplomacy* Congressional Research Service, 2010
- Minnich, James M. *North Korean Tactics*, Major, U.S. Army, Northeast Asia Foreign Area Officer, CGSC 2001-2002, Section 12C, The Republic of Korea Army College, Seoul, Republic of Korea
- Newman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education, Inc., 5th edition, 2003
- O'Hanlon, Michael. *Crisis on The Korean Peninsula*, United States of America: The Brooking Institution, 2003
- O'Hanlon, Michael and Mochizuki, Mike. *Crisis on the Korean Peninsula: How to Deal With A Nuclear North Korea*, London: the Brooking Institution, 2003
- Powell, Robert. *Nuclear Deterrence Theory: the Search for Credibility*, New York: Cambridge University Press, 1990
- Roehrig, Terence (eds). *Korea Security in a Changing East Asia*, USA: Greenwood Publishing Group, Inc, 2007
- Spector, Leonard S. and Smith, Jacqueline R. *Nuclear Ambitions : The Spread of Nuclear Weapons 1989-1990*, Oxford: Westview Press, Inc., 1990
- The United States of America, *The National Security Strategy*, May 2010

The United States of America, *The National Security Strategy*, March 2006

Jurnal:

Afheldt, Horst and Sonntag, Philipp. *Stability and Deterrence through Strategic Nuclear Arms*, *Journal of Peace Research*, Vol. 10, No. 3, Special Issue: Peace Research in the Federal Republic of Germany, (1973)

Mohan, C. Raja. *The Tragedy of Nuclear Deterrence*, *Social Scientist*, Vol. 14, No. 4 Apr., 1986

Rosow, Stephen J. *Nuclear Deterrence, State Legitimation, & Liberal Democracy*, *Polity*, Vol. 21, No. 3, (Spring, 1989), Palgrave Macmillan Journals

Sutopo, A.R. *Perkembangan Pemikiran Strategi Nuklir Barat*, *Analisa CSIS*, No. 2, 1986

The Weapons of Mass Destruction Commission, *Weapons of Terror: Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms*, Stockholm: EO Grafiska, 2006

Internet:

Failure of Antimissile Talks Would Spark, "Arms Race, Medvedev Warns", *Global Security Newswire*, November 2010, diunduh pada tanggal 23 Maret 2011 melalui http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20101130_9145.php

IAEA and DPRK, *Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards*, diunduh pada 9 Agustus 2010 melalui http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeadprk/fact_sheet_may2003.shtml

National Defense University, "*Combating WMD: Challenges for The Next 10 Years*", February 2005

Pinkston, Daniel A, *North Korea Motivations for Developing Nuclear Weapons*, di unduh melalui http://cns.miis.edu/north_korea/dprkmotv.pdf, pada tanggal 15 Mei 2011

Scobell, Andrew, *North Korea's Military Threat: Pyongyang Conventional Forces, Weapons of Mass Destruction, and Ballistic Missile*, April 2007, Hal. 16 diunduh pada tanggal 8 Maret 2011 melalui <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/pub771.pdf>